

PROFIL DESA-DESA DI KABUPATEN MALINAU

Kondisi Sosial Ekonomi Desa-desa



Godwin Limberg, Ramses Iwan, Made Sudana, Aan Hartono,
Mathias Henry, Dody Hernawan, Sole, Dollop Mamung,
Eva Wollenberg dan Moira Moeliono

2005



Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung

Pemerintah
Kabupaten Malinau

**PROFIL DESA-DESA
DI KABUPATEN MALINAU
Kondisi Sosial Ekonomi Desa-desa**

Godwin Limberg, Ramses Iwan, Made Sudana, Aan Hartono,
Mathias Henry, Dody Hernawan, Sole, Dollop Mamung,
Eva Wollenberg dan Moira Moeliono

2005

© 2005 oleh Center for International Forestry Research
Diterbitkan oleh Center for International Forestry Research

Alamat pos: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia
Alamat kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor Barat 16680, Indonesia
Tel.:+62 (251) 622622Fax.:+62 (251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
Situs: <http://www.cifor.cgiar.org>

DAFTAR ISI

Ucapan terima kasih.....	x
PENDAHULUAN DAN RINGKASAN TEMUAN SURVEI.....	1
PROFIL DESA LEPAGA.....	20
1. Letak dan Lingkungan Desa.....	21
2. Sejarah Desa	21
3. Penduduk	21
4. Kelembagaan di Desa	22
5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	22
6. Sosial Budaya	23
7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	24
8. Pendidikan	27
9. Kesehatan	27
PROFIL DESA MABUNG	30
1. Letak dan Lingkungan Desa.....	31
2. Sejarah Desa	31
3. Penduduk	31
4. Kelembagaan di Desa	31
5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	32
6. Sosial Budaya	33
7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	34

8. Pendidikan	36
9. Kesehatan	37
PROFIL DESA MENABUR KECIL	41
1. Letak dan Lingkungan Desa	42
2. Sejarah Desa	42
3. Penduduk	42
4. Kelembagaan di Desa	43
5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	43
6. Sosial Budaya	44
7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	45
8. Pendidikan	48
PROFIL DESA LONG ADIU	51
1. Letak dan Lingkungan Desa.....	52
2. Sejarah Desa	52
3. Penduduk.....	52
4. Kelembagaan di Desa	53
5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	53
6. Sosial Budaya	54
7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	56
8. Pendidikan	59
9. Kesehatan	59
PROFIL DESA PELANCAU	63
1. Letak dan Lingkungan Desa.....	64
2. Sejarah Desa	64
3. Penduduk.....	65
4. Kelembagaan di Desa	65

5.	Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	65
6.	Sosial Budaya	66
7.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	68
8.	Pendidikan	71
9.	Kesehatan	72
PROFIL DESA HALANGA.....		75
1.	Letak dan Lingkungan Desa.....	76
2.	Sejarah Desa	76
3.	Penduduk	76
4.	Kelembagaan di Desa	76
5.	Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	77
6.	Sosial Budaya	78
7.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	79
8.	Pendidikan	81
9.	Kesehatan	82
PROFIL DESA LONG LAME.....		85
1.	Letak dan Lingkungan Desa.....	86
2.	Sejarah Desa	86
3.	Penduduk	86
4.	Kelembagaan di Desa	87
5.	Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	87
6.	Sosial Budaya	88
7.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90
8.	Pendidikan	93
9.	Kesehatan	93

PROFIL DESA LONG PALIRAN	96
1. Letak dan Lingkungan Desa.....	97
2. Sejarah Desa	97
3. Penduduk.....	97
4. Kelembagaan di Desa	97
5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	98
6. Sosial Budaya	99
7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100
8. Pendidikan	103
9. Kesehatan	104
PROFIL DESA LONG LEVANIT.....	107
1. Letak dan Lingkungan Desa.....	108
2. Sejarah Desa	108
3. Penduduk.....	108
4. Kelembagaan di Desa	108
5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	109
6. Sosial Budaya	110
7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	110
8. Pendidikan	113
9. Kesehatan	113
PROFIL DESA LONG KAPUR	116
1. Letak dan Lingkungan Desa.....	117
2. Sejarah Desa	117
3. Penduduk.....	117
4. Kelembagaan di Desa	117
5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	118

6.	Sosial Budaya	119
7.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	120
8.	Pendidikan	123
9.	Kesehatan	123
PROFIL DESA BINTUAN		126
1.	Letak dan Lingkungan Desa	127
2.	Sejarah Desa	127
3.	Penduduk	127
4.	Kelembagaan di Desa	127
5.	Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	128
6.	Sosial Budaya	129
7.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	130
8.	Pendidikan	133
9.	Kesehatan	134
PROFIL DESA LONG PADA.....		137
1.	Letak dan Lingkungan Desa.....	138
2.	Sejarah Desa	138
3.	Penduduk	138
4.	Kelembagaan di Desa	139
5.	Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	139
6.	Sosial Budaya	140
7.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	141
8.	Pendidikan	144
9.	Kesehatan	145

PROFIL DESA LONG PAYAU 148

1. Letak dan Lingkungan Desa.....	149
2. Sejarah Desa	149
3. Penduduk.....	149
4. Kelembagaan di Desa	149
5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	150
6. Sosial Budaya	151
7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	152
8. Pendidikan	154
9. Kesehatan	155

PROFIL DESA LONG URO 158

1. Letak dan Lingkungan Desa.....	159
2. Sejarah Desa	159
3. Penduduk.....	159
4. Kelembagaan di Desa	160
5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah.....	160
6. Sosial Budaya	161
7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	162
8. Pendidikan	165
9. Kesehatan	165

Daftar Lampiran

Kuesioner Responden Kunci: Kepala Adat	168
Kuesioner Responden Kunci: Kepala BPD	172
Kuesioner Responden Kunci: Dokter/Bidan/Dukun	177
Kuesioner Responden Kunci: Kepala Desa	182
Kuesioner Responden Kunci: Kepala Sekolah	187
Kuesioner Responden Rumah Tangga	190

Kuesioner Responden Kunci: Masyarakat Kurang Mampu	198
Kuesioner Responden Kunci: Warung	201

Daftar Tabel

Tabel 1.	Frekuensi menanam padi dalam kurun waktu 1999 – 2003 oleh masyarakat di 14 desa di Kabupaten Malinau (jumlah responden 152 orang)	6
Tabel 2.	Jenis usaha penting bagi rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau (jumlah responden 152) dan persentase responden yang menyebut	7
Tabel 3.	Perbandingan harga beberapa bahan pokok di 14 desa di Kabupaten Malinau	10
Tabel 4.	Kepemilikan harta oleh 152 responden rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau: jenis harta, waktu perolehnya dan persentase rumah tangga yang memiliki.....	11
Tabel 5.	Kepemilikan harta oleh 19 responden rumah tangga di Desa Pelancau: jenis harta, waktu perolehnya dan persentase rumah tangga yang memiliki.....	12
Tabel 6.	Kepemilikan harta 10 responden rumah tangga di Desa Long Adiu: jenis harta, waktu perolehnya dan persentase rumah tangga yang memiliki	13
Tabel 7.	Akar permasalahan yang dihadapi meningkatkan taraf hidup menurut peserta diskusi kelompok di 14 desa di Kabupaten Malinau.....	17
Tabel 8.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Lepaga	27
Tabel 9.	Jumlah dan sebab anak-anak berusia di bawah 10 tahun meninggal dalam 12 bulan terakhir di Desa Lepaga.....	28
Tabel 10.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Mabung	38
Tabel 11.	Jumlah dan penyebab anak-anak usia di bawah 10 tahun yang meninggal dalam 12 bulan terakhir di Desa Mabung.....	38
Tabel 12.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Adiu	60
Tabel 13.	Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun dalam 12 bulan terakhir di Desa Long Adiu	60
Tabel 14.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Pelancau.	73
Tabel 15.	Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Pelancau dalam 12 bulan terakhir	73
Tabel 16.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Halanga	82
Tabel 17.	Jumlah dan penyebab kematian anak-anak berusia di bawah 10 tahun di Desa Halanga dalam 12 bulan terakhir.....	83
Tabel 18.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Lame.	94

Tabel 19.	Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Long Lame dalam 12 bulan terakhir	94
Tabel 20.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Paliran.	104
Tabel 21.	Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Long Paliran dalam 12 bulan terakhir	105
Tabel 22.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Levanit.....	114
Tabel 23.	Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Long Levanit dalam 12 bulan terakhir.....	114
Tabel 24.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Kapur.....	124
Tabel 25.	Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Long Kapur dalam 12 bulan terakhir.....	124
Tabel 26.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Bintuan	134
Tabel 27.	Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Bintuan dalam 12 bulan terakhir	135
Tabel 28.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Pada.....	145
Tabel 29.	Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Long Pada dalam 12 bulan terakhir.....	146
Tabel 30.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Payau	155
Tabel 31.	Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Uro.....	166

Daftar gambar

Peta 1.	Penyebaran desa dengan lebih dari 50% Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Malinau.....	3
Gambar 1.	Sumber pendapatan penting bagi rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau	8
Gambar 2.	Usaha baru dalam kurun waktu 1999 - 2003 di 14 desa di Kabupaten Malinau	8
Gambar 3.	Jenis protein dan frekuensi konsumsinya di rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau	9
Gambar 4.	Persepsi responden rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau terhadap perubahan pendapatannya yang terjadi dalam 5 tahun terakhir	14
Gambar 5.	Persepsi responden rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau terhadap perubahan pengeluarannya yang terjadi dalam 5 tahun terakhir	15

Gambar 6.	Persepsi responden rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau terhadap perubahan kesejahteraan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir	15
Gambar 7.	Pandangan responden rumah tangga tentang alasan mengapa kondisi mereka berubah	16

Ucapan terima kasih

Para penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut membantu dalam pembuatan buku ini, diantaranya Bapak Marthin Billa, Bupati Kabupaten Malinau, Bapak Enci Moh. Yunus, Wakil Bupati Kabupaten Malinau, Bapak Jalung Merang, Asisten II, Bapak Yermia Bumbu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Mustofa Agung Sardjono, Universitas Mulawarman, Dina Hubudin, dan Popi Astriani.

Pendahuluan dan Ringkasan Temuan Survei

Latar Belakang

Penduduk Kabupaten Malinau memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang sangat tergantung kepada sumber daya alam terutama hutan dan tambang non migas (emas dan batu bara). Oleh karena itu kesejahteraan penduduk Malinau juga sangat tergantung kepada kebijakan pemerintahan kabupaten dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat pada era desentralisasi? Pertanyaan ini pasti menjadi pertanyaan banyak orang yang mencermati dampak dari desentralisasi. Untuk sementara kita dapat mengacu kepada laporan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Laporan pendataan tingkat kesejahteraan keluarga dari BKKBN cukup mengejutkan kita di mana jumlah keluarga miskin tidak pernah kurang dari 24% sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Bahkan, kecamatan yang paling miskin (Kayan Hulu) pada 2000 mencapai 81% jumlah keluarga miskin. Menurut data BKKBN dari 2001, ada 76 desa dengan lebih daripada 50% rumah tangga miskin. Berarti 58% dari semua desa di Kabupaten Malinau tergolong miskin. Jumlah orang yang tinggal di desa miskin paling besar di Kayan Hulu, Malinau Selatan dan Mentarang.

Bagaimana pengaruh desentralisasi terhadap upaya pengentasan kemiskinan? Sejak akhir tahun 1996, ada banyak perubahan terjadi di tingkat nasional yang pada akhirnya berdampak kepada kehidupan di tingkat kabupaten bahkan tingkat desa. Dampak juga dapat dirasakan pada kehidupan di daerah-daerah yang saat ini menjadi bagian dalam wilayah Kabupaten Malinau. Beberapa kejadian penting yang dapat dicatat adalah sebagai berikut:

- krisis politik nasional sejak akhir tahun 1996 yang diakhiri dengan jatuhnya kekuasaan mantan Presiden Soeharto, yang menandai berakhirnya era orde baru dan dimulainya era reformasi;
- kebakaran hutan besar-besaran dan kemarau panjang yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998;
- krisis moneter sejak tahun 1997;
- dikeluarkannya paket Undang-undang Desentralisasi pada bulan Mei 1999 sebagai awal dimulainya era otonomi daerah yang memberikan lebih banyak kekuasaan pada pemerintah kabupaten dan kota;
- Kabupaten Malinau berdiri pada bulan Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bulungan;
- DPRD Malinau terbentuk dan Marthin Billa terpilih sebagai Bupati Malinau (2001).
- dikeluarkannya Kebijakan Kehutanan Daerah yang membolehkan masyarakat menebang hutan untuk kepentingan komersil dengan rincian sebagai berikut:

- kebijakan IPPK dari Kabupaten Malinau diterapkan dari bulan April 2000 sampai Agustus 2001 dan telah menerbitkan 46 IPPK; operasi berhenti April 2003.
- kebijakan IUPHHK (Perda No 6 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) diterapkan dari Desember 2001 sampai Maret 2002 Pemkab Malinau telah menerbitkan 11 IUPHHK; lima aktif pada 2004.

Seluruh peristiwa-peristiwa tersebut telah memberikan dampak kepada perubahan kehidupan di masyarakat.

Center For International Forestry Research (CIFOR) dan Pemerintah Kabupaten Malinau yang diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bersepakat untuk melakukan kerjasama penelitian aksi (*action research*) bernama “Kemiskinan dan Desentralisasi” yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pemantauan tingkat kemiskinan dan dampak program pemerintah terhadap kemiskinan masyarakat miskin, terutama masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Untuk itu maka diperlukan indikator yang sesuai dengan keadaan lokal di Kabupaten Malinau. Sistem monitoring ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relatif cepat dan akurat kepada pemerintah maupun kepada masyarakat tentang dampak dari pembangunan terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, di masa depan diharapkan akan ada satu set indikator yang disepakati oleh para pihak dan menjadi acuan seluruh pihak dalam melakukan monitoring.

Untuk lebih memahami sebab akibat yang terkait dengan kemiskinan, penelitian aksi ini juga akan menganalisa akar masalah kemiskinan, termasuk peran para pihak yang terkait dengan usaha pengentasan kemiskinan.

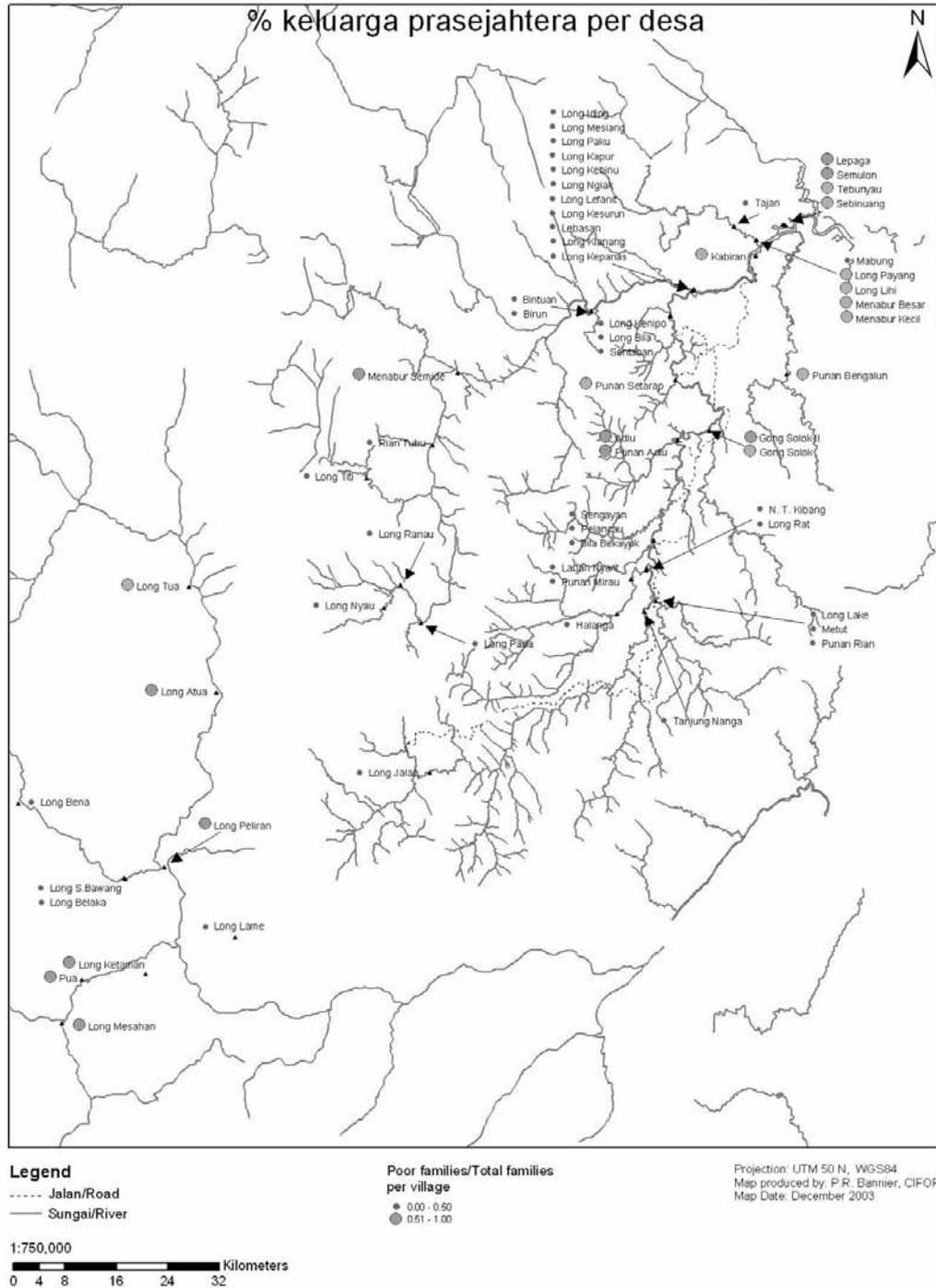
Dalam rangka “Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi”, dilakukan survei di 14 desa yang tersebar di Kabupaten Malinau (lihat Peta 1). Desa yang disurvei: Lepaga, Mabung, Menabur Kecil, Long Adiu, Pelancau, Halanga, Long Lame, Long Paliran, Long Levanit, Long Kapur, Bintuan, Long Pada, Long Uro dan Long Payau. Survei dilaksanakan pada bulan November 2003 dengan tujuan untuk mendapatkan:

- data dan informasi dasar situasi kehidupan masyarakat di desa-desa yang dianggap miskin di Kabupaten Malinau;
- persepsi perubahan di tingkat masyarakat dalam masa desentralisasi;
- persepsi masyarakat tentang akar penyebab kemiskinan.

Survei dimaksudkan untuk memahami kondisi masyarakat dan mulai mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi kemiskinan masyarakat.

Peta 1: Penyebaran desa dengan lebih dari 50% Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Malinau

Tingkat Kemiskinan di Kab. Malinau 2001 (BKKBN)



Peta tidak mencakup seluruh Kabupaten Malinau. Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Sungai Boh tidak tercantum.

Beberapa catatan tentang profil desa ini

Tujuan dari pembuatan profil desa ini adalah untuk menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat di desa yang dikunjungi dalam rangka "Program Penelitian Aksi Kemiskinan dan Desentralisasi". Laporan ini merangkum informasi dari wawancara informan kunci seperti kepala desa, kepala adat, ketua badan perwakilan desa dan kepala sekolah atau guru.

Informasi yang tercantum dalam statistik desa pada awal uraian masing-masing desa dirangkum dari laporan BKKBN tahun 2001, khusus jumlah kepala keluarga (KK), jumlah KK pra-sejahtera dan sejahtera I dan Sensus Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) tahun 2003, khusus jumlah rumah tangga dan jiwa. Selain itu informasi yang diamati selama kunjungan ke desa dan catatan di luar pertanyaan yang telah ditentukan dimasukkan dalam laporan ini. Profil desa ini diharapkan tidak hanya akan digunakan pada tahapan program "Kemiskinan dan Desentralisasi" selanjutnya, tetapi akan digunakan oleh masyarakat di desa-desa serta Pemerintah Kabupaten Malinau.

Laporan diawali dengan informasi umum tentang kondisi desa di Kabupaten Malinau. Setelah informasi ini ada penjelasan kondisi setiap desa yang disurvei. Aspek yang dibahas untuk setiap desa adalah letak dan sejarah, penduduk, kelembagaan di desa dan hubungan dengan pemerintah, kondisi sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam serta pendidikan dan kesehatan.

Penyusun laporan ini menyadari bahwa informasi profil desa ini belum lengkap dan walaupun kami telah berusaha untuk mencari informasi dari berbagai sumber dan dengan beberapa cara tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan. Kami terbuka dan berharap dapat informasi tambahan dan masukan yang dapat digunakan untuk penyempurnaan laporan ini. Laporan ini dimaksudkan sebagai masukan untuk memahami kondisi di beberapa desa yang semestinya menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan dan program untuk mendukung masyarakat mengembangkan diri sesuai dengan Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (GerBang DeMa).

Metode survei

Survei ini terdiri dari tiga bagian: (1) survei kondisi rumah tangga, (2) wawancara responden kunci, dan (3) diskusi kelompok kecil (*focus group discussion*). Pelaksanaan survei ini melibatkan tiga orang staf dari pemerintah kabupaten, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Pusat Statistik, dua orang dari LSM (Yayasan Adat Punan dan BIOMA), dua anggota dari masyarakat setempat dan tiga staf CIFOR.

Desa-desa yang disurvei dipilih berdasarkan data kemiskinan dari BKKBN tahun 2001, yang merupakan informasi terbaru tentang kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau. Menurut data BKKBN tahun 2001, ada 76 desa dengan lebih dari 50% kepala keluarga¹ tergolong pra-sejahtera atau sejahtera I atau yang disebut keluarga miskin. Berarti 58% dari semua desa di Kabupaten Malinau tergolong miskin. Jumlah orang yang tinggal di desa miskin paling besar terdapat di Kecamatan Kayan Hulu, Malinau Selatan dan Mentarang.

Dari desa-desa ini, dipilih desa-desa agar mewakili berbagai kelompok etnis yang ada di Kabupaten Malinau dengan penyebaran meliputi seluruh wilayah kabupaten

¹ BKKBN menggunakan kepala keluarga dalam pendataan, sedangkan BPS menggunakan rumah tangga dalam arti semua anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dan menggunakan satu dapur.

(dari dekat ibukota kabupaten, pedalaman sampai ke perbatasan). Jumlah desa besar dan kecil yang disurvei dipilih agar sesuai dengan perbandingan desa besar dan kecil dalam jumlah desa miskin secara keseluruhan.

Untuk mengetahui kondisi rumah tangga, diwawancarai dari 30% sampai 50% dari rumah tangga, dengan minimum sepuluh rumah tangga di desa yang mempunyai jumlah rumah tangga di bawah 20. Dari 14 desa yang disurvei hanya di Pelancau (sembilan belas responden rumah tangga) dan Long Uro (tiga belas responden rumah tangga) tergolong desa besar. Di desa lain diwawancarai sepuluh rumah tangga.

Di setiap desa direncanakan wawancara dengan responden kunci sebagai berikut:

- kepala adat;
- kepala desa;
- ketua Badan Perwakilan Desa;
- kepala sekolah;
- satu rumah tangga yang kurang mampu;
- tenaga medis;
- pemilik warung.

Sesuai kondisi di setiap desa responden kunci ini kadang-kadang diganti oleh responden lain yang juga mengetahui informasinya.

Di setiap desa diadakan kelompok diskusi (*focus group discussion*) yang terdiri dari:

- kelompok tokoh masyarakat;
- kelompok masyarakat biasa;
- kelompok perempuan.

Setiap kelompok terdiri dari lima sampai sepuluh anggota. Dalam diskusi ditanya pandangan peserta kelompok kecil tentang kemiskinan².

Kondisi Umum Desa-Desa di Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau terbentuk pada Oktober 1999 sebagai salah satu kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Bulungan. Setelah pemekaran Kabupaten Malinau merupakan kabupaten dengan wilayah yang paling luas di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sekitar 4,2 juta hektar. Berdasarkan sensus Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) pada bulan April - Mei 2003 jumlah penduduk Kabupaten Malinau adalah 48.087 jiwa. Penyebaran masyarakat di Kabupaten Malinau tidak merata, sekitar 50% penduduk tinggal di sekitar Malinau Kota, ibukota kabupaten.

Medan di Kabupaten Malinau berat dan sebagian besar daerah berbukit-bukit, bahkan bergunung dengan kelerengan yang curam. Prasarana jalan di Kabupaten Malinau masih terbatas dan sungai masih merupakan jalur transportasi utama kecuali untuk wilayah dekat kota Malinau dan sebagian Malinau Selatan. Selain itu sebagian wilayah Kabupaten Malinau hanya dapat dijangkau melalui udara, yaitu Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Sungai Boh. Hampir semua desa terletak di pinggir sungai besar untuk memudahkan transportasi dan sebagai sumber air untuk rumah tangga.

² Hasil wawancara rumah tangga dan kelompok diskusi akan dilaporkan sendiri.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Malinau hidup dari usaha pertanian dan hasil hutan. Usaha pertanian diharapkan memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan hasil hutan diperlukan untuk kebutuhan langsung rumah tangga dan sebagai sumber pendapatan. Kondisi geografis dengan penduduk terpencar dan prasarana transportasi yang terbatas mengakibatkan pemasaran hasil hutan dan pertanian terbatas.

Di beberapa desa ada kondisi administrasi masyarakat yang cukup unik: dalam satu pemukiman dengan jumlah penduduk dari 200 sampai 1.000 jiwa bisa terdapat 2 sampai 13 desa dengan masing-masing aparat desa dan lembaga adat. Kadang-kadang desa-desa yang terdapat dalam satu pemukiman ini, terdiri dari kelompok etnis yang berbeda. Misalnya: Desa Pelancau di lokasi Loreh di mana ada juga desa dengan masyarakat Merap dan desa dengan masyarakat Kenyah.

Hasil Survei

Sebelum membahas informasi per desa, kami menyajikan beberapa hikmah umum yang dapat disimpulkan dari data survei ini.

Sumber Penghidupan Masyarakat

Hampir seluruh masyarakat hidup dari berladang, dari desa di pelosok sampai dekat kota. Dari 152 responden di 14 desa lebih dari 90% setiap tahun membuat ladang dalam kurun waktu 1999 hingga 2003. Di Tabel 1 dapat dilihat bahwa hampir 80% responden setiap tahun membuat ladang. Sedangkan hanya empat responden (2,6%) dalam 5 tahun terakhir tidak pernah membuat ladang. Data ini tidak termasuk menanam padi di sawah.

Tabel 1: Frekuensi menanam padi dalam kurun waktu 1999 - 2003 oleh masyarakat di 14 desa di Kabupaten Malinau (jumlah responden 152 orang)

Tidak pernah menanam padi (1999 - 2003)	2,6%
1 kali menanam padi antar 1999 - 2003	1,3 %
Dua kali menanam padi antar 1999 - 2003	4,0 %
Tiga kali menanam padi antar 1999 - 2003	1,3 %
Empat kali menanam padi antar 1999 - 2003	7,2 %
Setiap tahun menanam padi (1999 - 2003)	79,6 %

Ketersediaan lahan merupakan hal penting untuk menunjang petani peladang. Di Kabupaten Malinau tidak semua petani punya keterjangkauan lahan yang sama: misalnya di dekat kota seperti Respen Sembuak dan Lubak Manis masyarakat Punan mengalami keterbatasan lahan pertanian yang berpotensi dan dekat pemukiman. Kasus keterbatasan lahan yang lain adalah masyarakat Punan Long Lame yang bergabung di Long Aran. Mereka juga mengalami kesulitan memperoleh lahan dan harus pinjam lahan dengan masyarakat Kenyah di Long Aran. Di desa-desa lain ketersediaan lahan pertanian cukup.

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat mengandalkan berbagai usaha selain hasil ladang. Jumlah usaha penting yang disebut oleh 152 responden rumah tangga adalah 378, terbagi dalam 24 jenis usaha (lihat Tabel 2). Dalam

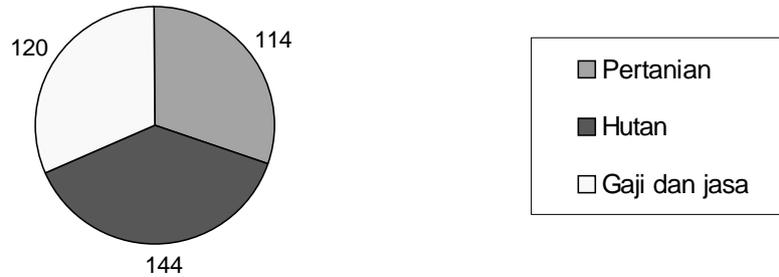
wawancara setiap responden dapat menyebutkan lebih dari 1 usaha sehingga jumlah lebih dari 152.

Tabel 2: Jenis usaha penting bagi rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau (jumlah responden 152) dan persentase responden yang menyebutkan

Jenis usaha	% responden yang menyebutkan	Jenis usaha	% responden yang menyebutkan	Jenis usaha	% responden yang menyebutkan
Pertanian	50,7%	Jual kayu bangunan	15,8%	Bantuan	2.6%
Gaharu	34,2%	<i>Fee</i>	12,5%	Buruh kayu	2.6%
Ternak	22,4%	Buruh tani	6,6%	Buah	2.0%
Kerajinan tangan	21,7%	Tunjangan aparat desa	6,6%	Sewa	2.0%
Buruh	19,1%	Jual ikan	6,6%	Dagang	1.3%
Gaji (perusahaan, pegawai, adat)	17,8%	Kiosk	3,9%	Jual rotan	0.7%
Berburu	15,8%	Jasa (bengkel, operator chainsaw, transportasi)	3,3%	Warung	0.7%

Tabel 2 menunjukkan bahwa 50% responden menyebutkan pertanian sebagai salah satu usaha penting. Gaharu masih merupakan sumber pendapatan penting bagi sepertiga responden, walaupun populasi gaharu di hutan semakin berkurang. Penjualan ternak dan kerajinan tangan serta upah sebagai buruh disebut oleh sekitar 20% responden sebagai sumber pendapatan yang penting. Persentase responden yang menyebutkan gaji dari perusahaan, sebagai pegawai negeri atau sebagai perangkat adat cukup tinggi, yaitu 17,8%. Kalau ke-21 sumber pendapatan ini dibagi dalam kelompok usaha pertanian, hasil hutan dan gaji-jasa terlihat bahwa masing-masing kelompok disebut oleh sekitar 30% responden. Jumlah usaha dari sumber daya hutan sedikit lebih tinggi daripada gaji dan jasa atau pertanian.

Gambar 1: Sumber pendapatan penting bagi rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau*)

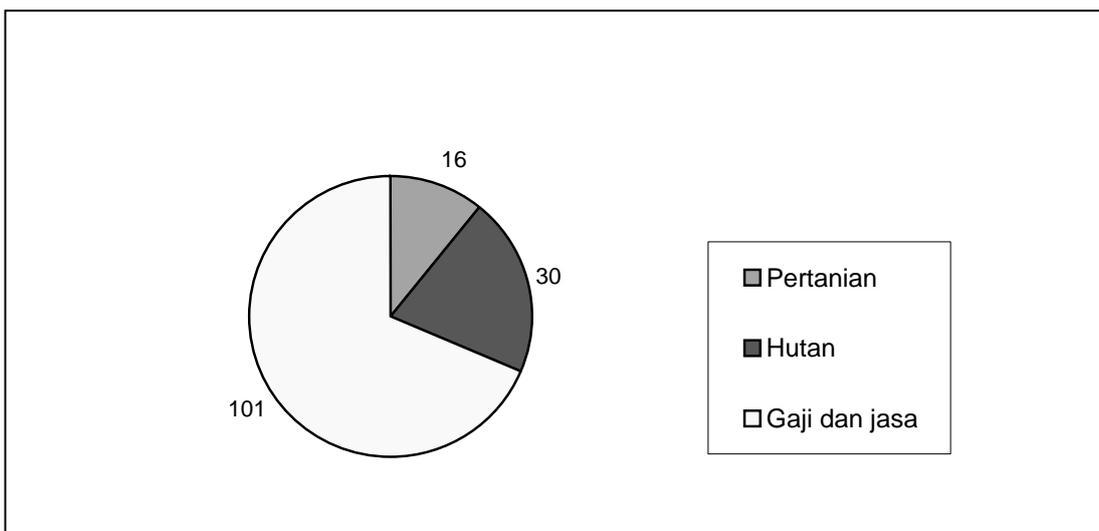


*) Jumlah responden 152 orang. Satu responden bisa menyebut lebih dari 1 usaha.

Di daerah terpencil masyarakat Punan tergantung pada satu usaha, yaitu hasil gaharu. Kesulitan yang mereka alami adalah besarnya fluktuasi dalam penghasilan dan ketergantungan pada pedagang gaharu, karena terikat oleh hutang. Masyarakat Kenyah di daerah terpencil seperti Apo Kayan mengharapkan penambahan penghasilan dari merantau ke Malaysia. Desa-desa di "tengah", seperti di Kecamatan Malinau Selatan dan Mentarang, biasanya mengandalkan beberapa usaha seperti mencari gaharu, menggesek dan hasil pertanian (kebun kacang, buah-buahan, kopi, dsb.)

Usaha baru yang berkembang dalam 5 tahun terakhir terdapat terutama pada kelompok gaji dan jasa (lihat Gambar 2).

Gambar 2: Usaha baru dalam kurun waktu 1999 - 2003 di 14 desa di Kabupaten Malinau*)



*) Jumlah responden 152 orang. Satu responden bisa menyebut lebih dari 1 usaha.

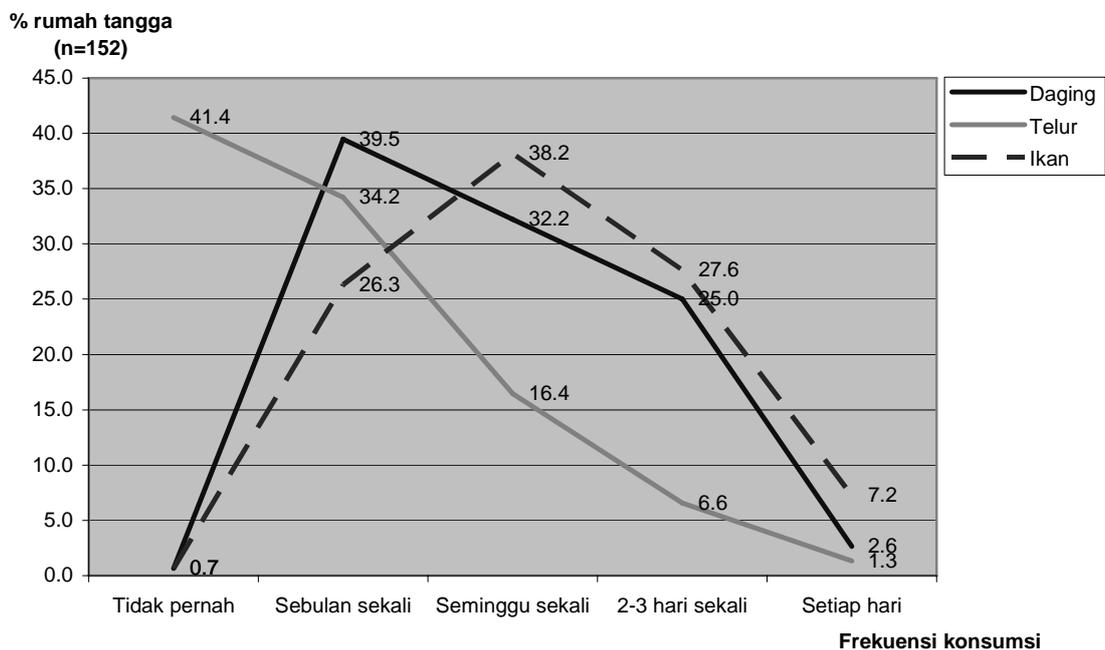
Konsumsi

Frekuensi makan makanan pokok lebih menggambarkan kebiasaan di masing-masing rumah tangga daripada menggambarkan perbedaan tingkat kesejahteraan. Tidak tentu rumah tangga yang makan 2 kali sehari berarti kurang sejahtera dan sebaliknya rumah tangga yang makan 3 kali sehari belum tentu sejahtera.

Dari survei diketahui bahwa rumah tangga yang makan 3 kali sehari mengkonsumsi lebih banyak protein. Sedangkan konsumsi protein sendiri punya hubungan erat dengan pendapatan rumah tangga; rumah tangga kaya mengkonsumsi lebih banyak protein. Namun berapa kali makan per hari (2 atau 3 kali) tidak punya hubungan dengan perubahan pendapatan, pengeluaran atau kesejahteraan rumah tangga.

Gambar 3 memberi indikasi bahwa kebutuhan protein untuk sebagian besar masyarakat belum terjamin. Telur jarang dapat diandalkan sebagai sumber protein karena didatangkan dari luar daerah sehingga harga di desa-desa di pedalaman relatif mahal. Daging hasil buruan dimakan setiap hari atau sekali dalam 2 sampai 3 hari oleh 27% dari responden. Ikan merupakan sumber protein yang masih relatif sering dapat diperoleh oleh masyarakat. Sepertiga dari responden mengkonsumsi ikan setiap hari atau sekali dalam 2 atau 3 hari.

Gambar 3: Jenis protein dan frekuensi konsumsinya di rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau*)



*) Jumlah responden 152 orang.

Hal yang sangat berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat adalah harga sembako. Di sebagian daerah harga sembako sangat tinggi karena diangkut melalui pesawat atau *longboat*. Tabel 3 membandingkan harga-harga beberapa bahan pokok di

desa-desa yang disurvei. Seperti dapat dilihat tingkat harga di Long Uro (Kec. Kayan Hulu) berlipat ganda dengan harga di sekitar Malinau Kota.

Tabel 3: Perbandingan harga beberapa bahan pokok di 14 desa di Kabupaten Malinau

	Beras (1 kg)	Minyak goreng (1 kg)	Minyak tanah (1 ltr)	Gula (1 kg)	Mie instant (1 bks)
Lepaga	4.500	7.000	2.000	5.000	1.500
Mabung	3.500	6.500	2.000	5.000	1.000
Menabur Kecil	3.500	6.500	2.000	5.000	1.000
Long Adiu	4.500	7.000	2.500	5.500	1.250
Pelancau	4.500	7.000	2.500	5.000	1.000
Halanga	TIDAK ADA WARUNG				
Long Lame	5.000	10.000	2.500	7.000	1.500
Long Paliran	4.000	10.000	3.000	6.500	1.500
Long Levanit	4.000	6.000	1.800	5.000	1.000
Long Kapur	3.000	7.000	2.000	5.000	1.000
Bintuan	4.000	7.500	2.000	5.000	1.000
Long Pada	TIDAK ADA WARUNG				
Long Uro	5.000	15.000	10.000	15.000	3.000
Long Payau	TIDAK ADA WARUNG				

Keamanan Pangan

Di daerah yang sangat terpencil, seperti Apo Kayan, masyarakat mengutamakan agar swasembada beras. Masyarakat di Apo Kayan 100% dapat memenuhi kebutuhan beras lokal, terutama dari hasil ladang sendiri atau kalau ada kekurangan, pinjam dari keluarga. Di Kecamatan Pujungan desa-desa yang tergolong miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan berasnya, sedangkan desa lain di daerah tersebut hampir atau sepenuhnya swasembada beras.

Masyarakat Punan di daerah terpencil tidak dapat memenuhi kebutuhan berasnya. Strategi mereka untuk mengatasi kekurangan adalah dengan beralih ke makanan pokok yang lain seperti singkong, sagu, atau pisang. Sebagian mereka menambah persediaan beras dengan meminjam beras dari pedagang gaharu.

Masyarakat lain (daerah tengah dan dekat kota) membeli beras dan atau mengharap jatah beras miskin, yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dengan harga murah, untuk mengatasi kekurangan beras.

Harta Kekayaan Rumah Tangga

Dalam survei ini, dicari informasi tentang jenis harta yang dimiliki rumah tangga sebagai indikasi kondisi rumah tangga tersebut. Waktu diperoleh harta ini ditanya sebagai indikasi tentang perkembangan kondisi rumah tangga sejak tahun 2000. Di Tabel 4 dapat dilihat bahwa aset utama adalah ternak ayam (63,2% dari 152 responden

punya) dan mesin ketinting yang dimiliki oleh 50% dari responden. Harta lain yang penting dan dimiliki oleh sekitar 30% dari responden adalah babi peliharaan, televisi, radio dan *chainsaw*.

Tabel 4: Kepemilikan harta oleh 152 responden rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau: jenis harta, waktu perolehannya dan persentase rumah tangga yang memiliki

Jenis kekayaan	Jumlah yang diperoleh sebelum tahun 2000	Jumlah yang diperoleh setelah tahun 2000	% aset yang diperoleh setelah tahun 2000	% rumah tangga yang punya
Sepeda Motor	1	2	66,7	2,0
Sepeda	7	7	50,0	9,2
Ketinting	38	38	50,0	50,0
<i>Chainsaw</i>	27	18	40,0	29,6
Gilingan padi	1	-	-	0,7
Babi	25	28	52,8	34,9
Ayam	70	26	27,1	63,2
Kolam	-	6	100,0	3,9
Parabola	5	9	64,3	9,2
televisi	17	31	64,6	31,6
CD player	7	25	78,1	21,1
Radio	21	26	55,3	30,9
Genset	5	3	37,5	5,3
Kulkas	1	3	75,0	2,6
Kompur	-	1	100,0	0,7
Barang Antik	24	7	22,6	20,4

Sebagian besar harta ini merupakan aset ekonomi rumah tangga, seperti ternak ayam dan babi, mesin ketinting dan *chainsaw*. Selain itu ada barang yang bersifat mewah seperti televisi dan radio. Kolam, kompor gas, CD player, kulkas, sepeda motor, televisi, parabola, radio dan babi peliharaan merupakan harta yang relatif banyak diperoleh setelah tahun 2000. Sebagian besar harta ini merupakan barang mewah dan hanya kolam, sepeda motor dan babi peliharaan adalah aset ekonomi. Perkembangan ini menggambarkan bahwa peredaran uang di masyarakat sejak tahun 2000 bertambah sehingga mereka dapat membeli barang mewah.

Dampak Kegiatan IPPK Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Di dua desa dari 14 desa yang dikunjungi, masyarakat menerima *fee*. Satu responden di kedua desa ini menyebut *fee* sebagai pendapatan rumah tangga utama (3,4% dari 29 responden yang diwawancarai di kedua desa). Selain itu ada 13 responden (44,8%) yang menyebut *fee* sebagai sumber pendapatan penting. Walaupun sebagian responden mengatakan *fee* hanya merupakan pendapatan "sewaktu-waktu" (tidak tetap).

Tabel 5 dan 6 menggambarkan perkembangan di dua desa yang telah menerima *fee* dari perusahaan. Di Desa Pelancau menonjol bahwa kepemilikan barang mewah

seperti televisi, CD player melonjak dan menjadi harta paling dominan: televisi dimiliki oleh 89,5% dari responden dan CD player oleh 52,6%.

Tabel 5: Kepemilikan harta oleh 19 responden rumah tangga di Desa Pelancau: jenis harta, waktu perolehannya dan persentase rumah tangga yang memiliki

Jenis kekayaan	Diperoleh sebelum tahun 2000	Diperoleh setelah tahun 2000	% aset yang diperoleh setelah tahun 2000	% rumah tangga yang punya
Sepeda Motor	-	-	-	-
Sepeda	1	-	-	5,3
Ketinting	4	4	50,0	42,1
<i>Chainsaw</i>	2	1	33,3	15,8
Gilingan padi	-	-	-	-
Babi	-	3	100,0	15,8
Ayam	3	1	25,0	21,1
Kolam	-	-	-	-
Parabola	2	3	60,0	26,3
televisi	4	13	76,5	89,5
CD player	2	8	80,0	52,6
Radio	1	3	75,0	21,1
Genset	2	1	33,3	15,8
Kulkas	-	2	100,0	10,5
Kompas	-	-	-	-
Barang Antik	5	1	16,7	31,6

Ketinting merupakan harta penting yang dimiliki oleh 42,1% namun hanya separuh diperoleh sejak tahun 2000. Di Tabel 5 dapat dilihat bahwa di Long Adiu kepemilikan mesin ketinting meningkat drastis sejak tahun 2000 sehingga menjadi 100% responden memiliki ketinting. Kepemilikan *chainsaw* juga meningkat sejak ada perusahaan IPPK dan mencapai 70% dari responden. Sebagian besar barang mewah seperti televisi, parabola, CD player dan radio diperoleh setelah tahun 2000, namun tingkat kepemilikan berkisar antara 20% (radio) hingga 60% (televisi).

Tabel 6: Kepemilikan harta 10 responden rumah tangga di Desa Long Adiu: jenis harta, waktu perolehannya dan persentase rumah tangga yang memiliki

Jenis kekayaan	Diperoleh sebelum tahun 2000	Diperoleh setelah tahun 2000	% aset yang diperoleh setelah tahun 2000	% rumah tangga yang punya
Sepeda Motor	-	-	-	-
Sepeda	-	-	-	-
Ketinting	1	9	90,0	100,0
<i>Chainsaw</i>	2	5	71,4	70,0
Gilingan padi	-	-	-	-
Babi	6	3	33,3	90,0
Ayam	6	1	14,3	70,0
Kolam	-	-	-	-
Parabola	-	4	100,0	40,0
televisi	1	5	83,3	60,0
CD player	1	4	80,0	50,0
Radio	-	2	100,0	20,0
Genset	-	-	-	-
Kulkas	-	-	-	-
Kompor	-	-	-	-
Barang Antik	5	-	-	50,0

Kalau kita membandingkan kepemilikan harta berdasarkan hasil wawancara di 14 desa dengan kepemilikan harta di kedua desa yang telah menerima *fee* nampak ada perbedaan. Secara umum kepemilikan harta benda di kedua desa lebih tinggi.

Kondisi Rumah

Seperti sudah dibahas dalam lokakarya di tingkat kabupaten (14 - 15 Oktober 2003) lantai dari tanah tidak dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan untuk masyarakat di Kabupaten Malinau, karena sama sekali tidak ada masyarakat yang membuat rumah berlantai tanah. Dari semua rumah tangga yang diwawancarai 95% punya lantai terbuat dari papan meranti (atau sejenis), 5% responden punya lantai terbuat dari bambu atau kulit kayu. Persentase hampir sama terdapat untuk jenis dinding: 96,1% dinding dari papan kayu meranti (atau sejenis) dan 3,9% dinding dari kulit kayu, bambu atau seng. Jenis atap yang paling umum digunakan adalah seng (93,4%). Sebagian kecil rumah tangga menggunakan jenis atap lain yang termasuk baik seperti genteng (2,6%) dan sirap (0,7%). Atap daun digunakan oleh 3,3% dari semua responden. Responden yang mempunyai rumah berlantai bambu atau kulit kayu, dinding dari kulit kayu, bambu atau seng dan atap daun hanya terdapat di dua desa, yaitu di Desa Halanga dan Long Pada. Sebagian besar rumah tangga yang diwawancarai tidak memiliki WC, yaitu 87,4%. Ada 9,3% rumah tangga yang punya WC di dalam rumah dan 3,3% punya WC di darat.

Jenis dinding dari kulit kayu atau bambu dan atap daun mungkin bisa menjadi indikator tentang rumah tangga miskin, sedangkan WC di dalam rumah bisa digunakan sebagai indikator untuk rumah tangga kaya.

Informasi yang dapat dibanggakan adalah bahwa ternyata 83% dari rumah tangga yang diwawancarai punya listrik di rumah. Mengingat bahwa banyak desa di Kabupaten Malinau sulit dijangkau persentase tinggi ini mungkin di luar dugaan.

Kesehatan

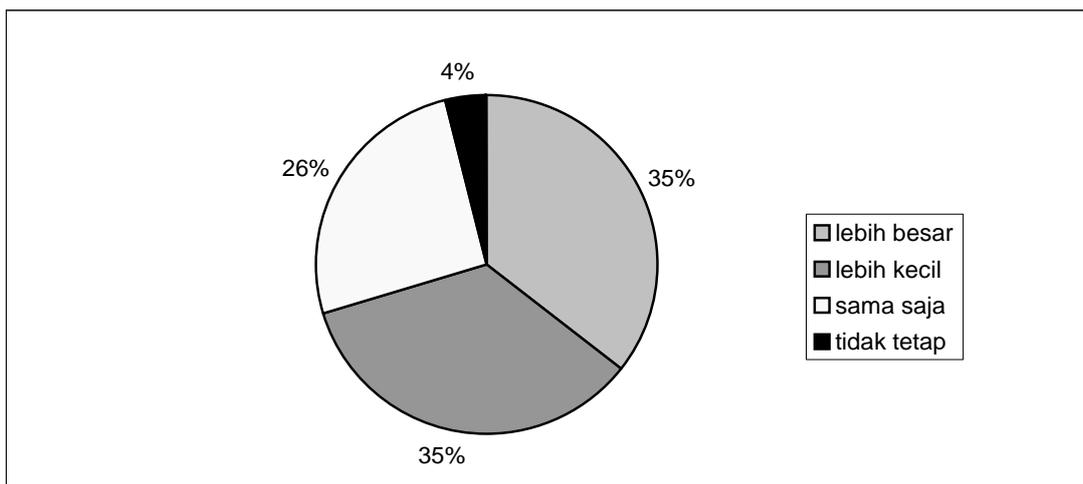
Dari ke-14 desa yang disurvei hanya 4 desa belum memiliki fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau puskesmas pembantu, yaitu Long Pada (Kec. Mentarang), Halanga (Kec. Malinau Selatan), Long Paliran (Kec. Pujungan) dan Long Payau (Kec. Kayan Hulu). Dalam survei terungkap bahwa di dalam 14 desa yang dikunjungi dalam tahun terakhir ada tujuh belas bayi yang meninggal pada saat lahir. Juga ada dua ibu yang meninggal pada saat melahirkan.

Perubahan Kondisi Masyarakat sejak Otonomi Daerah

Dalam survei ditanya persepsi masyarakat tentang perubahan kondisi kesejahteraan sejak terbentuk Kabupaten Malinau. Di tingkat rumah tangga ditanya perubahan dari segi pendapatan, pengeluaran dan kesejahteraan. Kemudian dalam kelompok diskusi dibahas pandangan masyarakat tentang akar permasalahan kemiskinan.

Di Gambar 4 terlihat bahwa persentase responden yang mengatakan pendapatan meningkat dan yang mengatakan pendapatan menurun sama-sama 35%.

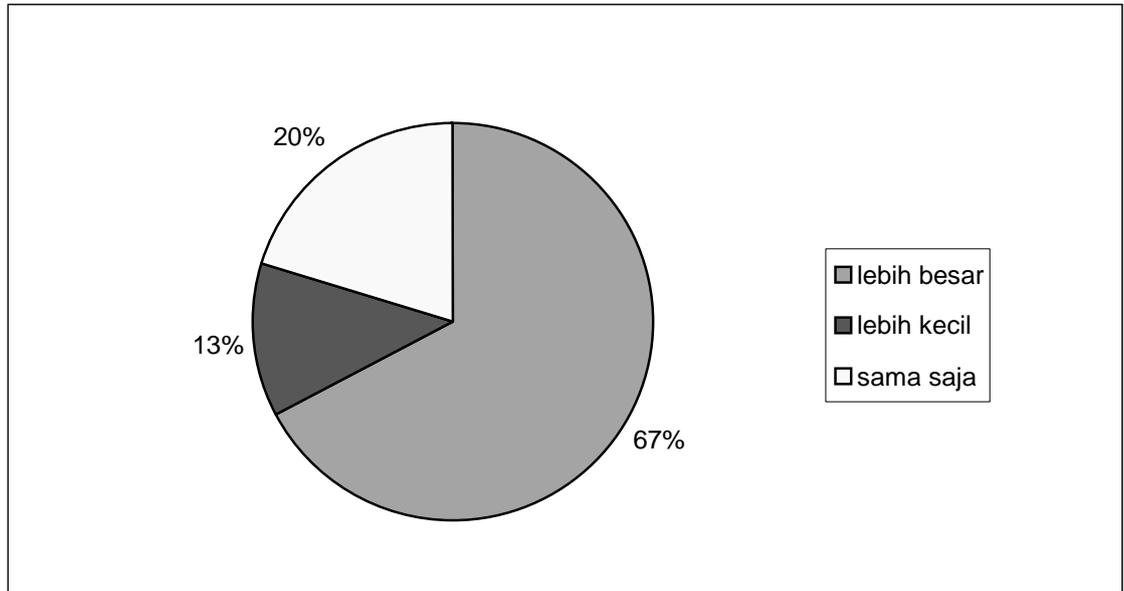
Gambar 4: Persepsi responden rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau terhadap perubahan pendapatannya yang terjadi dalam 5 tahun terakhir



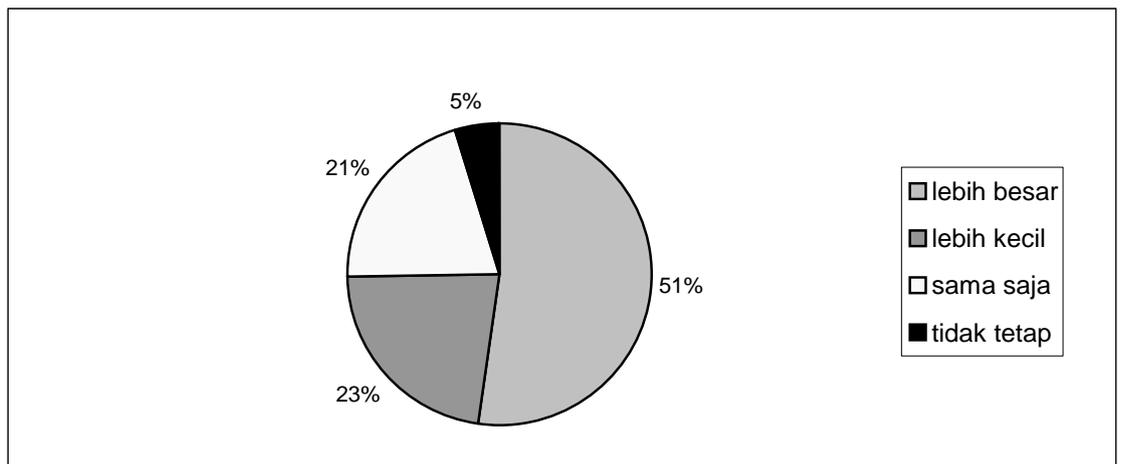
67% responden rumah tangga yang diwawancarai mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir pengeluaran rumah tangganya meningkat (lihat Gambar 5). Walaupun

demikian lebih dari 50% responden rumah tangga mengatakan bahwa kesejahteraan meningkat dalam 5 tahun terakhir! (lihat Gambar 6).

Gambar 5: Persepsi responden rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau terhadap perubahan pengeluarannya yang terjadi dalam 5 tahun terakhir



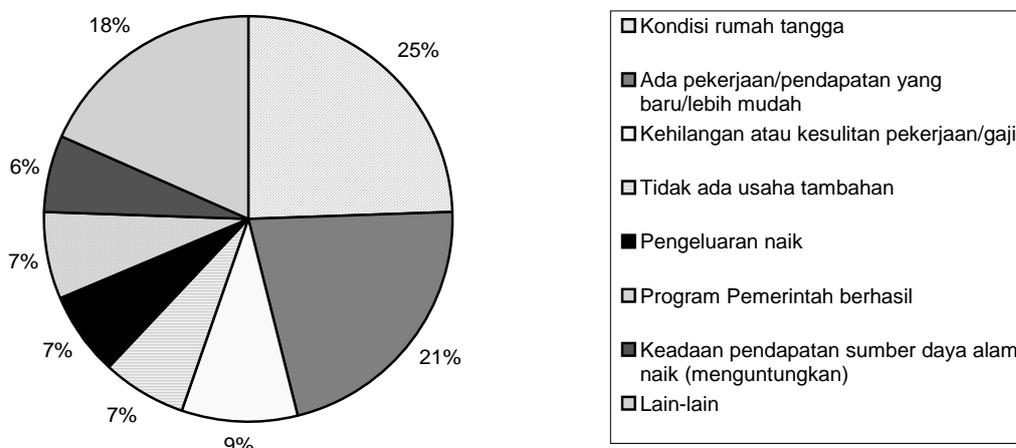
Gambar 6: Persepsi responden rumah tangga di 14 desa di Kabupaten Malinau terhadap perubahan kesejahteraan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir



Ketika ditanya alasan terjadi perubahan kondisi rumah tangga responden menyebut 15 alasan. Alasan paling dominan adalah karena kondisi rumah tangga itu sendiri (25%) dan karena mendapat pekerjaan baru atau lebih mudah memperoleh pendapatan (21%) (lihat Gambar 7). Kehilangan pekerjaan atau kesulitan untuk

memperoleh pendapatan (disebut oleh 9% responden), tidak ada usaha tambahan (7%) dan pengeluaran naik (7%) merupakan alasan yang menyebabkan kondisi rumah tangga menjadi lebih sulit, sedangkan keberhasilan program pemerintah daerah (7%) dan lebih mudah untuk memperoleh pendapatan dari SDA (6%) merupakan alasan kondisi rumah tangga semakin baik. Masih ada 8 alasan lain yang masing-masing disebut oleh kurang dari 5% responden rumah tangga.

Gambar 7: Pandangan responden rumah tangga tentang alasan mengapa kondisi mereka berubah



Akar Permasalahan Kondisi Masyarakat

Dalam kelompok diskusi kecil dibahas pandangan masyarakat terhadap sebab-sebab kondisi masyarakat belum mencapai kondisi yang diharapkan. Di semua kelompok pendidikan, kesehatan dan perumahan disebut sebagai permasalahan penting yang dihadapi oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup (lihat Tabel 7).

Tabel 7: Akar permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan taraf hidup menurut peserta diskusi kelompok di 14 desa di Kabupaten Malinau

	Semua kelompok diskusi	Kelompok Perempuan		Kelompok Masyarakat Umum		Kelompok Tokoh Masyarakat	
Pendidikan/SDM	17,8%	18,6%	(1)	20%	(1)	15,4%	(1)
Kesehatan	13%	13,6%	(2)	17,8%	(2)	9,2%	(3)
Perumahan	8,9%	10,2%	(3)	6,7%	(5)	9,2%	(3)
Modal	8,3%	6,8%	(5)	11,1%	(3)	10,8%	(2)
Harga hasil rendah	7,1%	5,1%	(8)	4,4%	(8)	10,8%	(2)
Akses sumber daya alam	7,1%	5,1%	(8)	6,7%	(5)	9,2%	(3)

Masalah lain yang banyak disebut berkaitan dengan pengembangan ekonomi rumah tangga, yaitu kekurangan modal, harga hasil hutan atau pertanian rendah dan kurang sumber daya alam.

Kesimpulan

Walaupun kadang-kadang kita mendengar keluhan dari masyarakat bahwa kondisi rumah tangga belum seperti diharapkan, informasi dari survei ini menunjukkan bahwa keadaan sebagian besar masyarakat relatif baik. Misalnya lebih dari 93% responden pakai atap seng dan lebih dari 95% menggunakan lantai dan dinding dari papan meranti atau sejenis. Selain itu 83% responden sudah dapat menikmati listrik. Kondisi ini juga disadari dan disyukuri oleh masyarakat yang terlihat dari pendapat 50% responden yang mengatakan bahwa kesejahteraan mereka meningkat sejak terbentuk kabupaten baru.

Namun jaminan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang perlu diperhatikan. Misalnya sebagian besar masyarakat Punan menggantungkan penghidupan pada usaha mencari gaharu di hutan, sedangkan populasi semakin berkurang. Sehingga kalau tidak ada usaha untuk meningkatkan populasi gaharu atau beralih ke usaha lain tidak menutup kemungkinan kesejahteraan masyarakat tersebut akan menurun.

Beberapa pengamatan tentang kondisi masyarakat selama survei:

- desa jauh dari kota: dekat SDA dan lahan pertanian, terjamin dari segi makanan, tapi usaha kadang-kadang sulit;
- desa dekat kota: Banyak usaha yang dapat dikembangkan, tapi lahan sulit dan jaminan makanan tergantung hasil usaha/uang tunai;
- desa Punan yang bergabung di desa lain mengalami kesulitan lahan.

Untuk masa depan: tidak jelas siapa lebih terjamin: dekat kota - banyak usaha tapi kadang-kadang penghasilan kecil. Dekat hutan - SDA berlimpah tapi tidak ada jaminan hak.

Desa Lepaga

Desa Lepaga



Foto: Pemukiman di Desa Lepaga

Profil Desa Lepaga

Jumlah rumah tangga: 19	Jumlah jiwa: 93
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 13	Jumlah KK: 22
Suku mayoritas: Punan	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Mogiono	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Taping Mamung	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: Puret	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 30 menit (taksi)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 30 menit (taksi)	Jumlah Pusban: -
	Jumlah Polindes: -

LEPAGA

1. Letak dan Lingkungan Desa

Lepaga adalah salah satu desa yang ada di *resettlement penduduk* (Respen) Lubak Manis, di Kecamatan Malinau Utara. Sejak tahun 2002 jalan darat dari Malinau Kota ke Lubak Manis dapat dilewati oleh taksi. Jarak dari Lubak Manis ke Malinau Seberang, ibukota Kecamatan Malinau Utara sekitar lima kilometer dan sekitar enam kilometer ke Malinau Kota. Pemukiman terdekat di sebelah hulu adalah Kaliamok (kurang dari satu kilometer) dan di sebelah hilir Kelapis (sekitar lima kilometer)

Lahan di sekitar Lubak Manis datar dan masih terpengaruh oleh pasang surut laut. Sebagian besar lahan merupakan rawa-rawa yang cukup subur dan cocok untuk sawah, namun tidak dapat ditanami dengan palawija.

2. Sejarah Desa

Masyarakat Lepaga tinggal di Respen Lubak Manis sejak tahun 1980. Menurut Kepala Adat, Desa Lepaga terbentuk secara resmi pada tahun 1945, ketika masyarakat Lepaga masih hidup di daerah Hulu Sungai Tubu. Selama tinggal di Hulu Sungai Tubu masyarakat Lepaga sempat dua kali ganti rumah panjang (*lamin*), sebelum pindah ke Lubak Manis. Pada saat Lepaga bersama empat desa lain pindah ke Lubak Manis disiapkan lahan seluas 2 km² untuk kelima desa.

Dalam 10 tahun terakhir bencana yang pernah dialami oleh masyarakat Lepaga adalah 'kelaparan' dalam arti kekurangan makanan dan penghasilan serta serangan tanaman oleh hama yang juga mengakibatkan kekurangan makanan³.

3. Penduduk

Masyarakat Desa Lepaga berasal dari Suku Punan. Di Respen Lubak Manis terdapat 5 desa masyarakat Punan dari Sungai Tubu, dan juga ada beberapa keluarga masyarakat Lundayeh. Menurut data dari sensus P4B (Mei 2003) jumlah penduduk Lepaga 93 jiwa, dan jumlah rumah tangga 19. Sejak pindah ke Respen Lubak Manis sebagian masyarakat Lepaga masih sering ke wilayah desa lama untuk beberapa waktu mencari hasil hutan atau *muvut* (mencari babi hutan, atau buah-buahan). Sekretaris Desa mengatakan ada sekitar 42 warga Lepaga yang meninggalkan desa ke daerah Sungai Tubu, dengan alasan lahan di sekitar Lepaga di Respen Lubak Manis tidak subur dan ada konflik lahan. Dalam kuesioner alasan yang dicantumkan adalah lahan tidak subur, namun faktor penting juga lahan di Respen Lubak Manis tidak cocok ditanami ubi kayu. Ubi kayu merupakan makanan penting bagi masyarakat Lepaga apabila kehabisan padi.

³ Tidak jelas apakah informasi ini menyangkut satu atau dua peristiwa.

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga yang ada di desa:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Kelompok Tani;
- Karang Taruna;
- Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Badan Perwakilan Desa terbentuk pada tahun 2003, namun selama ini belum pernah mengadakan konsultasi dengan masyarakat Lepaga.

4.1 Musyawarah

Sekretaris Desa berpendapat bahwa dalam 5 tahun terakhir mutu musyawarah desa meningkat. Dari segi frekuensi dan dampak keputusan musyawarah tidak ada perubahan.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Bantuan yang selama ini diterima berupa dana Bangdes yang diberikan setiap tahun serta tunjangan aparat desa dan lembaga adat (yang diberikan sekali per 6 bulan). Pada tahun 1999 ada proyek semenisasi jalan desa. Responden kurang mampu mengatakan bahwa Desa Lepaga dalam 5 tahun terakhir pernah menerima bantuan semenisasi jalan desa dan pengaspalan jalan umum, yang melewati Respen Lubak Manis. Dia merasa sangat puas dengan bantuan ini. Menurut Ketua BPD tidak ada pihak lain, seperti perusahaan, LSM atau organisasi keagamaan, yang pernah membantu warga Lepaga.

Sejak 1998 warga Lepaga pernah mengajukan permohonan untuk bantuan perumahan penduduk dan air bersih. Kedua usulan selama ini belum dijawab oleh pemerintah.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Frekuensi kunjungan pegawai pemerintah ke Lepaga kurang dari sekali sebulan. Staf Kecamatan biasanya datang ke desa untuk mengantar undangan, Staf Badan Pusat Statistik pernah datang untuk pendataan penduduk dan pernah ada kunjungan dari Dinas Perindagkop Kabupaten Malinau.

Menurut Ketua BPD dalam 5 tahun terakhir keterjangkauan pemerintah dari segi jarak semakin baik. Untuk aspek lain dari hubungan dengan pemerintah, seperti kepedulian, pelayanan, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dianggap tidak ada perubahan. Dalam wawancara rumah tangga, pendapat tentang frekuensi bertemu dengan pemerintah bervariasi: separuh (lima dari sepuluh) menilai frekuensi masih sama, tiga orang menilai meningkat dan

Desa Lepaga

dua menilai menurun. Karena letak Lepaga dekat ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten tempat bertemu bisa di desa sendiri (menurut tujuh orang), di desa lain (6 orang) atau di Malinau Kota (delapan orang).

Tujuan bertemu terutama untuk izin (disebut oleh 5 orang) dan untuk mengikuti sosialisasi (5 orang). Selain itu tiga responden menyebut pengajuan usulan sebagai tujuan bertemu pemerintah. Ketika ditanya tentang perubahan hubungan tokoh masyarakat dengan pemerintah dalam 5 tahun terakhir semua responden menjawab bahwa hubungan itu masih sama. Tidak disebut apakah dianggap hubungan itu sudah baik atau dianggap masih kurang baik. Mereka juga berpendapat bahwa perhatian pemerintah untuk desa dalam 5 tahun terakhir tidak berubah.

5.3 Sumber dan alat informasi

Informasi tentang program pemerintah diperoleh melalui kunjungan pegawai pemerintah dan pengumuman. Alat untuk memperoleh informasi yang disebut oleh Sekretaris Desa adalah televisi dan radio. Melalui media ini masyarakat bisa memperoleh informasi dari tingkat pemerintah lain seperti propinsi dan nasional tapi tidak tentang program pemerintah kabupaten.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Menurut Kepala Adat, sekarang tidak dilaksanakan upacara adat dan tidak ada dari generasi muda yang berminat untuk belajar tentang tradisi.

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Tingkat gotong royong dalam 5 tahun terakhir masih sama dan biasanya kalau ada gotong royong lebih dari separuh warga aktif ikut. Bentuk gotong royong dalam tahun terakhir adalah gotong royong kerja ladang, kerja di sekitar desa, bantu kalau ada orang yang meninggal atau ada acara pernikahan. Kepala Adat katakan bahwa kalau masyarakat mengalami kekurangan pangan mereka dibantu oleh keluarga yang ada di desa lain. Responden kurang mampu juga menilai gotong royong dalam 5 tahun terakhir tetap sama. Apabila perlu bantuan, dia bisa dapat dari keluarga tapi selama ini tidak dibantu oleh orang lain.

6.3 Konflik

Menurut Kepala Adat, konflik yang terjadi berkaitan dengan lahan dan masalah keluarga. Konflik lahan sering terjadi, namun cenderung menurun karena mulai ada kejelasan hak atas lahan ("saling ada pengakuan atas hak lahan"). Konflik keluarga tidak sering terjadi dan frekuensi sejak dulu sama. Menurut orang kurang mampu konflik lahan terjadi karena "saling mengaku satu dengan yang lain" (sama-sama mengaku lahan sebagai miliknya). Permasalahan keluarga yang disebut adalah kenakalan remaja. Menurut responden kurang mampu dalam 5 tahun terakhir jumlah konflik cenderung meningkat.

Desa Lepaga

Untuk menangani konflik di dalam desa digunakan hukum adat. Kalau konflik melibatkan pihak luar sebagai langkah pertama digunakan hukum adat. Kalau tidak dapat diselesaikan oleh lembaga adat akan dilimpahkan ke hukum negara. Cara penegakan keputusan lembaga adat tidak begitu jelas. Kepala Adat mengatakan "diharuskan harus membayar", tanpa penjelasan cara apa yang dapat digunakan oleh lembaga adat untuk mengharuskan masyarakat turut keputusan lembaga adat. Selama ini, menurut Kepala Adat, lebih dari separuh kasus dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

6.4 Situasi umum orang miskin

Responden kurang mampu menyatakan kondisi hidupnya dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Ketika ditanya tentang masalah yang dihadapinya dijawab bahwa "tidak ada masalah, hanya seperti masyarakat biasa saja." Kiranya jawaban ini menggambarkan bahwa kondisi hidup masyarakat Desa Lepaga sama: lahan di Respen Lubak Manis terbatas dan hanya cocok untuk bersawah. Usaha utama adalah mencari gaharu di wilayah desa lama dan hasilnya tidak tentu. Sedangkan tidak ada banyak usaha alternatif, kecuali sebagai buruh harian.

Responden kurang mampu menilai untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan makanan dia mampu. Ketika ditanya apakah mampu mendapatkan uang dijawab "mampu dan tidak", yang menggambarkan penghasilan uang tunai tidak tentu. Bantuan yang dibutuhkan, menurutnya, adalah perumahan, pendidikan dan ekonomi. Bantuan di bidang ekonomi tidak dijelaskan lebih rinci, tetapi kiranya diharapkan ada usaha tetap. Dia mengatakan selama ini pernah dibantu oleh keluarganya namun tidak dibantu oleh tetangga. Ibu Bidan menjelaskan bahwa ketika orang tidak punya biaya untuk pengobatan mereka hanya mengharap Asuransi Kesehatan (Askes) yang diberikan pada aparat desa atau kartu sehat bagi orang kurang mampu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut berapa banyak orang dapat Askes dan kartu sehat. Sedangkan dalam diskusi kelompok dikatakan "...kalau sakit berat hanya pasrah", selain mengharap kartu sehat. Dalam diskusi kelompok masyarakat umum dikatakan tidak punya kartu sehat.

6.5 Hiburan

Sumber hiburan yang disebut oleh Kepala Adat adalah:

- televisi;
- radio.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPD jenis tata guna lahan yang ada di Desa Lepaga adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;

Desa Lepaga

- kebun buah-buahan;
- kebun kokoa;
- kebun kopi;
- hutan.

Tipe tata guna lahan yang dominan di sekitar pemukiman Lepaga di Respen Lubak Manis adalah sawah. Luas sawah oleh Sekretaris Desa diperkirakan lebih dari separuh luas wilayah desa. Sejak tahun 1998 luas areal sawah tetap. Luas ladang, kebun buah-buahan dan kebun sayur juga tidak berubah. Berdasarkan wawancara rumah tangga diketahui bahwa luasan ladang, kebun buah-buahan dan kebun sayur sangat terbatas. Kesepuluh responden rumah tangga semua mengatakan tidak punya lahan kebun apa saja. Sekretaris Desa mengatakan ada kebun kokoa dan kopi tetapi luasan sejak tahun 1998 semakin berkurang.

Menurut Ketua BPD jenis hutan dan lahan bera yang ada di Desa Lepaga adalah:

- hutan sekunder tua, > 30 tahun (Bhs. Punan *balah tuong kiam*);
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun (Bhs. Punan *balah tuong kiam*);
- belukar, 2 -5 tahun (Bs. Punan *balah uyung*).

Dalam wawancara tidak disebut berapa luas dari masing-masing jenis hutan terletak di sekitar Respen Lubak Manis dan berapa luas berada di wilayah desa lama. Sekretaris Desa menyebutkan ada hutan lindung. Luas hutan sekunder tua dan belukar semakin berkurang. Menurut Ketua BPD tidak terjadi perubahan terhadap kawasan hutan sebelum tahun 1990.

7.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Areal hutan terdapat di wilayah Desa Lepaga lama, yaitu di daerah Sungai Tubu. Menurut Sekretaris Desa ada hutan yang dilindungi untuk pemanfaatan 'tradisional' seperti mencari gaharu dan rotan atau berburu⁴. Apabila ada orang melanggar aturan perlindungan ini dikenakan denda berupa barang atau uang dan "tidak dibenarkan lagi (untuk melakukan kegiatannya)".

Selama ini warga Lepaga maupun pihak luar belum pernah mengajukan permohonan izin IPPK untuk wilayah Desa Lepaga, karena wilayah desa lama sulit dijangkau dan masih ada areal hutan yang lebih dekat sehingga para pengusaha belum tertarik untuk mengeksploitasi hutan di daerah Lepaga.

7.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Ketika ditanya tentang akses dan kepemilikan lahan dijawab bahwa semua rumah tangga punya akses dan memiliki lahan. Namun konflik yang sering terjadi berkaitan dengan lahan, terutama mengenai lahan sawah di sekitar Lubak Manis. Lahan yang ditinggalkan di wilayah desa lama sangat luas, hanya terletak jauh dari lokasi Lubak Manis. Menurut Sekretaris Desa selama ini belum terjadi praktek jual-beli lahan.

7.4 Perladangan

Warga Desa Lepaga yang ada di Respen Lubak Manis hanya bisa buat sawah karena kondisi lahan rawa-rawa tidak memungkinkan membuat ladang. Responden yang

⁴ Sekretaris Desa tidak tahu persis berapa luas hutan yang dilindungi.

Desa Lepaga

diwawancarai (sepuluh orang) semua membuat sawah. Tidak ada informasi berapa rumah tangga membuat ladang di wilayah desa lama atau ikut dengan warga desa Punan lain membuat ladang di sekitar Kuala Sungai Tubu. Sekretaris Desa mengatakan ada 42 orang yang meninggalkan desa sementara karena mencari lahan subur. Kesepuluh responden rumah tangga semua memiliki lahan sawah yang digunakan pada tahun 2003. Jarak dari tempat tinggal hanya sekitar 30 menit dan umur belukar di bawah 10 tahun.

7.5 Pendapatan uang

Tujuh rumah tangga menyebut gaharu sebagai mata pencaharian utama dan tiga rumah tangga sebut upah sebagai buruh lepas. Sebagai usaha lain delapan responden menyebut ladang, tapi hanya mengharapkan hasil untuk kebutuhan rumah tangga. Sembilan responden mengatakan hasil sawah tidak cukup untuk kebutuhan beras selama 1 tahun. Tiga responden menyebut tunjangan sebagai aparat desa atau adat sebagai sumber pendapatan tambahan dan 1 orang menyebutkan upah buruh.

Hanya satu responden yang mempunyai sumber pendapatan baru dalam 5 tahun terakhir, yaitu tunjangan sebagai aparat desa. Sembilan responden lain mengatakan tidak punya usaha baru sejak tahun 1998.

Ketika ditanya pentingnya hasil hutan sebagai sumber uang hanya disebut gaharu. Tidak disebut hasil lain dan mereka juga tidak membuat kerajinan rotan sebagai sumber penghasilan.

7.6 Kondisi rumah penduduk

Semua rumah punya dinding dan lantai dari kayu meranti dan sambungan ke jaringan PLN. Sembilan responden punya atap rumah dari seng dan satu responden punya atap genteng. Rumah-rumah di Lepaga tidak punya WC dan masyarakat memanfaatkan sungai sebagai kakus.

7.7 Infrastruktur ekonomi

Sejak beberapa tahun jalan dari Lubak Manis ke Malinau Kota sudah dapat dilalui taksi darat sehingga transportasi lebih lancar dan biayanya relatif kecil (Rp 2.000 - Rp 3.000 pulang pergi ke Malinau Kota). Tidak ada prasarana ekonomi seperti pasar atau lembaga keuangan (bank atau *credit union*) di Lubak Manis, namun karena kedekatan dengan Malinau Kota sebenarnya masyarakat Lepaga dapat menggunakan infrastruktur yang ada di sana.

7.8 Keterjangkauan energi

Sumber energi utama untuk masak adalah kayu bakar dan minyak tanah. Karena minyak tanah harus dibeli, dan harga semakin naik dikatakan oleh Sekretaris Desa bahwa semakin sulit dijangkau oleh warga Lepaga. Sedangkan kayu bakar dianggap masih terjangkau.

Masyarakat Lepaga baru menggunakan sambungan ke jaringan PLN sebagai sumber listrik. Namun karena masyarakat Lepaga tidak punya penghasilan tetap Sekretaris Desa mengatakan listrik semakin sulit dijangkau.

8. Pendidikan

8.1 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di Respen Lubak Manis hanya terdapat Sekolah Dasar. Semua sekolah lain, mulai dari TK, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi, ada di Malinau Kota. Dalam 5 tahun terakhir jumlah sekolah meningkat dan jumlah tenaga guru bertambah. Kondisi sekolah dan alat dan buku masih sama. Kepala Sekolah mengatakan gaji tenaga guru tidak tetap. Jumlah murid baru untuk kelas 1 SD adalah 22 orang.

8.2 Mutu pendidikan

Kepala Sekolah menilai mutu pendidikan dalam 5 tahun terakhir meningkat, dari segi tingkat pendidikan guru, keaktifan guru, persentase kelulusan dan jumlah orang yang bisa baca dan tulis. Pernah diadakan pelatihan oleh pemerintah untuk orang dewasa. Selama ini ada sedikit murid yang meninggalkan sekolah untuk sementara waktu, karena ikut ke ladang. Sedangkan tidak ada murid yang putus sekolah. Persentase kelulusan untuk ujian yang lalu adalah 100%.

9. Kesehatan

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di lokasi Lubak Manis ada Puskesmas Pembantu dan Pos bersalin desa (Polindes), yang dibangun dan dijalankan oleh pemerintah. Selain itu ada tenaga dukun dan kader Posyandu. Untuk mencapai Puskesmas di Malinau Kota perlu sekitar 30 menit naik taksi darat dengan biaya Rp 2.000 - Rp 3.000 pergi pulang. Dalam diskusi kelompok kecil seluruh lapisan masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjangkau biaya pengobatan. Sebagian warga menggunakan kartu sehat supaya ada keringanan biaya berobat, namun tidak semua rumah tangga dapat kartu sehat.

9.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih warga Lepaga dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Lepaga

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Perubahan Mutu
Sungai	Bisa dijangkau oleh separuh masyarakat	Tidak berubah selama ini	Tidak berubah selama ini
Hujan	Bisa dijangkau oleh separuh masyarakat	Tidak berubah selama ini	Tidak berubah selama ini
Sumur timba	Bisa dijangkau oleh separuh masyarakat	Tidak berubah selama ini	Tidak berubah selama ini

Desa Lepaga

Masyarakat rata-rata memiliki tengki atau drum untuk menyimpan air. Alat simpan air umum tidak ada.

9.3 Kebersihan lingkungan

Karena Lepaga berada di daerah rawa-rawa mudah muncul permasalahan drainase dan genangan air. Di sekitar pemukiman terlihat cukup banyak genangan air dan populasi nyamuk berkembang-biak dengan cepat.

9.4 Kondisi kesehatan masyarakat

Dalam 12 bulan terakhir ada dua bayi lahir, namun dua-duanya meninggal pada saat lahir. Pada Tabel 9 dapat dilihat jumlah anak di bawah usia 10 tahun yang meninggal dalam tahun terakhir dan sebabnya. Berat rata-rata bayi pada saat baru lahir diperkirakan 2,5 kg. Dalam tahun terakhir tidak ada ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Usia ibu pada saat kehamilan pertama sekitar 15 tahun.

Tabel 9: Jumlah dan sebab anak-anak berusia di bawah 10 tahun meninggal dalam 12 bulan terakhir di Desa Lepaga

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 - 5 tahun	Tidak ada	-
6 - 10 tahun	Tidak ada	-

Dalam tahun terakhir ada empat orang yang meninggal. Penyakit penyebab kematian utama adalah TBC. Diperkirakan umur rata-rata orang yang meninggal karena penyakit atau tua sekitar 65 tahun.

Desa Mabung

Desa Mabung



Foto: Sebuah rumah di Desa Mabung

Profil Desa Mabung

Jumlah rumah tangga: 22	Jumlah jiwa: 141
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 13	Jumlah KK: 27
Suku mayoritas: Punan	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Apon Tangga	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Irang Tangga	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: Dewi	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 5 menit (taksi/ojek)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 5 menit (taksi/ojek)	Jumlah Pusban: 1
	Jumlah Polindes: 1

MABUNG

1. Letak dan Lingkungan Desa

Mabung merupakan salah satu dari sepuluh desa yang tergabung dalam Resettlement Penduduk Sembuak. Desa Mabung berada di Kecamatan Malinau Utara. Ibukota Kecamatan Malinau Utara, Malinau Seberang dapat dijangkau dengan jalan kaki sekitar 20 menit. Dari Mabung ke Malinau Kota (ibukota kabupaten) perlu sekitar 20 menit jalan kaki. Respen Sembuak terletak antara Malinau Seberang, Malinau Kota dan Tajan.

Setelah terbentuk Kabupaten Malinau (tahun 1999) dan selesainya jembatan Sungai Sesayap yang menghubungkan Malinau Kota dengan Respen Sembuak (tahun 2002) perkembangan di Respen Sembuak semakin cepat. Pada saat ini sedang dibangun gedung rumah sakit umum yang terletak berdampingan dengan Respen Sembuak. Lahan di sekitar Respen Sembuak sebagian besar datar dan relatif subur karena merupakan tanah aluvial (endapan sungai).

2. Sejarah Desa

Masyarakat Desa Mabung tinggal di Respen Sembuak sejak tahun 1972. Menurut Kepala Adat, Desa Mabung terbentuk secara resmi 58 tahun yang lalu (tahun 1945). Pada saat itu masyarakat Desa Mabung tinggal di daerah Sungai Tubu.

Dalam 10 tahun terakhir masyarakat Mabung mengalami bencana banjir dan serangan hama. Akibat banjir ada beberapa perahu masyarakat hanyut dan tanaman padi dan sayur rusak. Serangan hama mengakibatkan masyarakat tidak dapat panen padi.

3. Penduduk

Mayoritas masyarakat Desa Mabung berasal dari suku Punan.

3.1 Perpindahan penduduk

Dalam 5 tahun terakhir ada delapan warga Mabung yang meninggalkan desa untuk sementara waktu karena mencari pekerjaan, terutama mencari gaharu. Menurut Kepala Desa, selama 5 tahun terakhir tidak ada warga yang pindah dari Desa Mabung.

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga yang ada di Desa Mabung:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;

Desa Mabung

- Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- Lembaga Musyawarah Desa (LMD);
- Kelompok Tani;
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Badan Perwakilan Desa terbentuk pada tahun 2003, tetapi belum aktif. Selama ini belum pernah ada konsultasi BPD dengan masyarakat dan belum pernah membuat keputusan.

4.1 Musyawarah

Ketua BPD menilai bahwa mutu musyawarah desa dalam 5 tahun terakhir meningkat. Tetapi dampak keputusan musyawarah dan frekuensi musyawarah tidak mengalami perubahan.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Bantuan yang selama ini diterima, menurut Kepala Desa, berkaitan dengan pemerintahan desa; dana bangdes, bantuan PKK, tunjangan aparat desa dan lembaga adat dan biaya operasional desa. Semua bantuan ini diberikan secara rutin setiap tahun. Responden kurang mampu menyebut proyek pengaspalan jalan Respen Sembuak yang menurutnya sangat memuaskan. Ketua BPD mengatakan selama ini tidak ada bantuan dari lembaga lain (perusahaan, LSM atau lembaga keagamaan).

Dalam 5 tahun terakhir diajukan permohonan bantuan perumahan. Satu kali permohonan disampaikan melalui Camat dan 1 kali diminta bantuan atap seng melalui Bagian Sosial. Kedua permohonan selama ini belum diberikan jawaban.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Frekuensi kunjungan instansi pemerintah ke Desa Mabung kurang dari sekali sebulan. Kepala Desa menyebut tim penggabungan desa dari Pemerintah Kabupaten sebagai lembaga yang pernah berkunjung ke desa⁵.

Dalam 5 tahun terakhir, sejak pemekaran Kabupaten Malinau, keterjangkauan pemerintah dari sisi jarak semakin baik. Ketua BPD menilai bahwa keterbukaan informasi semakin baik. Pelayanan pemerintah, tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dinilainya masih sama.

Dalam wawancara rumah tangga separuh jumlah responden (lima dari sepuluh) mengatakan frekuensi bertemu dengan pegawai pemerintah meningkat dalam 5 tahun terakhir. Letak Respen Sembuak yang dekat dengan ibukota kecamatan dan kabupaten memungkinkan masyarakat Mabung bertemu di desa sendiri (disebut enam dari sepuluh responden), di Malinau Kota (disebut sembilan dari sepuluh responden) dan di ibukota kecamatan (disebut tiga dari sepuluh responden). Walaupun lima responden (dari sepuluh) menilai hubungan tokoh masyarakat dengan pemerintah semakin baik dan

⁵ Karena wawancara ini dilaksanakan sekitar 2 minggu setelah kunjungan ini.

Desa Mabung

empat responden (dari sepuluh) menilai sama, delapan responden mengatakan perhatian pemerintah untuk desa tidak berubah dalam 5 tahun terakhir.

5.3 Sumber dan alat informasi

Ketua BPD mengatakan bahwa informasi tentang program pemerintah diperoleh dari kunjungan pemerintah, pengumuman dan undangan. Sejak Agustus 2003 telepon genggam sudah dapat digunakan di Respen Sembuak, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. (Jaringan telepon biasa belum diperluas sampai ke Respen Sembuak) Kepala Desa menyebut televisi dan radio sebagai sumber informasi.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Satu-satunya upacara adat yang masih dilaksanakan adalah perkawinan secara adat. Pelaksanaan sekarang lebih singkat daripada dulu. Menurut Kepala Adat dari segi tujuan, gotong royong dan bahan-bahan masih tetap sama. Tidak ada orang dari generasi muda yang berminat untuk belajar tentang tradisi.

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Semangat gotong royong masyarakat Mabung dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat. Bentuk gotong royong yang dilaksanakan dalam 12 bulan terakhir adalah gotong royong kerja ladang, gotong royong di dalam desa serta membantu sesama masyarakat pada saat acara perkawinan atau kematian. Menurut responden kurang mampu tingkat kegotongroyongan dalam 5 tahun terakhir tidak berubah.

Kepala Adat mengatakan bahwa kalau masyarakat mengalami kekurangan pangan mereka dibantu oleh keluarga yang ada di desa lain. Sedangkan responden kurang mampu mengatakan selama ini tidak dapat bantuan dari keluarga atau orang lain.

6.3 Konflik

Menurut Kepala Adat satu-satunya konflik yang dialami masyarakat Desa Mabung adalah sengketa lahan. Konflik lahan sering terjadi dan cenderung semakin meningkat. Kepala Adat mengatakan "sering ada pengakuan atas hak yang sama." Responden kurang mampu mengatakan tidak ada konflik di Desa Mabung.

Untuk menyelesaikan konflik, baik dalam desa maupun dengan pihak luar, ditempuh jalur hukum adat dulu. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan hukum adat, maka dialihkan pada hukum negara. Demikian juga pendekatan kalau masyarakat tidak mengikuti keputusan lembaga adat, masalah akan dilimpahkan ke pihak kepolisian. Kepala Adat mengatakan selama ini lebih dari separuh kasus dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

6.4 Situasi umum orang miskin

Responden kurang mampu menilai bahwa kondisi kehidupan rumah tangganya dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Ketika ditanya untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi, dia tidak bisa memberikan gambaran tentang kekurangan atau masalah apa yang dihadapinya. Menurutnya dia masih sanggup untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan mencari makanan dan uang tunai, namun tidak mampu untuk mencari biaya pendidikan.

Responden kurang mampu selama ini tidak pernah mendapat bantuan dari keluarga maupun pihak lain. Ketika ditanya bantuan seperti apa yang diperlukan dari pihak luar ia menjawab "tidak ada."

6.5 Hiburan

Sumber hiburan yang disebut oleh Kepala Adat adalah:

- *netuyah*, dongeng zaman dulu;
- tarian daerah diiringi kecapi dan gong pada saat acara pernikahan.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPD jenis tata guna lahan yang ada di Desa Mabung adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun karet;
- kebun buah-buahan;
- kebun kokoa;
- kebun kopi;
- hutan.

Tipe tata guna lahan yang paling luas di wilayah Desa Mabung, menurut Ketua BPD, adalah areal ladang. Areal ladang meliputi lebih dari setengah wilayah desa. Sejak tahun 1998 luas masing-masing tipe tata guna lahan tetap, kecuali kebun kokoa yang berkurang luasnya karena diubah menjadi kebun lain yang bertambah luasnya. Kebun karet, milik masyarakat Mabung, terletak di luar wilayah Desa Mabung.

Menurut Ketua BPD jenis hutan dan lahan bera yang ada di Desa Mabung adalah:

- hutan rimba (Bhs. Punan *tua'an*);
- hutan sekunder tua, > 30 tahun (Bhs. Punan *balah tuan*);
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun (Bhs. Punan *balah tuan*);
- belukar tua, 5 - 10 tahun (Bhs. Punan *balah*);
- belukar, 2 -5 tahun (Bhs. Punan *balah uyung*);
- hutan rawa (Bhs. Punan *tanoh tabau*);

Desa Mabung

- hutan kerangas (Bhs. Punan *tanoh udu*).

Di wilayah Desa Mabung luasan semua jenis hutan dan bera tidak berubah sejak 1999. Menurut Ketua BPD hutan di wilayah Desa Mabung tidak mengalami perubahan sebelum tahun 1990.

7.2 *Pengelolaan hutan dan IPPK*

Selama ini belum pernah diajukan permohonan izin IPPK untuk hutan di wilayah Desa Mabung, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak luar. Hutan di wilayah desa lama hanya boleh digunakan secara tradisional, seperti mengambil rotan, gaharu atau damar untuk kebutuhan keluarga dalam desa sendiri. Apabila ada orang dari luar yang melanggar aturan ini, akan dikenakan denda berupa uang atau barang dan diberi peringatan. Apabila tertangkap lagi akan diberikan denda yang lebih berat.

7.3 *Keterjangkauan terhadap lahan*

Menurut Kepala Desa semua rumah tangga punya akses dan memiliki lahan. Namun menurut Kepala Adat konflik yang sering terjadi berkaitan dengan lahan. Perwakilan masyarakat dari sepuluh desa di Respen Sembuak sudah beberapa kali berusaha untuk memperoleh kejelasan tentang status lahan di sekitar pemukiman, karena mulai diklaim kembali oleh pemilik dulu (sebelum dijadikan daerah *resettlement* penduduk). Selama ini belum terjadi praktek jual-beli lahan.

7.4 *Perladangan*

Kondisi di sekitar Respen Sembuak memungkinkan masyarakat Mabung membuat ladang dan sawah. Pada tahun 2003 dari sepuluh responden rumah tangga ada dua responden yang tidak membuat ladang atau sawah. Lima rumah tangga membuat sawah, satu rumah tangga buat sawah dan ladang dan dua rumah tangga membuat ladang. Dari sepuluh responden ada dua yang pinjam lahan dan dua rumah tangga membuka rimba. Umur belukar yang digarap dari 50% responden masih di bawah 10 tahun. Jarak ke ladang atau sawah sangat bervariasi: dari 15 menit jalan kaki (disebut oleh tiga responden), 45 menit jalan kaki (dua responden), 1 jam naik ketinting (1 responden) sampai 3 jam naik ketinting (satu responden).

Hasil ladang dan sawah tidak mencukupi kebutuhan beras untuk 1 tahun. Dari delapan rumah tangga yang membuat ladang persediaan beras hanya cukup untuk kebutuhan 6 bulan (empat responden) atau kurang. Untuk menutupi kekurangan beras masyarakat mengharapkan 'beras miskin' dan juga membeli di warung.

7.5 *Pendapatan uang*

Usaha utama yang disebut oleh masyarakat Mabung beragam: tunjangan aparat desa (disebut oleh satu responden), menjual sayur (tiga responden), honor guru (satu responden), mencari gaharu (dua responden), buruh (satu responden), tukang bangunan (satu responden), ladang (satu responden). Sedangkan usaha lain relatif terbatas: buruh harian (empat responden), menjual daging babi hutan (dua responden), tunjangan desa (satu responden), gaji perusahaan (satu responden), mencari rotan segha (satu responden).

Desa Mabung

Dari sepuluh responden delapan menjawab bahwa tidak ada sumber pendapatan baru dalam 5 tahun terakhir. Sumber pendapatan baru sejak tahun 1998 adalah mencari rotan segar (satu responden) dan honor sebagai guru (satu responden).

Enam dari sepuluh responden rumah tangga mengatakan tidak punya kebun (sayur, rotan, buah, kakao atau kopi). Ada satu responden punya kebun buah dengan jumlah pohon 100 pokok. Ada satu responden yang punya kebun sayur dan ada dua responden yang punya kebun sayur dan buah.

Dari jawaban responden rumah tangga kelihatan masyarakat Mabung kurang tergantung pada hasil hutan: satu rumah tangga mencari rotan dan gaharu dan menjual anjat, satu rumah tangga mencari gaharu dan berburu dan sewaktu-waktu menjual dendeng, dan satu rumah tangga menjual babi hutan dan satu mencari buah. Berarti hanya empat dari sepuluh rumah tangga mendapatkan penghasilan dari sumber daya hutan.

7.6 Kondisi rumah penduduk

Semua responden rumah tangga (sepuluh orang) punya rumah dengan atap seng dan lantai dan dinding dari papan meranti. Separuh rumah tangga tidak punya WC, dan menggunakan kakus di sungai. Belum semua rumah tangga dapat menjangkau sambungan PLN. Tiga rumah tangga tidak punya listrik dan dua rumah tangga lain menyambung ke genset orang lain.

7.7 Infrastruktur ekonomi

Walaupun di Respen Sembuak tidak ada pasar atau lembaga keuangan, masyarakat bisa menjangkau infrastruktur yang ada di Malinau Kota. Ada tiga orang berjualan sayur walaupun tidak ada pasar di Respen. Tidak ada informasi sejauh mana masyarakat Mabung menggunakan lembaga keuangan di Malinau Kota dan menabung uang di bank atau di *credit union*.

7.8 Keterjangkauan energi

Sumber energi utama untuk masak adalah kayu bakar dan minyak tanah. Menurut Kepala Desa kayu bakar semakin sulit dijangkau oleh masyarakat.

Sebagian masyarakat Mabung menyambung ke jaringan PLN sebagai sumber listrik. Namun karena masyarakat Mabung tidak punya penghasilan tetap, Kepala Desa mengatakan listrik semakin sulit dijangkau.

8. Pendidikan

8.1 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di Respen Sembuak hanya terdapat Sekolah Dasar. Taman Kanak-kanak ada di Malinau Kota (sekitar 2 kilometer). SLTP ada di Malinau Seberang, sekitar 1 kilometer dari pemukiman Desa Mabung. SLTA dan perguruan tinggi di Malinau Kota, dengan jarak sekitar 2,5 kilometer dan 5 kilometer. Tahun 2003 ada 52 murid baru di kelas 1 SD.

Desa Mabung

Dalam 5 tahun terakhir jumlah sekolah di Respen Sembuak tidak berubah, sedangkan kondisi gedung menurun, karena tidak ada perawatan. Jumlah tenaga guru dan gaji mereka masih tetap. Disinggung bahwa “tunjangan agak tersendat.”

8.2 Mutu pendidikan

Wakil Kepala Sekolah mengatakan bahwa tingkat pendidikan tenaga guru dalam 5 tahun terakhir berkurang. Keaktifan dalam 5 tahun terakhir juga menurun. Persentase kelulusan murid semakin meningkat dan pada ujian tahun 2003 mencapai 100%. Jumlah orang yang bisa membaca dan menulis tidak mengalami perubahan sejak tahun 1998.

Wakil Kepala Sekolah menceritakan bahwa ada murid yang putus sekolah karena menjual koran (di Malinau Kota). Selain itu ada sedikit murid yang meninggalkan sekolah untuk sementara waktu karena ikut ke ladang.

9. Kesehatan

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Respen Sembuak terdapat Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes. Semua fasilitas ini dibangun dan dijalankan oleh pemerintah.

Menurut Kepala Adat ada satu orang di Desa Mabung yang punya keahlian pengobatan tradisional. Jumlah ahli dalam 5 tahun terakhir tidak berubah. Pengobatan tradisional dilaksanakan sekitar sekali seminggu dengan biaya sekitar Rp 20.000 atau bisa juga berupa barang.

Dalam 5 tahun terakhir jumlah fasilitas kesehatan meningkat dan kondisi fasilitas dinilai tetap. Namun jumlah staf berkurang, ketersediaan alat dan obat tidak tetap dan gaji tenaga medis menurun.

Fasilitas kesehatan terdekat dapat dijangkau dalam waktu 15 menit dengan jalan kaki. Apabila masyarakat tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan mereka pinjam uang atau minta bantuan keluarga. Cara lain adalah menggunakan kartu sehat, bagi yang punya atau asuransi kesehatan (bagi aparat desa).

9.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih warga Mabung dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada Tabel 10.

Desa Mabung

Tabel 10: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Mabung

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Mengapa	Perubahan Mutu
Sungai	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	Sebagian karena kurang kesadaran penting air bersih, sebagian karena kurang mampu	Tidak berubah selama ini
Hujan	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini		Tidak berubah selama ini
Sumur timba	Bisa dijangkau oleh kurang dari separuh masyarakat	Tidak berubah selama ini		Tidak berubah selama ini

Hanya sebagian masyarakat memiliki alat untuk menyimpan air, seperti *profil tank*. Desa tidak memiliki alat simpan air umum.

9.3 Kondisi kesehatan masyarakat

Dalam 12 bulan terakhir ada dua bayi lahir, namun dua-duanya meninggal pada saat lahir. Berat rata-rata bayi pada saat baru lahir diperkirakan 2,5 kg. Dalam tahun terakhir tidak ada ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Usia ibu pada saat kehamilan pertama sekitar 18 tahun. Angka dan penyebab kematian anak-anak pada usia 0 hingga 10 tahun dapat lihat pada Tabel 11.

Tabel 11: Jumlah dan penyebab anak-anak usia di bawah 10 tahun yang meninggal dalam 12 bulan terakhir di Desa Mabung

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 - 5 tahun	2 orang	Kesulitan bernapas (aspiksia)
6 - 10 tahun	Tidak ada	-

Dalam tahun terakhir ada enam orang yang meninggal. Penyakit penyebab kematian utama adalah TBC. Diperkirakan umur rata-rata orang yang meninggal karena penyakit atau tua sekitar 65 tahun.

Desa Menabur Kecil



Foto: Sebuah rumah di Desa Menabur Kecil



Foto: Diskusi masyarakat di Desa Menabur Kecil

Profil Desa Menabur Kecil

Jumlah rumah tangga: 21	Jumlah jiwa: 124
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 19	Jumlah KK: 19
Suku mayoritas: Punan	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Daud Ilun	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Libun Tinga	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: Darif	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 5 menit (taksi/ojek)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 5 menit (taksi/ojek)	Jumlah Pusban: -
	Jumlah Polindes: -

MENABUR KECIL

1. Letak dan Lingkungan Desa

Menabur Kecil merupakan salah satu dari sepuluh desa yang tergabung dalam Resettlement Penduduk Sembuak. Desa Menabur Kecil berada di Kecamatan Malinau Utara. Ibukota Kecamatan Malinau Utara, Malinau Seberang dapat dijangkau dengan jalan kaki sekitar 15 menit. Dari Menabur Kecil ke Malinau Kota (ibukota kabupaten) perlu sekitar 20 menit jalan kaki. Respen Sembuak terletak antara Malinau Seberang, Malinau Kota dan Tajan.

Setelah terbentuk Kabupaten Malinau (tahun 1999) dan selesai jembatan Sungai Sesayap yang menghubungkan Malinau Kota dengan Respen Sembuak (tahun 2002) perkembangan di Respen Sembuak semakin cepat. Pada saat ini sedang dibangun gedung rumah sakit umum yang terletak berdampingan dengan Respen Sembuak. Lahan di sekitar Respen Sembuak sebagian besar datar dan relatif subur karena merupakan tanah aluvial (endapan sungai).

2. Sejarah Desa

Masyarakat Desa Menabur Kecil tinggal di Respen Sembuak sejak tahun 1972. Menurut Ketua Lembaga Adat, Desa Menabur Kecil terbentuk secara resmi 58 tahun yang lalu (tahun 1945). Pada saat itu masyarakat Desa Menabur Kecil tinggal di Sungai Menabur Kecil, anak sungai dari Sungai Tubu.

Ketua Lembaga Adat Desa menceritakan bahwa dalam 10 tahun terakhir masyarakat Menabur Kecil mengalami bencana banjir dan kekeringan. Akibat banjir ada beberapa perahu masyarakat hanyut. Akibat kekeringan "semua kebun dan ladang-ladang tidak ada hasil."

3. Penduduk

Mayoritas masyarakat Desa Menabur Kecil dari suku Punan.

3.1 Perpindahan penduduk

Sekretaris Desa mengatakan ada 4 orang yang meninggalkan Desa Menabur Kecil untuk sementara waktu sejak tahun 1998. Alasan mereka meninggalkan desa adalah untuk mencari pekerjaan. Tiga orang pindah dari Desa Menabur Kecil "karena tidak ada lahan."

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga yang ada di Desa Menabur Kecil:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Kelompok Tani;
- Karang Taruna.

Walaupun Badan Perwakilan Desa sudah terbentuk sejak tahun 2002, setelah terbentuk belum pernah mengadakan konsultasi dengan masyarakat atau membuat suatu keputusan.

4.1 Musyawarah

Ketua BPD berpendapat bahwa musyawarah desa dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan dari segi mutu, frekuensi bertemu maupun dampak keputusan musyawarah.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Sekretaris Desa menyebut selama ini Desa Menabur Kecil dapat bantuan dari pemerintah berupa dana Bangdes dan tunjangan aparat desa dan lembaga adat. Program bantuan lain adalah beras miskin yang pada awalnya diterima setiap bulan. Tetapi pada bulan November 2003 sudah 4 bulan tidak ada bantuan tersebut, tanpa pemberitahuan alasannya. Sekretaris Desa menyebut ada program Askes (Asuransi Kesehatan) untuk aparat desa, namun dia tidak tahu bagaimana pelaksanaannya. Di Desa Menabur Kecil juga diberikan kartu sehat, namun "sudah ditarik kembali dari Puskesmas Kecamatan."

Responden kurang mampu mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir ada bantuan dari pemerintah berupa dana Bangdes dan beras miskin. Menurutnya kedua program memuaskan dan dia mengusulkan "agar bantuan ini dapat terus menerus dan tepat pada waktu yang ditetapkan pemerintah. Dan kalau bisa dapat ditambah nilai dan jumlah bantuan tersebut di atas." Ketua BPD mengatakan tidak ada pihak selain pemerintah yang membantu masyarakat di Desa Menabur Kecil.

Permohonan bantuan yang pernah diajukan berkaitan dengan perumahan masyarakat, peralatan kantor desa dan kendaraan (sepeda motor) untuk kepala desa. Selain itu diminta bantuan untuk pembuatan kebun jati. Selama ini permohonan tersebut belum dapat jawaban dari pemerintah.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Sekretaris Desa selama ini tidak pernah ada kunjungan ke Desa Menabur Kecil.

Desa Menabur Kecil

Dalam 5 tahun terakhir keterjangkauan pemerintah semakin baik karena jarak ke kantor-kantor semakin dekat. Ketua BPD berpendapat bahwa keterbukaan informasi semakin baik sejak tahun 1998. Dari segi pelayanan, tingkat kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tidak ada perubahan menurutnya.

Dari hasil wawancara sepuluh rumah tangga, terlihat bahwa separuh dari jumlah responden mengatakan frekuensi bertemu dengan pemerintah meningkat dan 4 menilai tidak ada perubahan. Masyarakat terutama bertemu dengan staf pemerintah di Malinau Kota (disebut sembilan responden) dengan tujuan mengikuti sosialisasi program pemerintah (disebut oleh lima responden), atau menyampaikan usulan (disebut oleh empat responden). Empat responden tidak bisa memberikan penjelasan tentang tujuan bertemu dengan pemerintah. Enam responden mengatakan hubungan antar tokoh masyarakat dengan pemerintah meningkat dalam 5 tahun terakhir dan empat anggap tidak ada perubahan. Namun hubungan yang lebih akrab menurut enam responden tidak mengubah perhatian dari pemerintah untuk desa. Tiga responden menilai perhatian pemerintah sejak tahun 1998 meningkat dan satu responden malah menilai perhatian semakin berkurang.

5.3 Sumber dan alat informasi

Ketua BPD mengatakan bahwa informasi tentang program pemerintah diperoleh dari kunjungan pemerintah, pengumuman dan undangan. Sejak Agustus 2003 telepon genggam sudah dapat digunakan di Respen Sembuak, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Jaringan telepon biasa belum diperluas sampai ke Respen Sembuak. Sebagai alat untuk memperoleh informasi disebut televisi dan radio.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Upacara adat yang menurut Ketua Lembaga Adat Desa masih dilakukan adalah *pekanduru* (Bhs. Punan), upacara pengobatan tradisional. Upacara ini tidak mengalami perubahan, baik dari segi waktu, bahan dan gotong royong, maupun dari segi tujuan.

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Tingkat kerjasama di Desa Menabur Kecil dalam 5 tahun terakhir masih sama. Bentuk gotong royong yang dilaksanakan dalam 12 bulan terakhir misalnya gotong royong untuk membuat ladang, kerja bakti di dalam desa, gotong royong atau membantu pada saat kematian atau pernikahan. Biasanya lebih dari separuh warga hadir pada gotong royong. Responden kurang mampu berpendapat bahwa tingkat kerjasama di desa dalam 5 tahun terakhir menurun.

Orang kurang mampu mengatakan bahwa selama ini pernah mendapatkan bantuan dari keluarganya tapi tidak dari warga desa yang lain. Menurut Ketua Lembaga Adat kalau masyarakat Desa Menabur Kecil mengalami kekurangan pangan tidak pernah minta bantuan dari pihak lain, tetapi berusaha sendiri untuk mengatasinya.

6.3 Konflik

Menurut Ketua Lembaga Adat konflik yang terjadi di Desa Menabur Kecil berkaitan dengan lahan. Konflik lahan jarang terjadi, namun cenderung meningkat, "karena kami dipindahkan oleh pemerintah di daerah atau tanah adat orang lain." Permasalahan sosial lain yang disebut adalah kenakalan remaja yang sering terjadi. Tidak ada penjelasan apakah kenakalan ini menimbulkan konflik atau merupakan masalah sosial, misalnya terjadi kehamilan di luar nikah yang menjadi beban bagi seluruh keluarga. Tidak diberikan penjelasan apakah ada perubahan dalam frekuensi terjadi kenakalan remaja.

Ketika orang kurang mampu ditanya konflik yang sama disebut. Menurutnya konflik lahan terjadi karena "ada orang yang mengaku lahan yang kami miliki sekarang, itu neneknya punya." Permasalahan keluarga yang disebut adalah kenakalan remaja. Menurut responden kurang mampu dalam 5 tahun terakhir jumlah konflik tidak mengalami perubahan.

Untuk menangani konflik di dalam desa maupun dengan pihak luar sebagai langkah pertama digunakan hukum adat. Kalau tidak dapat diselesaikan dilimpahkan ke jalur hukum negara. Apabila ada orang yang tidak mematuhi keputusan lembaga adat denda akan dinaikkan dua kali lipat. Kalau kemudian masih tidak mematuhi akan dialihkan ke tingkat pemerintah. Selama ini, menurut Ketua Lembaga Adat Desa, lebih dari separuh kasus dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

6.4 Situasi umum orang miskin

Responden kurang mampu menilai bahwa kondisi kehidupan rumah tangganya dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Ketika ditanya untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi, dia tidak bisa memberikan gambaran tentang kekurangan apa atau masalah apa yang dihadapinya. Menurutnya dia tidak sanggup untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebutuhan makanan dan uang tunai. Untuk biaya pendidikan selama ini dia tidak mendapatkan bantuan. Kesulitan untuk biaya kesehatan terbantu dengan kartu sehat. Untuk kebutuhan makanan dan uang tunai dia dapat bantuan dari keluarganya. Menurutnya bantuan yang dia perlukan dari pihak luar meliputi pendidikan, kesehatan dan bantuan penguatan ekonomi.

6.5 Hiburan

Sumber hiburan yang disebut oleh Ketua Lembaga Adat adalah:

- televisi;
- radio;
- tarian gong dan kecapi.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPD jenis tata guna lahan yang ada di Desa Menabur Kecil adalah:

Desa Menabur Kecil

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun kokoa;
- kebun kopi;
- hutan;

Tipe tata guna lahan paling luas di Desa Menabur Kecil adalah sawah⁶.

Luas ladang, sawah dan kebun sayur tidak mengalami perubahan sejak tahun 1998. Luas kebun kokoa dan kopi berkurang dalam 5 tahun terakhir. Kebun kopi banyak mati dan tidak dirawat lagi.

Menurut Ketua BPD jenis hutan dan lahan bera yang ada di Desa Menabur Kecil adalah:

- hutan rimba (Bhs. Punan *tuan*);
- hutan sekunder tua, > 30 tahun (Bhs. Punan *balah tuan*);
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun (Bhs. Punan *balah token*);
- belukar tua, 5 - 10 tahun (Bhs. Punan *balah uyung*);
- belukar, 2 -5 tahun (Bhs. Punan *balah uvah*);
- hutan rawa (Bhs. Punan *tanoh ragan*).

Luas hutan rimba berkurang sejak tahun 1998. Luas hutan sekunder tua dan muda serta belukar tua berkurang dalam 5 tahun terakhir karena dibuka untuk membuat ladang. Luas belukar bertambah setiap tahun. Hutan rawa semakin berkurang, bahkan disebut oleh Ketua BPD "habis di-ladang."

Perubahan terhadap hutan sudah mulai terasa sebelum tahun 1990. Luas hutan mulai berkurang dengan dibukanya perusahaan kayu dan mengakibatkan lebih sulit untuk berburu dan berusaha. Jenis tumbuhan dan binatang berkurang sehingga sulit dicari oleh masyarakat.

7.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Hutan yang dilindungi secara lokal di Desa Menabur Kecil terletak di wilayah desa lama. Di sekitar pemukiman di Respen Sembuak tidak ada 'hutan lindung' masyarakat Desa Menabur Kecil. Luas hutan yang dilindungi tidak diketahui. Daerah tersebut bisa digunakan untuk mencari hasil hutan seperti gaharu, rotan atau damar. Apabila ada orang melanggar aturan 'hutan lindung' dikenakan denda berupa barang misalnya tempayan (guci) lama dan hasil juga disita.

Masyarakat Desa Menabur Kecil pernah mengajukan permohonan izin IPPK, tapi tidak dikabulkan. Sejauh Sekretaris Desa ketahui tidak ada pihak dari luar yang mengajukan permohonan izin IPPK untuk wilayah Desa Menabur Kecil. Responden kurang mampu menjawab bahwa tidak ada orang dari Desa Menabur Kecil atau pihak luar yang pernah memohon izin IPPK. Namun dia juga mengakui bahwa dia tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang perolehan izin IPPK.

⁶ kalau hanya meliputi wilayah desa di Respen Sembuak. Di wilayah desa lama hutan rimba merupakan tipe tata guna lahan yang paling luas.

7.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa seluruh rumah tangga punya keterjangkauan terhadap lahan (meliputi hak, jarak - transportasi, ketersediaan). Namun tidak semua rumah tangga memiliki lahan. Menurut Sekretaris Desa lebih dari setengah jumlah rumah tangga memiliki lahan. Kondisi keterjangkauan dalam 5 tahun terakhir tidak berubah. Di Desa Menabur Kecil sudah terjadi jual-beli lahan kepada masyarakat Malinau Kota. Praktek ini mulai sejak pemekaran dan terbentuk kabupaten baru (tahun 1999).

7.4 Perladangan

Dari sepuluh responden rumah tangga ada tiga yang pada tahun 2003 tidak membuat ladang atau sawah. Tiga rumah tangga membuka ladang di hutan rimba pada tahun 2003 dan satu rumah tangga menggarap belukar milik sendiri. Dua rumah tangga menggarap sawah milik sendiri dan satu rumah tangga membuat ladang dan sawah pada tahun 2003. Rumah tangga yang buka hutan rimba harus mencari lahan sekitar 1 jam jalan kaki dari Respen Sembuak. Sedangkan lahan lain terletak sekitar 20 menit jalan kaki dari pemukiman (2 kilometer). Umur belukar yang dibuka rata-rata di bawah 10 tahun.

Hanya tiga rumah tangga mendapatkan hasil ladang atau sawah cukup untuk kebutuhan 1 tahun. Rumah tangga lain menutupi kekurangan beras dari 'beras miskin' dan membeli di warung.

7.5 Pendapatan uang

Enam (dari sepuluh responden rumah tangga) menyebut upah buruh sebagai sumber pendapatan utama. Dua responden menyebut ladang sebagai usaha utama namun tidak jelas apakah memang mendapatkan uang dari hasil ladang atau hanya untuk kebutuhan keluarga. Satu responden menyebut ojek dan satu hasil buruan. Sebagai usaha tambahan disebutkan ladang (empat responden), tunjangan desa (satu responden), berjualan sayur dan ayam (satu responden) dan upah buruh (satu responden). Berarti dari sepuluh responden hanya satu yang mempunyai usaha yang berkaitan dengan sumber daya hutan, yaitu menjual hasil buruan.

Enam responden mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir tidak ada usaha baru yang muncul atau dikembangkan. Dua orang menyebut upah buruh sebagai usaha baru, satu menyebut hasil buruan dan satu menyebut ojek.

Satu responden mendapatkan uang dari hasil hutan yaitu gaharu, babi hutan serta rusa. Satu responden lain mengatakan mendapatkan uang dari berjualan buah-buahan. Tidak ada rumah tangga yang mengolah hasil hutan untuk dijual misalnya tikar, anjat atau makanan.

7.6 Kondisi rumah penduduk

Semua responden rumah tangga (sepuluh orang) punya rumah dengan atap seng, lantai dan dinding dari papan meranti. Lebih dari separuh rumah tangga (delapan dari sepuluh) tidak punya WC, dan menggunakan kakus di sungai. Tujuh rumah tangga memiliki sambungan ke jaringan PLN, dua rumah tangga lain menyambung ke *genset* orang dan satu rumah tangga tidak memiliki listrik.

Desa Menabur Kecil

7.7 Infrastruktur ekonomi

Walaupun di Respen Sembuak tidak ada pasar atau lembaga keuangan, masyarakat bisa menjangkau infrastruktur yang ada di Malinau Kota. Ada satu orang berjualan sayur dan ternak tapi tidak ada informasi di mana dia berjualan. Tidak ada informasi sejauh mana masyarakat Menabur Kecil menggunakan lembaga keuangan di Malinau Kota dan menabung uang di bank atau di *credit union*.

7.8 Keterjangkauan energi

Sumber energi utama untuk memasak adalah kayu bakar dan minyak tanah. Menurut Sekretaris Desa, kayu bakar dan minyak tanah semakin sulit dijangkau oleh masyarakat.

Masyarakat Menabur Kecil sudah lama bisa menyambung ke jaringan PLN sebagai sumber listrik. Namun karena masyarakat Menabur Kecil tidak punya penghasilan tetap, Sekretaris Desa mengatakan listrik semakin sulit dijangkau.

8. Pendidikan

8.1 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di Respen Sembuak hanya terdapat Sekolah Dasar. Taman kanak-kanak ada di Malinau Kota (sekitar 2 kilometer). SLTP ada di Malinau Seberang, sekitar 1 kilometer dari pemukiman Desa Menabur Kecil. SLTA dan perguruan tinggi terdapat di Malinau Kota, dengan jarak sekitar 2,5 kilometer dan 5 kilometer. Pada tahun 2003 ada 52 murid baru di kelas 1 SD.

Dalam 5 tahun terakhir jumlah sekolah di Respen Sembuak tidak berubah, sedangkan kondisi gedung menurun karena tidak ada perawatan. Jumlah tenaga guru dan gaji mereka masih tetap. Disinggung bahwa "tunjangan agak tersendat."

8.2 Mutu pendidikan

Wakil Kepala Sekolah mengatakan bahwa tingkat pendidikan tenaga guru dalam 5 tahun terakhir berkurang. Keaktifan dalam 5 tahun terakhir juga menurun. Persentase kelulusan murid semakin meningkat dan pada ujian tahun 2003 mencapai 100%. Jumlah orang yang bisa membaca dan menulis tidak mengalami perubahan sejak tahun 1998.

Wakil Kepala Sekolah menceritakan bahwa ada murid yang putus sekolah karena menjual koran (di Malinau Kota). Selain itu ada sedikit murid yang meninggalkan sekolah untuk sementara waktu karena ikut ke ladang.

8.3 Kebersihan lingkungan (pengamatan langsung)

Informasi ini tidak diperoleh dalam survei.

Desa Menabur Kecil

8.4 Kondisi kesehatan masyarakat

Informasi ini tidak diperoleh dalam survei. Fasilitas kesehatan sama dengan kondisi di Desa Mabung.

Desa Long Adu



Foto: Pemukiman Desa Long Adu

Profil Desa Long Adu

Jumlah rumah tangga: 19	Jumlah jiwa: 93
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 10	Jumlah KK: 19
Suku mayoritas: Merap	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Thomas Laing	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Ubang Alang	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: Incau Pie	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 2 jam (ketinting)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 5 jam (ketinting)	Jumlah Pusban: 1
	Jumlah Polindes: -

Long Adiu

1. Letak dan Lingkungan Desa

Di Adiu terdapat dua desa, yaitu Long Adiu dan Punan Adiu. Long Adiu termasuk Kecamatan Malinau Selatan dan terletak di pinggir Sungai Malinau antara Gong Solok (sekitar 30 menit dengan ketinting di hilir) dan Long Loreh, ibukota kecamatan (sekitar 2 jam dengan ketinting ke hulu). Pada tahun 2001 perusahaan IPPK membuat jalan darat yang menghubungkan Long Adiu dengan jalan poros dari Malinau Kota ke Long Loreh sepanjang 5 kilometer. Namun pada bulan November 2003 jalan darat sudah tidak dapat dilewati mobil.

Di wilayah Long Adiu masih terdapat banyak hutan rimba, di pinggir Sungai Malinau dan Sungai Adiu. Pada tahun 2000 sampai 2002 CV. Wana Bakti membuka IPPK dan menggarap sebagian hutan yang terletak di sekitar pemukiman dan yang terdapat di bagian Hilir Sungai Adiu. Lahan perladangan terutama terdapat di pinggir Sungai Malinau dan Sungai Adiu. Lahan di pinggir Sungai Malinau yang relatif subur sering digunakan oleh masyarakat untuk membuat kebun kacang tanah.

2. Sejarah Desa

Desa Long Adiu pindah ke pemukiman sekarang pada tahun 1972. Sebelumnya sudah berada di wilayah ini tetapi bermukim dekat Kuala Sungai Adiu.

Dalam 10 tahun terakhir masyarakat Long Adiu mengalami beberapa bencana. Pada tahun 1999 terjadi banjir yang mengakibatkan ada rumah penduduk tergenang dan rusak. Dampak lain dari banjir adalah rusaknya sebagian kebun, terutama kebun kakao. Bencana lain yang disebut oleh Kepala Adat juga berkaitan dengan pertanian, yaitu kekeringan dan hama (babi hutan, landak dan tikus). Bencana ini mengakibatkan tanaman rusak dan hasil ladang berkurang.

3. Penduduk

Mayoritas masyarakat Long Adiu berasal dari Suku Merap, dan ada beberapa orang dari kelompok etnis lain (Milau, Jawa, Berusu) yang menetap di Long Adiu karena pernikahan dengan orang Long Adiu. Jumlah penduduk 125 jiwa (data sensus P4B, Mei 2003). Ada enam belas orang yang meninggalkan desa untuk sementara waktu, dua orang karena bekerja di Malaysia dan empat belas orang karena melanjutkan sekolah. Ada sebelas anak sekolah di Malinau Kota, dua di Long Loreh dan satu di Jawa. Hanya ada satu orang pindah dari Long Adiu karena pernikahan dengan orang dari desa lain.

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga-lembaga yang ada di Desa Long Adiu adalah:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- Lembaga Musyawarah Desa (LMD);
- Kelompok Tani;
- Usaha ekonomi desa simpan pinjam.

Selain pemerintah desa dan lembaga adat sudah terbentuk Badan Perwakilan Desa (BPD), namun BPD belum pernah mengadakan pertemuan. Sedangkan menurut Kepala Desa Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang seharusnya diganti oleh BPD masih ada. Lembaga lain adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), kelompok tani dan usaha ekonomi desa simpan pinjam yang baru terbentuk. Kepala Desa tidak menyebut adanya koperasi tetapi di Long Adiu ada gedung toko koperasi.

4.1 Musyawarah

Dalam 5 tahun terakhir mutu dan frekuensi musyawarah desa meningkat, tapi dampak dari keputusan musyawarah desa sama saja. Selama kunjungan ke Long Adiu terlihat jumlah orang yang hadir dalam pertemuan umum cukup banyak dan peluang untuk menyampaikan pendapat terbuka untuk semua peserta.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Program bantuan pemerintah yang disebut oleh Kepala Desa adalah air bersih, seng dan rehab sekolah. Pada tahun 2000 proyek air bersih tidak selesai dengan baik dan tahun 2002 dilanjutkan. Untuk bantuan atap seng balai adat diberikan Rp 20.000.000 oleh Bupati. Rehab sekolah dasar dilakukan pada tahun 2002, namun ada keluhan bahwa tidak memuaskan karena hanya beberapa lembar seng diganti dan dicat ulang atap.

Menurut anggota masyarakat ekonomi lemah bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa 'beras miskin' (raskin). Walaupun dikatakan dampak program ini membantu juga dikatakan tidak memuaskan. Alasan tidak memuaskan karena kadang-kadang tetap dibeli dengan harga Rp 2.000 per kilo atau beras harus diambil di pinggir jalan poros Malinau Kota - Long Loreh (jarak 5 kilometer). Program bantuan lain yang disebut adalah subsidi biaya berobat, tapi responden tidak tahu bagaimana pelaksanaan program ini. Saran yang diberikan adalah bahwa perlu informasi lebih banyak untuk menjelaskan cara mendapatkan kartu sehat dan bagaimana kegunaannya.

Bantuan lain diperoleh dari pengusaha IPPK berupa minyak solar untuk genset desa, tarik kayu untuk kebutuhan pembangunan rumah masyarakat, sumbangan untuk

Desa Long Adiu

perayaan Natal dan dapat menumpang kendaraan perusahaan untuk pergi ke Malinau Kota. Namun karena perusahaan sudah tidak beroperasi bantuan juga berakhir.

Pada saat survei (November 2003) masyarakat mengeluh tentang bantuan semenisasi jalan desa yang diberikan oleh kecamatan. Mereka tidak setuju dengan cara pelaksanaan yang mengharuskan ada swadaya masyarakat. Karena pelaksanaan tertunda maka pada saat masyarakat sibuk di ladang diharapkan mereka juga gotong royong untuk proyek ini.

Dalam 2 tahun terakhir Long Adiu mengajukan permohonan untuk satu tenaga medis dan satu tenaga guru.⁷ Untuk tenaga medis diminta masyarakat sabar sampai ada kelulusan baru karena tidak ada tenaga medis siap ditempatkan dan mengenai tenaga guru belum ada jawaban. Permohonan untuk perumahan guru sudah dua kali diajukan tapi belum ditanggapi. Bantuan pertanian berupa bibit kopi dan durian hingga November 2003 belum dijawab sedangkan proyek semenisasi jalan desa dikabulkan tapi pelaksanaan menurut masyarakat kurang memuaskan. Dalam diskusi masyarakat mengusulkan agar semenisasi diserahkan saja kepada kontraktor, atau diberi dana cukup untuk membayar sepenuhnya anggota masyarakat yang mengerjakan semenisasi.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Selama ini Long Adiu hanya dikunjungi oleh petugas Puskesmas dengan frekuensi kurang dari sebulan sekali.

Dalam 5 tahun terakhir keterjangkauan pemerintah lebih baik, tapi dari segi perhatian dan pelayanan masih dinilai sama seperti dulu. Keterbukaan informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan malah dinilai lebih buruk. Dikeluhkan bahwa informasi dari pemerintah terlambat sampai.

Dalam wawancara rumah tangga 50% responden mengatakan dalam 5 tahun terakhir semakin sering bertemu dengan pemerintah, terutama di Malinau Kota. Sepertiga dari responden tidak memberi jawaban yang jelas ketika ditanya mengenai hubungan dengan pemerintah, karena mereka tidak pernah punya urusan sendiri dengan pemerintah. Tujuan bertemu terutama untuk menyampaikan usulan pembangunan desa dan membahas masalah seperti batas desa.

5.3 Sumber dan alat informasi

Informasi tentang program pemerintah diperoleh lewat pengumuman dan mendengar dari orang dan tidak melalui kunjungan karena tidak ada kunjungan ke desa. Di Desa Long Adiu tidak ada alat komunikasi seperti radio SSB atau *Handy Talky* (HT)⁸.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Upacara adat berkaitan dengan kepercayaan dulu tidak dilaksanakan. Ketika ditanya tentang upacara adat disebut acara perkawinan, ulang tahun anak dan kematian.

⁷ Kepala desa baru menjabat 2 tahun dan tidak tahu permohonan yang diajukan sebelumnya.

⁸ Pada bulan Maret 2004 sudah ada perangkat radio di Long Adiu.

Desa Long Adiu

Kepala Adat mengatakan pelaksanaan upacara adat mengalami perubahan dari segi waktu, bahan dan tujuan.

Menurut Kepala Adat masih ada sekitar seperempat dari generasi muda yang berminat belajar tentang tradisi.

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Kerjasama antar masyarakat dalam 5 tahun terakhir meningkat. Di Long Adiu diterapkan aturan bahwa orang yang tidak aktif ikut gotong royong kena sanksi, yaitu pada saat pembayaran *fee* IPPK kena pemotongan. Gotong royong yang dilaksanakan adalah untuk membangun rumah dan *senguyun* (kelompok berharian untuk melaksanakan kegiatan secara bergantian). Selain itu masyarakat melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki jalan darat. Biasanya seluruh masyarakat ikut dalam kegiatan gotong royong, kecuali warga yang sakit.

Menurut responden kurang mampu tingkat gotong royong dalam 5 tahun terakhir tidak berubah. Dia mengatakan masyarakat pernah gotong royong untuk membuat bahan rumahnya. Sedangkan dari keluarganya belum pernah dapat bantuan.

Kepala Adat menjelaskan bahwa kalau masyarakat mengalami kekurangan pangan kadang-kadang dibantu oleh pemerintah, selain itu masing-masing berusaha untuk menutupi kekurangan.

6.3 Konflik

Ketika responden kurang mampu ditanya mengenai konflik di desa dikatakan tidak ada. Menurut Kepala Adat konflik tentang lahan dan konflik keluarga sering terjadi dan semakin meningkat. Alasan konflik lahan adalah karena batas (desa) belum jelas. Dengan adanya air bersih di Long Adiu permasalahan mengenai air berkurang.

Cara untuk menangani konflik di desa diusahakan dulu dengan pendekatan kekeluargaan. Kalau tidak dapat diselesaikan ditangani oleh lembaga adat dan kalau sanksi adat tidak dibayar akan diserahkan ke hukum negara. Untuk penyelesaian konflik dengan pihak luar belum ada ketentuan. Namun diberi contoh permasalahan batas antar Long Adiu dengan Gong Solok diselesaikan melalui hukum adat. Menurut Kepala Adat seluruh konflik dapat diselesaikan oleh lembaga adat dan selama ini belum pernah terjadi bahwa keputusan lembaga adat tidak dipatuhi. Seandainya tidak dituruti akan diserahkan ke kepala desa atau ke lembaga adat besar.

6.4 Situasi umum orang miskin

Menurut reponden kurang mampu keadaan hidupnya dalam 5 tahun terakhir semakin memburuk. Dia sering mengalami kegagalan dalam usaha. Sebagai contoh dia ceritakan bahwa dia pernah diminta menggesek 20 kubik papan yang akan diberi imbalan sebesar Rp 100.000/kubik meter (yang termasuk murah). Namun setelah papan diambil hingga sekarang dia tidak pernah dibayar. Masalah utama yang dia hadapi sekarang adalah kekurangan dana. Selama ini dia bekerja sebagai operator *chainsaw* gesek papan, namun menjadi anak buah orang, sehingga hasil terbatas. Menurutnya apabila dia bisa kerja mandiri penghasilan akan jauh lebih baik.

Rumahnya termasuk kecil untuk ukuran di Long Adiu (hanya 4 x 6 m) dan belum selesai. Pernah masyarakat Long Adiu gotong royong untuk membuat bahan rumahnya dan sebagian kerangka rumah sudah dipasang. Namun karena tidak mampu membeli

Desa Long Adiu

seng hingga sekarang pembangunan rumah belum dilanjutkan. Untuk kebutuhan kesehatan, pangan dan uang dia mengatakan masih mampu diusahakan sendiri. Biaya pendidikan belum dibutuhkan karena anaknya belum sekolah.

6.5 Hiburan

Kegiatan hiburan pada saat Natal dan tahun baru adalah seni budaya, yaitu tarian dan lagu.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Kepala Desa jenis tata guna lahan yang ada di Desa Long Adiu adalah:

- ladang;
- kebun sayur;
- kebun buah-buahan;
- kebun kokoa;
- kebun kopi;
- hutan.

Hutan rimba masih merupakan tipe lahan yang paling luas, lebih dari setengah luas wilayah, walaupun sejak 1998 luasan berkurang.

Sejak 1998 areal perladangan bertambah dan terlihat pada tahun 2003 cukup banyak masyarakat buka rimba untuk ladang. Areal kebun kacang tanah dan buah-buahan kurang lebih tetap. Luas kebun kokoa berkurang sejak terjadi banjir 1999 dan banyak pohon kokoa mati atau kena penyakit. Sejak itu kebun kokoa kurang dirawat dan sekarang mulai diganti dengan tanaman kopi, sehingga luasan kebun kopi bertambah.

Menurut Kepala Desa jenis hutan dan lahan bera yang ada di Desa Long Adiu adalah:

- hutan rimba (Bhs. Merap *lu'huie*);
- hutan sekunder tua, > 30 tahun;
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun ;
- belukar tua, 5 - 10 tahun (Bhs. Merap *lamalah*);
- belukar, 2 -5 tahun (Bhs. Merap *ma'ai*);
- hutan rawa (Bhs. Merap *panggah*);
- hutan kerangas (Bhs. Merap *tana ye'e*).

Luas hutan sekunder tua dan muda tidak berubah. Luas belukar tua berkurang karena digarap. Luas hutan rawa tetap, karena tidak cocok untuk pertanian. Luas hutan kerangas dikatakan berkurang namun tidak jelas apa sebabnya.

Sebelum tahun 1990 HPH PT. Inhutani dan PT. Barito beroperasi di wilayah Long Adiu. Operasi perusahaan ini terutama berdampak pada populasi babi hutan dan berkurangnya buah-buahan. Kehadiran perusahaan tidak memudahkan akses karena

Desa Long Adiu

walaupun ada jalan masyarakat tidak dibantu dengan transportasi. Selama HPH beroperasi masyarakat tetap masih bisa gesek/gergaji kayu.

7.2 *Pengelolaan hutan dan IPPK*

Dari tahun 2000 hingga 2002 pemegang IPPK CV. Wana Bakti beroperasi di wilayah Long Adiu. Seluruh masyarakat mendapatkan pembagian *fee* dan dalam survei rumah tangga disebut *fee* penting untuk ekonomi rumah tangga. Dari empat responden yang mendapatkan gaji di perusahaan IPPK tiga menyebut gaji tidak penting bagi ekonomi rumah tangga dibandingkan dengan pembagian *fee*. Untuk kelanjutan (HPH mini) masyarakat sendiri tidak mencari investor, namun investor datang ke masyarakat dan menawarkan kerjasama. Informasi dari responden kurang mampu konsisten, hanya dia tidak ikut dalam perundingan mengenai kerjasama dengan perusahaan karena pada saat itu tidak ada di desa. Kepala Desa mengatakan bahwa seharusnya seluruh masyarakat ikut terlibat dalam mengambil keputusan tentang kerjasama dengan perusahaan.

Ada rencana masyarakat Long Adiu untuk melindungi sebagian hutan, tapi belum dapat terlaksana karena batas desa belum selesai. Menurut Kepala Desa direncanakan agar hutan bekas IPPK tidak digarap lagi. Selama ini belum ada aturan khusus berkaitan dengan hutan lindung, tapi sudah dipikirkan bahwa di masa mendatang perlu kontrak yang jelas dengan pihak perusahaan kayu untuk menghindari perusahaan menggarap hutan di sembarangan tempat.

7.3 *Kepemilikan lahan oleh masyarakat*

Selama ini semua rumah tangga punya akses yang mudah pada lahan dan semua rumah tangga memiliki lahan. Sejak 1998 tidak ada perubahan akses terhadap lahan dan belum terjadi praktek jual beli lahan.

7.4 *Perladangan*

Masih tersedia banyak lahan di Desa Long Adiu tergambar dari letak ladang yang dekat dengan pemukiman. Sebagian besar ladang berada di pinggir Sungai Malinau dan Sungai Adiu, dan jarak paling jauh 200 meter dari pinggir sungai.

Untuk ladang, tahun 2003, tujuh dari sepuluh rumah tangga yang diwawancarai membuka rimba. Ada dua rumah tangga tidak membuat ladang dan satu rumah tangga menggarap bekas ladang milik mereka. Jarak ke ladang bervariasi dari 1 menit dengan ketinting sampai paling jauh 30 menit dengan ketinting.

Dari sepuluh rumah tangga hanya satu dapat padi ladang cukup untuk kebutuhan selama 1 tahun. Rumah tangga yang lain dapat cukup untuk 5 hingga 10 bulan. Kekurangan beras dipenuhi dengan membeli beras di warung (tujuh rumah tangga), satu rumah tangga membeli dan juga dapat 'beras miskin' dan satu rumah tangga tidak membeli beras untuk menutupi kekurangan tapi pakai makanan yang lain, seperti ubi kayu.

7.5 *Pendapatan uang*

Untuk separuh rumah tangga menggesek kayu bangunan merupakan sumber pendapatan utama. Menggesek merupakan usaha baru yang mulai ditekuni sejak ada perusahaan IPPK, karena sebagian laki-laki kerja di perusahaan dan bisa kredit

Desa Long Adiu

chainsaw. Setelah perusahaan IPPK tutup usaha menggesek kayu dilanjutkan perorangan atau dalam kelompok kecil. Rumah tangga lain mengandalkan hasil kebun kacang (tiga responden), keuntungan dari kios (satu responden) atau gaji sebagai guru (satu responden). Lima responden menyebut hasil kebun kacang tanah sebagai sumber pendapatan tambahan. Sebagai sumber pendapatan tambahan lain disebut *fee* IPPK (dua responden), menjual ikan, keuntungan kios dan hasil kebun kopi.

Dalam 5 tahun terakhir semua rumah tangga punya sumber pendapatan baru. Mereka terutama menyebut *fee* dari IPPK (disebut oleh sembilan dari sepuluh responden) dan gaji dari IPPK (tiga responden), hasil menggesek (dua responden) gaji sebagai guru (satu responden) dan keuntungan dari kios (satu responden).

Seperti diceritakan oleh Bpk. Ubang Laing beberapa tahun sebelum 1999 hasil kebun kakao cukup penting untuk ekonomi rumah tangga. Namun setelah dilanda banjir hasil kebun kakao turun drastis sehingga kebun tidak dipelihara lagi. Kebun kacang tanah menjadi salah satu usaha andalan. Dalam diskusi kelompok, ibu-ibu mengeluh bahwa harga kacang tanah kurang memuaskan: Rp 2.000 - Rp 2.500 per kilogram dengan polong.

7.6 Kondisi rumah penduduk

Secara umum kondisi rumah masyarakat Long Adiu cukup memadai. Sebagian besar rumah berukuran sekitar 8 x 12 meter bahkan ada beberapa rumah bertingkat. Semua rumah terbuat dari kayu meranti atau kayu yang lebih baik dengan atap seng. Ada beberapa rumah yang baru dibangun di bagian hulu pemukiman yang telah didorong oleh alat berat perusahaan IPPK. Aliran listrik genset desa (pemberian perusahaan IPPK) dibagi ke semua rumah. Namun responden kurang mampu mengaku tidak menyambung lagi ke listrik desa karena tidak bisa membayar iuran, walaupun ada kebijakan desa tarif rendah untuk masyarakat kurang mampu. Selain itu Kepala Desa mengatakan ada kebijaksanaan untuk menutup kekurangan pembayaran iuran dari kas desa.

7.7 Infrastruktur ekonomi

Di Long Adiu tidak terdapat pasar dan masyarakat kadang-kadang menjual hasil di Long Loreh atau di Malinau Kota. Sejak perusahaan kontraktor pertambangan batu bara tutup, pasar ikan dan daging di Long Loreh sangat terbatas. Hasil kebun kacang tanah biasanya dijual di Malinau Kota.

7.8 Keterjangkauan energi

Sumber energi utama untuk masak adalah kayu api yang masih mudah terjangkau. Selain itu ada masyarakat yang menggunakan minyak tanah. Masyarakat memperoleh listrik dari genset desa dan ada sebagian masyarakat yang mendapatkan tenaga surya, bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Menurut Kepala Desa banyak unit tenaga surya sudah rusak.

8. Pendidikan

8.1 Kondisi fasilitas pendidikan

Di Long Adiu hanya ada gedung Sekolah Dasar dengan 3 lokal, yang dibangun pada tahun 1981/1982, sehingga dalam 1 lokal ada 2 kelas yang diberi pelajaran oleh satu tenaga guru. Pada saat ini hanya ada tiga guru kelas dan satu guru agama untuk 6 kelas. Walaupun ada keluhan tentang mutu rehab yang baru dilaksanakan tetap dinilai kondisi sekolah meningkat. Fasilitas lain seperti pengadaan buku dan alat, jumlah staf dan gaji meningkat, walaupun jumlah tenaga guru belum cukup.

8.2 Mutu pendidikan

Dalam 5 tahun terakhir ada peningkatan pendidikan guru dan keaktifan guru. Persentase kelulusan selama ini tetap 100% sedangkan persentase orang yang dapat membaca dan menulis tetap. Selama ini tidak ada anak yang putus sekolah. Kepala Sekolah cerita bahwa dalam tahun terakhir ada dua murid yang bolos, namun oleh Kepala Sekolah dapat dibujuk untuk melanjutkan sekolah. Jumlah murid di SD Adiu sedikit, misalnya untuk kelas 1 tahun 2003 hanya ada lima murid baru dan delapan murid yang tinggal kelas.

Untuk melanjutkan sekolah ke SMP anak dari Long Adiu pergi ke Pulau Sapi, Loreh atau Malinau Kota. Untuk SMU mereka sekolah di Malinau Kota dan di Tanjung Lapang. Sementara ini belum ada anak dari Long Adiu yang melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi.

9. Kesehatan

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Puskesmas pembantu di Long Adiu dibangun oleh perusahaan IPPK pada tahun 2002, namun selama ini belum ada petugas kesehatan. Sejak 1996 ada Pos Obat Desa yang punya persediaan obat dan dijalankan oleh salah satu warga Long Adiu. Dalam 5 tahun terakhir persediaan obat meningkat dan Pos Obat Desa dijalankan secara mandiri.

Dalam diskusi kelompok semua kelompok mengeluh bahwa tidak ada tenaga medis, sehingga untuk berobat perlu ke Puskesmas di Loreh (perjalanan 2 jam dengan ketinting, dengan biaya sekitar Rp 40.000) atau ke mantri yang ada di Gong Solok (sekitar 30 menit dengan ketinting, dengan biaya sekitar Rp 20.000). Dalam diskusi disebutkan kadang-kadang dokter Puskesmas tidak ada di tempat, dan kalau penyakit gawat tetap dirujuk ke rumah sakit di Malinau Kota.

Kepala Adat mengatakan bahwa tidak ada lagi orang di Long Adiu yang punya keahlian pengobatan tradisional. Informasi ini diperkuat oleh kenyataan bahwa pada saat kunjungan didatangkan seorang ahli pengobatan tradisional dari Malinau.

Desa Long Adiu

9.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih warga Long Adiu dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Adiu

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Mengapa	Perubahan Mutu
Sungai	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	-	
Hujan	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	-	Mutu tetap
Air bersih kampung	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Meningkat, tapi kalau kemarau tidak ada air	Instalasi air bersih baru mulai dibangun tahun 2000	Mutu masih kurang baik

Ada usaha dari masyarakat untuk meningkatkan fasilitas air bersih dengan menggunakan uang PKK untuk membeli tangki air (1.100 liter).

9.3 Kebersihan lingkungan

Setelah ada instalasi air bersih timbul masalah meningkatnya jumlah nyamuk karena banyak genangan air. Dalam diskusi kelompok ibu-ibu dikatakan bertambah pengeluaran karena perlu membeli obat nyamuk⁹. Lingkungan pemukiman cukup bersih dan terpelihara. Karena tidak ada tempat khusus untuk pembuangan sampah dibuangnya di pinggir Sungai Malinau agar hanyut dengan air banjir.

9.4 Kondisi kesehatan masyarakat

Dalam 12 bulan terakhir lahir enam bayi, dengan berat badan antar 3 - 3,5 kg, dan tidak ada bayi yang meninggal. Juga tidak ada ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Tenaga Pos Obat Desa menyebutkan bahwa rata-rata ibu berusia 17 tahun pada saat kehamilan pertama. Angka dan penyebab kematian anak-anak pada usia 0 hingga 10 tahun dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13: Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun dalam 12 bulan terakhir di Desa Long Adiu

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 - 5 tahun	Tidak ada	-
6 - 10 tahun	Tidak ada	-

⁹ Tidak dikaitkan dengan meningkat penyakit seperti malaria.

Desa Long Adu

Dalam 12 bulan terakhir ada satu orang meninggal tapi tidak diketahui persis apa penyebabnya. Tenaga Pos Obat Desa tidak dapat memberikan informasi tentang penyakit dominan yang menyebabkan kematian atau usia rata-rata.

Desa Pelancau



Foto: Pemukiman Desa Pelancau

Profil Desa Pelancau

Jumlah rumah tangga: -	Jumlah jiwa: 276
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 39	Jumlah KK: 58
Suku mayoritas: Punan	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Yahya Laing	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Ipu Kre	Jumlah SLTP: 1
Nama Ketua BPD: Ibung Unyat	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 5 menit (jalan kaki)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 2 jam (taksi)	Jumlah Pusban: -
	Jumlah Polindes: -

PELANCAU¹⁰

1. Letak dan Lingkungan Desa

Desa Pelancau berada di lokasi Loreh yang terdiri dari empat desa, yaitu Pelancau, Bila Bekayuk, Long Loreh dan Sengayan. Sejak tahun 2002 Loreh merupakan ibukota Kecamatan Malinau Selatan. Pelancau terletak di pinggir Sungai Malinau, desa terdekat di hilir adalah Desa Long Adiu dan di Hulu Desa Langap. Jalan darat dari Malinau Kota ke lokasi Loreh tembus pada tahun 1996. Sebagian lahan perladangan terletak di pinggir jalan (sekitar 12 kilometer dari pemukiman) dan dijangkau dengan menumpang kendaraan perusahaan batu bara. Selain itu masyarakat Pelancau membuat ladang di seberang pemukiman sampai ke Sungai Sengayan (bagian hilirnya). Perusahaan PT. Bara Dinamika Muda Sukses mulai penambangannya pada tahun 1994 dan sejak tahun 2000 ada beberapa orang dari Pelancau yang bekerja di perusahaan pertambangan.

Masyarakat Pelancau hidup terbagi dalam 3 pemukiman: sekitar 50% dari warga Pelancau tinggal di lokasi Loreh, ada masyarakat Pelancau di Liu Mutai dan di Kuala Metut. Kedua pemukiman ini (Liu Mutai dan Kuala Metut) terletak di Hulu Sungai Malinau, dekat wilayah desa lama di mana masyarakat Pelancau tinggal hingga sekitar tahun 1966.

Jumlah penduduk di lokasi Loreh sekitar 1.200 jiwa (pada tahun 2003), sehingga areal yang telah dibuka untuk ladang cukup luas. Hutan rimba terdapat di lereng Gunung Sidi dan di Hulu Sungai Sengayan. Sebagian hutan pernah ditebang oleh HPH: bagian tengah Sungai Sengayan ditebang oleh PT. Barito sekitar tahun 1995, sedangkan PT. Inhutani II pada awal tahun 1990-an menebang hutan di daerah Sungai Samuda.

Di daerah perladangan masih terdapat pulau-pulau hutan rimba yang disisakan oleh masyarakat sebagai cadangan lahan perladangan maupun kebutuhan sehari-hari yang diperoleh dari hutan.

2. Sejarah Desa

Masyarakat Pelancau bergabung dengan Long Loreh dan Sengayan di lokasi Loreh pada tahun 1982. Sebelum pindah masyarakat Pelancau bermukim di Hulu Sungai Malinau, tepatnya di Bengawat.

Pada tahun 1999 lokasi Loreh dilandai banjir besar yang mengakibatkan 15 unit rumah penduduk Pelancau hanyut. Masyarakat juga mengalami kerugian rusak padi karena basah, dan rusak harta seperti guci dan mesin ketinting dan mesin tajak. Dalam diskusi kelompok masyarakat menyampaikan kekhawatiran akan terulang lagi dan niat untuk mulai membangun di tempat yang aman dari banjir. Namun mereka mengalami kesulitan karena tidak memiliki tempat perluasan pemukiman dekat pemukiman sekarang.

Pernah masyarakat mengalami bencana kekurangan makanan akibat serangan hama di ladang.

¹⁰ Informasi Desa Pelancau hanya meliputi warga Pelancau di lokasi Loreh.

3. Penduduk

Mayoritas masyarakat Pelancau berasal dari etnis Punan, namun sudah banyak orang dari kelompok etnis lain (Bugis, Bulungan, Kenyah, Lundaye, Sangir, Timor) menikah dengan orang Pelancau.

Ada dua orang Pelancau yang meninggalkan desa sementara untuk mengikuti pendidikan, sedangkan ada enam keluarga yang pindah ke desa lain dengan alasan untuk mendekati sekolah dan karena bencana banjir.

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga-lembaga yang ada di Desa Pelancau adalah:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Badan Perwakilan Desa sudah terbentuk pada bulan April 2003, namun karena SK belum diterbitkan selama ini BPD belum aktif.

4.1 Musyawarah

Musyawarah desa dalam 5 tahun terakhir ini semakin baik, mulai dari frekuensi, mutunya dan dampak keputusan.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Bantuan yang selama ini diterima oleh Desa Pelancau berupa dana Bantuan Desa (BanDes) yang diberikan tiap tahun. Program lain yang disebut oleh Kepala Desa adalah air bersih, perkebunan dan rehab rumah.

Responden kurang mampu mengatakan bahwa bantuan beras miskin selama ini mengecewakan. Menurutnya sebaiknya beras miskin diberi tanpa pungut bayaran.

Pihak lain yang pernah memberi bantuan kepada masyarakat Pelancau adalah PT. Wahana Yasa Kahuripan Indonesia (PT. WYKI) seperti *fee* per meter kubik, genset dan bangunan balai adat. LSM PLASMA pada tahun 2003 menyelenggarakan pelatihan pengolahan rotan untuk masyarakat Pelancau.

Permohonan yang sejak 1998 diajukan oleh desa Pelancau minta bantuan sarana air bersih, rehab rumah penduduk serta semenisasi jalan desa. Hingga November 2003 belum ada jawaban¹¹.

¹¹ Pada Maret 2004 sarana air bersih sudah dibuat.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Kunjungan dari staf Puskesmas rutin dilaksanakan lebih dari sekali sebulan. Kunjungan dari instansi pemerintah yang lain (disebut kecamatan dan Pemerintah Kabupaten) kurang dari sekali sebulan.

Menurut Kepala Desa hubungan dengan pemerintah dalam 5 tahun terakhir dinilai meningkat dari segi keterjangkauan (terutama kecamatan), pelayanan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dari segi kepedulian pemerintah dan keterbukaan dianggap masih seperti dulu.

Dalam wawancara rumah tangga 50% responden mengatakan bahwa frekuensi bertemu sejak 1998 tidak berubah. Sepertiga dari responden mengatakan tidak pernah punya urusan dengan pemerintah. Sepertiga responden tidak memberi tujuan jelas kalau bertemu dengan pemerintah, sedangkan yang lain menyebut tujuan utama bertemu adalah untuk minta informasi, mengajukan usulan atau minta menangani permasalahan. Responden cenderung untuk menilai hubungan tokoh masyarakat dengan pemerintah meningkat (50% dari responden), namun ketika ditanya tentang perhatian pemerintah untuk desa sepertiga mengatakan tidak ada peningkatan.

5.3 Sumber dan alat informasi

Sebagai satu-satunya sumber informasi tentang program pemerintah adalah kunjungan pemerintah. Di Desa Pelancau tidak ada alat komunikasi seperti radio atau telepon, tetapi informasi dari pemerintah kabupaten disampaikan ke kecamatan melalui radio SSB. Sehingga apabila ada kunjungan atau pertemuan biasanya semua desa di Loreh, termasuk Pelancau, dapat pemberitahuan tepat waktunya.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara

Upacara yang masih diikuti adalah pesta panen DAS Malinau yang diselenggarakan sekali dalam 2 tahun. Pada acara tersebut ditampilkan tarian tradisional. Kepala Adat mengatakan tujuan dan bahan acara mengalami perubahan dan waktu juga semakin singkat. Kerjasama dalam pelaksanaan acara menurutnya masih seperti dulu.

Menurut Kepala Adat kurang dari seperempat generasi muda tertarik dan berminat untuk mempelajari tentang pengetahuan tradisi. Pengetahuan masyarakat Pelancau berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan masih dimiliki oleh banyak warga Pelancau, karena masih sering masuk hutan untuk mencari gaharu. Pengetahuan kaum ibu tentang sumber daya hutan di wilayah desa lama semakin berkurang karena mereka tidak pernah lagi ke daerah sana sejak tahun 1982.

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Tingkat kerjasama antar masyarakat dalam 5 tahun terakhir tetap sama dan pada tahun 2003 masyarakat gotong royong untuk gedung gereja dan membuat ladang gembala, serta membersihkan di sekitar pemukiman. Sistem kerjasama lain adalah *senguyun* (kelompok kerja bergiliran) di ladang. Responden kurang mampu juga berpendapat bahwa tingkat kerjasama tidak berubah.

Desa Pelancau

Responden kurang mampu menjelaskan bahwa pada saat perlu bantuan mereka pernah dibantu oleh warga Pelancau yang lain. Kepala Adat mengatakan kalau warga Pelancau mengalami kekurangan pangan mereka tidak dapat bantuan dari siapa saja dan mengharapkan pedagang. Biasanya pedagang memberi beras pada masyarakat Pelancau dengan kredit dan harga yang lebih tinggi. Masyarakat yang pinjam beras mengembalikan pinjaman dalam bentuk gaharu. Biaya beras dipotong dari nilai hasil gaharu. Masyarakat Pelancau berada pada posisi tawar yang lemah: harga beras dinaikkan, kelas gaharu, harga gaharu ditentukan oleh pedagang.

6.3 Konflik

Baik Kepala Adat maupun responden kurang mampu menyebut bahwa ada konflik tentang kawasan hutan yang mau dibuka untuk ladang. Menurut Kepala Adat konflik tersebut sering terjadi dan semakin meningkat. Konflik lain adalah konflik keluarga tapi jarang terjadi. Konflik tentang sumber daya alam sering terjadi. Namun cenderung menurun, karena ada peraturan dan sudah diatur hak masing-masing.

Biasanya konflik baik di dalam desa maupun dengan pihak lain ditangani oleh lembaga adat. Apabila keputusan lembaga adat tidak dituruti kasus diserahkan ke pemerintah atau polisi. Kepala Adat mengatakan separuh dari konflik dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

6.4 Situasi umum orang miskin

Karena "...usaha tidak tetap dan hasilpun tidak lancar..." kondisi responden kurang mampu dalam 5 tahun terakhir semakin memburuk, menurutnya. Ketika ditanya mengenai kemampuan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, makanan atau uang, dijawab tidak mampu. Untuk pendidikan telah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa seragam sekolah. Untuk kebutuhan biaya berobat pernah dibantu dari kas desa. Permasalahan makanan terbantu oleh 'beras miskin'. Kalau ada kebutuhan uang dia bisa pinjam dengan 'bos gaharu' (pedagang yang memberi kredit untuk pencari gaharu). Pernah dia dapat bantuan dari warga lain tetapi tidak dijelaskan berupa apa.

Melihat kondisi seperti ini dia mengatakan bantuan yang dibutuhkan dari pihak luar adalah: biaya pendidikan, latihan usaha, biaya berobat dan bantuan beras gratis.

6.5 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di desa adalah:

- olah raga;
- televisi.

Pada tahun 2002 warga Pelancau membuat lapangan volley dengan lantai semen di pemukiman mereka. Sebelumnya mereka ikut di lapangan Loreh, tapi peluang main terbatas karena banyak peminat.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Kepala Desa hutan lindung merupakan tipe lahan yang paling luas di wilayah Pelancau. Hutan lindung terletak di wilayah desa lama di Hulu Sungai Malinau, kurang lebih 1 hari perjalanan dengan ketinting. Pemanfaatan hutan lindung dikhususkan untuk mencari gaharu dan sudah ditetapkan sanksi untuk orang luar apabila mereka masuk hutan lindung tanpa izin. Namun masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menegakkan peraturan ini.

Dulu ada kesepakatan pembagian wilayah lokasi Loreh antar ke-empat desa. Sejak IPPK mulai beroperasi kesepakatan ini tidak jelas lagi, sehingga status bagian hutan yang dulu diserahkan ke masyarakat Pelancau tidak jelas dan telah sebagian digarap oleh IPPK.

Hutan yang terdapat di wilayah desa lama sebagian digarap oleh PT. WYKI, sebagai imbalan untuk pembuatan jalan umum dari Hulu Sungai Malinau ke Long Alango (Kec. Pujungan).

Menurut Kepala Desa jenis tata guna lahan yang ada di lokasi Loreh adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun buah-buahan;
- kebun kokoa;
- kebun kopi;
- kebun ubi kayu.

Areal ladang dari tahun ke tahun bertambah karena masyarakat membuka rimba. Namun belakangan ini timbul permasalahan terutama di areal di pinggir jalan poros Malinau-Loreh karena perebutan sisa hutan. Sebagian warga ingin membuka hutan itu untuk ladang dan yang lain ingin melindungi hutan itu untuk kayu bahan bangunan. Untuk perluasan areal perladangan di daerah Sungai Sengayan selama ini masih diizinkan oleh Desa Sengayan. Sebenarnya ada areal yang bisa dikembangkan untuk sawah tetapi selama ini hanya sedikit digarap oleh masyarakat. Kebun buah-buahan bertambah tetapi jumlah masih sedikit. Dalam wawancara rumah tangga kadang-kadang disebut punya 5 sampai 10 pohon saja. Luasan kebun kokoa dan kopi berkurang. Kebun kokoa tidak dirawat lagi setelah terserang penyakit.

Menurut Kepala Desa jenis hutan dan lahan bera yang ada di Desa Pelancau adalah:

- hutan rimba (Bhs. Punan *luwang taong*);
- hutan sekunder tua, > 30 tahun (Bhs. Punan *balah*);
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun (Bhs. Punan *balah*);
- belukar tua, 5 - 10 tahun (Bhs. Punan *bai*);
- belukar, 2 -5 tahun (Bhs. Punan *bai*);
- hutan rawa (Bhs. Punan *panggih*);
- hutan kerangas (Bhs. Punan *bukut*).

Desa Pelancau

Menurut perkiraan Kepala Desa sekitar 80% wilayah Pelancau merupakan hutan rimba, dengan pengertian termasuk wilayah desa di Hulu Sungai Malinau. Luasan hutan sekunder tua tetap dan hanya terdapat di wilayah desa di hulu. Sedangkan hutan sekunder muda, yang luasnya juga tetap, ada di lokasi Loreh dan di hulu. Luasan belukar tua dan muda semakin bertambah karena masyarakat masih memperluas areal ladang dengan merimba.

Menurut Kepala Desa berkurangnya luas hutan sudah terjadi sebelum tahun 1990, namun tidak terlalu berpengaruh.

7.2 *Pengelolaan hutan dan IPPK*

Sekitar tahun 2001 pernah diajukan permohonan izin IPPK atas nama Desa Pelancau, namun tidak pernah diberi izin. Dari jawaban responden kurang mampu terlihat bahwa tidak semua masyarakat di desa terlibat dalam proses pengajuan IPPK.

Setelah perundingan (dan demo) masyarakat Pelancau akhirnya dapat pembayaran *fee* dari PT. WYKI selaku perusahaan pembuatan jalan umum, yang menebang kayu di wilayah Pelancau. *Fee* dibagi kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di lokasi Loreh, maupun di Liu Mutai dan Kuala Metut. Selain *fee* dapat sebuah genset dan bangunan balai adat.

Seperti dijelaskan di atas, hutan di wilayah desa lama ditetapkan sebagai 'hutan lindung' oleh masyarakat Pelancau. Pemanfaatan sumber daya hutan seperti gaharu ingin dikhususkan untuk warga Pelancau. Tapi selama ini mereka masih mengalami kesulitan dalam penegakan aturan ini.

7.3 *Keterjangkauan terhadap lahan*

Ketika ditanya tentang keterjangkauan lahan pertanian, Kepala Desa mengatakan seluruh rumah tangga memiliki lahan, namun luas lahan yang dimiliki setiap keluarga belum cukup. Bahkan karena masih ada rumah tangga Pelancau yang pindah dari pemukiman di hulu ke lokasi Loreh sehingga mereka belum memiliki lahan sendiri. Karena masyarakat berladang gilir balik kebutuhan lahan untuk rotasi cukup tinggi. Dalam 5 tahun terakhir akses masyarakat terhadap lahan meningkat. Praktek jual beli lahan belum terjadi.

7.4 *Perladangan*

Lokasi perladangan masyarakat Pelancau di pinggir jalan poros ke Malinau Kota terletak 12 km dari pemukiman. Walaupun ada kendaraan perusahaan tambang antar jemput banyak waktu terbuang untuk perjalanan. Rata-rata masyarakat baru sampai di ladang lewat pukul 10.00. Kadang-kadang transportasi ke ladang tidak lancar, misalnya kalau hujan *dumptruck* tidak bisa mengantar.

Melihat kondisi seperti ini sebagian warga Pelancau lebih memilih buka ladang di bagian hilir Sungai Sengayan karena dapat ditempuh dengan jalan kaki sekitar ½ sampai 1 jam.

Berdasarkan wawancara rumah tangga lahan perladangan terbatas. Untuk ladang, tahun 2003, 50% dari responden rumah tangga pinjam lahan atau sebagian lahan dipinjam.

Hanya dua (dari sembilan belas responden rumah tangga) mengatakan hasil ladang cukup untuk kebutuhan beras selama 1 tahun. Sebelas rumah tangga dapat

Desa Pelancau

hasil ladang cukup untuk kebutuhan selama 7 - 10 bulan dan empat rumah tangga hanya dapat cukup untuk 4 - 5 bulan. Separuh rumah tangga menutupi kekurangan beras dengan membeli di warung. Selain itu ada empat rumah tangga yang selain membeli di warung juga mendapat 'beras miskin' dan tiga rumah tangga membeli sebagian beras dan sebagian dikredit dengan 'bos gaharu'.

7.5 Pendapatan uang

Masyarakat Pelancau masih sangat tergantung pada usaha mencari gaharu, hampir 70% responden rumah tangga menyebut *ngusah* (mencari gaharu) sebagai usaha utama. Walaupun mereka sadar semakin sulit dicari belum dikembangkan usaha yang lain. Selama PT. WYKI beroperasi, masyarakat dapat *fee* yang oleh 50% responden rumah tangga dianggap penting untuk ekonomi rumah tangga. 50% responden lain mengatakan tidak penting, karena mereka menganggap pembayaran *fee* tidak akan berlangsung terus. Karena Pelancau terletak di lokasi besar, ada beberapa orang yang punya usaha lain: ada dua orang menggesek kayu bangunan, satu orang mengangkut bahan bangunan, satu orang kerja bangunan, dan satu orang menyebut *fee* dari PT. WYKI sebagai sumber pendapatan utama (dan mencari gaharu sebagai usaha kedua yang penting).

Operasi pertambangan, yang semakin besar, membuka peluang untuk beberapa usaha baru: menjual kerajinan rotan (terutama anjat), menjual daging babi hutan, membuka kios, menjual ternak, sayur dan padi. Hampir 50% responden menyebut menjual kerajinan rotan sebagai usaha baru dan sepertiga menyebutkan menjual daging babi hutan. Namun usaha ini tidak memberi hasil kontinyu, dan setelah bulan Agustus 2003 kontraktor tambang batu bara tidak beroperasi, pasar jadi sangat terbatas. Selain jumlah karyawan dari luar yang menetap di Loreh berkurang, penghasilan masyarakat di Loreh juga berkurang sehingga cenderung mengurangi pengeluaran.

7.6 Kondisi rumah penduduk

Sejak beberapa orang dapat bekerja di perusahaan tambang batu bara (tahun 2000) dan masyarakat memperoleh *fee* dari PT. WYKI, jumlah rumah baru atau rumah yang diperbaiki meningkat. Perbedaan rumah antar warga cukup besar: ada warga yang masih pakai rumah yang dibangun oleh Departemen Sosial pada tahun 1982 (dengan ukuran 4 x 6 m) dan ada warga yang sudah dapat membangun rumah dengan ukuran 8 x 12 meter. Mutu rendah sebagian rumah tidak hanya akibat kurang mampunya rumah tangga tersebut, tetapi sebagian juga karena pandangan rumah tangga terhadap prioritas berbeda. Sebagai contoh ada rumah yang kelihatan akan roboh, tetapi di dalamnya ada televisi.

Semua rumah di Pelancau beratap seng dan lantai dan dinding terbuat dari papan meranti dan sejenisnya. Dari sembilan belas responden rumah tangga, hanya dua punya WC di dalam rumah dan yang lain tidak memiliki WC. Desa Pelancau, dan 3 desa lain di Loreh, dapat aliran listrik dari PT. Bara Dinamika Muda Sukses. Tetapi kekuatan mesin tidak cukup untuk kebutuhan seluruh lokasi Loreh. Di antara warga Pelancau ada sistem listrik kelompok, di mana beberapa orang yang memiliki genset pribadi (tiga dari sembilan belas responden rumah tangga) menyambung ke beberapa tetangganya. Sehingga dari sembilan belas responden rumah tangga hanya satu rumah yang tidak mempunyai listrik.

Desa Pelancau

7.7 Infrastruktur ekonomi

Pernah dibuat bangunan pasar di lokasi Loreh tetapi selama ini tidak berfungsi. Orang lebih cenderung berjualan keliling (misalnya sayur, ikan atau daging). Ada beberapa pedagang yang kadang-kadang memborong hasil pertanian seperti tandan pisang atau buah kelapa tua untuk kemudian dijual kembali. Pada akhir tahun 2003 dimulai pembangunan pasar baru di Loreh.

Sejak perusahaan tambang batu bara beroperasi, transportasi darat dari Loreh ke Malinau semakin lancar dan biaya transportasi menurun. Bahkan masyarakat dalam jumlah terbatas boleh menumpang cuma-cuma di *hauling truck* ke Malinau Kota.

Selama ini belum ada lembaga keuangan, seperti bank atau *credit union*, di Loreh. Pernah ada pertemuan penjelasan tentang *credit union*, namun belum ada banyak anggota sehingga belum dibuka tempat pelayanan *credit union* di Loreh.

7.8 Keterjangkauan energi

Sumber energi yang digunakan di Desa Pelancau adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- listrik.

Kayu bakar sudah lama digunakan dan masih banyak tersedia di sekitar Pelancau. Minyak tanah baru mulai digunakan dan karena transportasi dari Malinau Kota lancar, ketersediaan cukup terjangkau. Menurut Kepala Desa minyak tanah masih terjangkau. Listrik untuk penerangan di desa sudah digunakan selama beberapa tahun. Namun semakin sulit terjangkau, karena listrik dari PT. BDMS tidak lancar dan cukup kuat, sedangkan harga solar untuk genset pribadi semakin naik.

8. Pendidikan

8.1 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di Pelancau sendiri tidak ada gedung sekolah dan anak Pelancau ikut SD yang terletak di pemukiman Long Loreh. Di pemukiman di Liu Mutai dan Kuala Metut (warga Pelancau yang tinggal di hulu) tidak ada fasilitas sekolah sama sekali. Fasilitas terdekat berada di Sungai Uli sekitar 30 menit dengan ketinting dari Liu Mutai.

Di lokasi Loreh ada SD dan SMP. Karena tidak ada TK sebagian anak yang seharusnya masuk TK ikut di kelas 1 SD atas kebijaksanaan Kepala SD. Walaupun sudah ada SMP di lokasi Loreh ada beberapa murid masuk SMP di Malinau Kota. Untuk tingkat SMU ada anak yang sekolah di Malinau Kota dan di Tarakan dan untuk perguruan tinggi ada anak yang sekolah di Samarinda, Banjarmasin, Makasar, Bogor dan Bandung. Tapi untuk masyarakat Pelancau belum ada anak yang sekolah SMU atau masuk ke perguruan tinggi.

Jumlah sekolah di lokasi Loreh bertambah dengan dibangunnya SMP pada tahun 2001. Kondisi gedung SD menurun karena selama ini tidak ada perawatan. Dari segi alat dan buku serta jumlah tenaga guru, ada peningkatan dalam 5 tahun terakhir, sedangkan gaji guru masih sama. Walaupun ada peningkatan pengadaan buku, menurut

Desa Pelancau

Kepala Sekolah jumlah buku belum cukup untuk semua murid. Dukungan lain yang diterima adalah beasiswa sebesar Rp 60.000 per semester per anak untuk 40 murid.

8.2 Mutu pendidikan

Kepala Sekolah merasa bahwa mutu pendidikan dalam 5 tahun terakhir ini meningkat dalam semua aspek: Tingkat pendidikan guru, keaktifan guru, persentase kelulusan murid, dan tingkat orang yang bisa membaca dan menulis. Mengenai persentase kelulusan sejak beberapa tahun sudah mencapai 100%, namun nilai NEM masih meningkat.

Menurut Kepala Sekolah hanya sedikit anak yang membolos dan tanpa alasan yang jelas. Dalam diskusi kelompok terungkap bahwa menurut masyarakat Pelancau sebagian anak mereka merasa 'minder', sehingga pada jam sekolah mereka berangkat dari rumah pakai seragam sekolah, tapi di tengah jalan belok dan bermain bersama teman. Dalam kelompok diskusi dikatakan sebaiknya ada sekolah sendiri di Pelancau.

Masih ada anak putus sekolah (tidak disebut jumlah). Menurut Kepala Sekolah salah satu faktor penyebabnya adalah kurang perhatian atau dorongan dari orang tua. Sedangkan dalam diskusi kelompok di Pelancau masyarakat mengungkapkan motivasi anak-anak kadang-kadang kurang, walaupun orang tua berusaha mendorong mereka supaya sekolah.

9. Kesehatan

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Puskesmas di lokasi Loreh dibangun pada tahun 2001 dengan fasilitas yang cukup lengkap, termasuk dua orang dokter dan 1 unit ambulans untuk mengantar pasien ke Malinau Kota. Gedung Puskesmas terbuat dari beton dan sudah ada 1 unit rumah dinas. Dari segi jarak fasilitas kesehatan masih seperti 5 tahun yang lalu (15 menit jalan kaki), namun dari segi kelengkapan gedung, staf dan obat ada peningkatan yang besar.

Walaupun jumlah ahli obat tradisional dan pelaksanaan pengobatan tradisional semakin berkurang menurut Kepala Adat frekuensi pengobatan tradisional masih lebih dari sekali seminggu. Biaya pengobatan tergantung pada dampak pengobatan; kalau sembuh, ahli pengobatan diberi guci, tapi kalau tidak sembuh tidak ada ketentuan berapa harus dibayar.

9.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih warga Pelancau dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada Tabel 14.

Desa Pelancau

Tabel 14: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Pelancau.

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Mengapa	Perubahan Mutu	Mengapa
Sungai	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	-	Turun	Sampah dari bagian hulu sangkut di tepian Pelancau
Hujan	Bisa dijangkau oleh separuh masyarakat	Tidak berubah selama ini	Tidak semua orang punya drum	Sama	-

Sebenarnya ada instalasi air bersih yang dibuat oleh PT. BDMS, namun selama ini air tidak pernah mengalir sampai ke pemukiman Pelancau yang terletak di bagian paling hilir dan rendah di lokasi Loreh¹².

9.3 Kebersihan lingkungan

Jalan desa yang sudah disemen akhir-akhir ini rusak karena sering dilewati taksi. Akibatnya jalan desa jadi becek kembali. Kesadaran sebagian masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan masih kurang.

9.4 Kondisi kesehatan masyarakat

Dalam 12 bulan terakhir ada 4 anak lahir, dan ada dua anak yang meninggal pada saat lahir. Berat rata-rata bayi yang baru lahir antara 2 - 3 kg. Sebagian bayi tidak ditimbang karena lahir di rumah dan bidan kampung tidak punya alat timbang khusus. Ketika ditanya tentang umur Ibu pada saat kehamilan pertama dijawab usia 18 tahun, namun ditambah "ada yang baru 14 -15 tahun sudah hamil". Dalam 1 tahun terakhir tidak ada ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Angka dan penyebab kematian anak-anak pada usia 0 hingga 10 tahun di Pelancau dapat lihat pada tabel 15.

Tabel 15: Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Pelancau dalam 12 bulan terakhir

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 - 5 tahun	Tidak ada	-
6 - 10 tahun	Tidak ada	-

Dalam 12 bulan terakhir ada tiga orang yang meninggal. Penyebab utama kematian adalah penyakit kanker. Umur rata-rata orang yang meninggal karena penyakit atau lanjut usia diperkirakan 60 tahun.

¹² Pada bulan Maret 2004 Desa Pelancau sudah punya sarana air bersih sendiri.

Desa Halanga



Foto: Sekolah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat Desa Halanga di Ngkah Lipi

Profil Desa Halanga

Jumlah rumah tangga: -	Jumlah jiwa: 192
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 21	Jumlah KK: 22
Suku mayoritas: Punan	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Irang Usat	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Ipo Boy	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: Belum	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 1 jam (ketinting)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 1 jam (ketinting) + 2 jam (taksi)	Jumlah Pusban: -
	Jumlah Polindes: -

HALANGA

1. Letak dan Lingkungan Desa

Halanga berada di Kecamatan Malinau Selatan dan terletak di pinggir Sungai Ran, anak Sungai Malinau. Desa terdekat di hilir adalah Laban Nyarit, sekitar 1 jam dengan ketinting dan Desa Mirau/Long Rat berada di sebelah hulunya, sekitar 2 jam mudik dengan ketinting.

Pemukiman Halanga di *Ngkah Lipi* dikelilingi hutan rimba yang lebat dan tempat datar untuk pemukiman agak terbatas. Lahan perladangan, dekat Halanga sebagian besar berbukit-bukit.

2. Sejarah Desa

Desa Halanga baru pindah ke *Ngkah Lipi* pada tahun 2003. Sebelumnya, sejak tahun 2000 mereka bermukim sedikit ke hulu, di dekat Kuala Sungai Hong. Masyarakat Halanga berasal dari daerah Sungai Tubu dan pada tahun 1990 bergabung dengan Desa Laban Nyarit (dibantu dengan perumahan oleh Departemen Sosial).

Bencana yang terjadi dalam 10 tahun terakhir adalah serangan hama yang mengakibatkan hasil ladang berkurang serta "kelaparan semakin meningkat." Dimaksud persediaan padi berkurang, karena selain padi, masyarakat menggunakan ubi kayu, pisang dan sagu untuk makanan pokok.

3. Penduduk

Seluruh masyarakat Halanga berasal dari etnis Punan, dan ada beberapa orang Punan dari desa lain yang ikut menetap di Halanga karena pernikahan dengan orang Halanga. Jumlah penduduk menurut sensus P4B (tahun 2003) 192 jiwa.

Ada dua keluarga yang sementara meninggalkan Halanga dengan alasan pendidikan untuk anak dan tidak ada warga yang pindah dari Halanga.

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga-lembaga yang ada di desa adalah:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Desa;
- Lembaga Ketahanan Desa.

Ketika ditanya tentang Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Kepala Desa mengatakan sudah diganti oleh BPD. Di Halanga ada kelompok tani dan dulu ada

Desa Halanga

koperasi tapi “sudah habis” (maksudnya jualan sembako sudah habis dan tidak ada kegiatan lain yang dijalankan oleh koperasi).

BPD terbentuk pada bulan April 2003, namun BPD belum berfungsi karena belum ada SK. BPD selama ini hanya sekali mengadakan musyawarah untuk memilih pengurus. Di sisi lain Kepala Desa mengatakan BPD mengadakan konsultasi dengan masyarakat desa sekali sebulan.

4.1 Musyawarah

Dalam 5 tahun terakhir mutu musyawarah meningkat, frekuensi juga meningkat dan keputusan lebih berdampak dan dipatuhi. Kepala Desa memberi komentar bahwa hanya orang yang sudah lanjut usia yang tidak mematuhi keputusan musyawarah.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Setelah pindah dari Laban Nyarit masyarakat Halanga sudah mengajukan beberapa usulan berkaitan dengan pembangunan desa; semenisasi jalan desa sepanjang 1.500 meter, pembangunan balai adat (18 x 8 meter), perataan lokasi untuk perluasan pemukiman dan pembangunan gedung SD. Selama ini satupun usulan belum ada jawaban. Maka dianggap bantuan dari pemerintah dalam 5 tahun terakhir sama, karena belum pernah dapat bantuan.

Pada tahun 2003 Desa Halanga telah mendapat bantuan berupa 5 unit rumah. Selain itu tiap tahun mendapat uang Bangdes. Masyarakat Halanga mendapat bantuan beras miskin, walaupun dikatakan tidak dapat sepenuhnya. Pihak lain yang pernah membantu adalah perusahaan yang memberi atap seng dan mesin ketinting.

Responden kurang mampu menyebut bantuan yang pernah diterima adalah pembuatan rumah, namun mengecewakan karena tidak sesuai janji. Menurutnyanya dijanjikan 10 buah rumah dengan ukuran 6 x 8 meter. Rumah yang telah dibangun hanya berjumlah 5 unit dengan ukuran 5 x 6 meter.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Kepala Desa, Staf Kecamatan mengadakan kunjungan sekali sebulan ke Halanga, sedangkan Staf Puskesmas “selama ini” (sejak pindah ke *Ngkah Lipi*) 5 kali berkunjung.

Hubungan dengan Pemda dalam 5 tahun terakhir dinilai semakin baik. Keterjangkauan dari sisi jarak menjadi lebih baik terutama dengan terbentuknya Kecamatan Malinau Selatan. Selain itu kepedulian dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dianggap lebih baik.

Di satu sisi masyarakat Halanga mengeluh tidak pernah mendapat bantuan dan mengeluh tentang kebijakan pemerintah untuk menggabungkan desa. Namun di sisi lain mereka senang karena sejak pindah ke *Ngkah Lipi* mereka sudah mendapat bantuan dari kecamatan berupa 5 unit rumah.

Wawancara rumah tangga menunjukkan bahwa 50% dari responden tidak pernah berurusan dengan pemerintah, sedangkan 50% lain mengatakan dalam 5 tahun terakhir

Desa Halanga

lebih sering bertemu dengan pemerintah. Tujuan utama bertemu dengan pemerintah adalah untuk mengajukan usulan. Mereka juga berpendapat bahwa perhatian pemerintah meningkat, karena ada lebih banyak proyek pembangunan.

5.3 Sumber dan alat informasi

Informasi tentang program pemerintah diperoleh melalui kunjungan pemerintah dan pengumuman. Kepala Desa Halanga termasuk sangat aktif dalam berkunjung ke kantor kecamatan dan dinas di tingkat kabupaten, sehingga dapat informasi dari kunjungan ke kantor pemerintah. Di Desa Halanga tidak ada alat komunikasi seperti radio.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Upacara adat yang masih dilaksanakan adalah upacara pada saat pindah ke lokasi baru. Pada saat itu dipotong babi dan ayam dan minum *pengasih* (air tape yang diminum dari guci). Dari segi waktu dan bahan pelaksanaan, upacara ini masih sama tapi tujuan sudah berubah. Gotong royong dalam pelaksanaan upacara semakin lemah.

Menurut Kepala Desa kurang dari seperempat generasi muda tertarik dan berminat untuk mempelajari tentang pengetahuan tradisi. Pengetahuan masyarakat Halanga berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan masih dimiliki oleh banyak warga, karena sering masuk hutan untuk mencari gaharu dan hasil hutan lain.

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Desa semangat untuk gotong royong meningkat setelah masyarakat pindah dari Laban Nyarit. Bentuk gotong royong tersebut yakni membangun rumah, kerja ladang sidang (untuk gereja) dan *senguyun* (kerja bergiliran di ladang). Bentuk kerjasama lain yang diamati selama di Halanga adalah pembagian hasil buruan antar keluarga tanpa bayar. Responden kurang mampu berpendapat bahwa kerjasama dalam 5 tahun terakhir meningkat.

6.3 Konflik

Selama ini Desa Halanga punya konflik dengan Desa Laban Nyarit mengenai batas wilayah dan status lahan. Sudah ada beberapa upaya, termasuk oleh Camat Malinau Selatan untuk menyelesaikan. Namun ketika ditanya, konflik lahan tetap disebut, walaupun frekuensinya rendah. Konflik lain adalah konflik keluarga yang menurut responden kurang mampu tidak terlalu menonjol karena sekarang sudah ada lembaga adat untuk menangani hal tersebut. Ketika ditanya tentang konflik suku dijawab: "Tidak ada karena semua masyarakat Halanga adalah suku Punan." Menurut responden kurang mampu jumlah konflik cenderung menurun.

Apabila ada konflik, baik di dalam desa maupun dengan pihak luar diselesaikan melalui adat. Sebagai langkah pertama dalam konflik dengan pihak luar, ada pendekatan secara kekeluargaan. Kalau tidak dapat diselesaikan oleh lembaga adat, diurus oleh hukum negara dengan melibatkan camat. Menurut Kepala Adat, separuh kasus dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

Desa Halanga

6.4 Situasi umum orang miskin

Responden kurang mampu merasa bahwa kondisi membaik setelah pindah dari Laban Nyarit. Di satu sisi perpindahan masyarakat Halanga mungkin mengurangi ketegangan karena hidup di tempat yang berjauhan. Dampak lain adalah bahwa masyarakat Halanga lebih bebas membuka lahan dan hidup dekat ladangnya. Semasa masih bergabung di Laban Nyarit, masyarakat Halanga membuat ladang jauh dari pemukiman Laban Nyarit karena areal di sekitar pemukiman milik masyarakat Laban Nyarit.

Untuk kebutuhan makan mereka mampu mencari dan selama ini tidak pernah dibantu. Dengan adanya bantuan kartu sehat (yang membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu) responden mampu mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi disinggung bahwa pembagian kartu sehat terbatas, sehingga banyak anggota masyarakat lain mengeluh bahwa mereka tidak punya biaya untuk berobat. Responden mengatakan tidak mampu mendapatkan pendidikan untuk anaknya, walaupun sudah ada bantuan baju seragam. Responden mengalami kesulitan mendapatkan uang dan kalau perlu meminjam uang dari kas desa. Bantuan yang diharapkan adalah untuk pembuatan kebun kopi dan jati.

6.5 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di desa adalah:

- menari;
- olah raga;
- cerita dongeng.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Kepala Desa, jenis tata guna lahan yang ada di Desa Halanga adalah:

- ladang;
- kebun sayur;
- kebun buah-buahan;
- kebun kokoa;
- hutan.

Selama ini belum ada kejelasan tentang batas wilayah desa antara Halanga dan Laban Nyarit, sehingga ada sebagian daerah tumpang tindih. Untuk wilayah yang oleh masyarakat Halanga diakui sebagai wilayah desanya tutupan dengan hutan rimba masih luas. Luas semua tipe tata guna lahan dalam 5 tahun terakhir semakin bertambah kecuali areal kebun kokoa yang berkurang karena setelah kena penyakit tidak dirawat.

Desa Halanga

Menurut Kepala Desa jenis hutan dan lahan bera yang ada di Desa Halanga adalah:

- hutan rimba (Bhs. Punan *tuang*);
- hutan sekunder tua, > 30 tahun (Bhs. Punan *bala token*);
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun (Bhs. Punan *balah*);
- belukar tua, 5 - 10 tahun (Bhs. Punan *balah uyung*);
- belukar, 2 -5 tahun (Bhs. Punan *bañ*);
- hutan rawa (Bhs. Punan *pangkah*).

Kepala Desa mengatakan bahwa sejak 1999 luas hutan rimba bertambah. Namun tidak ada keterangan tentang sebabnya. Menurutnya luas hutan sekunder tua dan muda berkurang, sedangkan belukar tua dan belukar muda bertambah.

Ketika ditanya tentang perubahan terhadap hutan sebelum tahun 1990, dikatakan bahwa tidak ada pengaruh terhadap luasan hutan maupun jumlah binatang. Dengan adanya jalan perusahaan akses masyarakat untuk *ngusah* (mencari gaharu) dan *muvt* (mencari buah dan binatang buruan) lebih mudah.

7.2 Keterjangkauan terhadap lahan

Selama ini masyarakat Halanga tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh lahan dan semua rumah tangga memiliki lahan pertanian. Praktek jual beli lahan belum terjadi.

7.3 Perladangan

Lahan untuk berladang banyak terdapat di sekitar pemukiman Halanga. Untuk ladang, pada tahun 2003, rata-rata masyarakat membuka rimba yang dekat dengan pemukiman sehingga terjangkau dengan 5 menit jalan kaki. Sebagian besar lahan berbukit-bukit. Pertumbuhan padi di ladang kelihatan cukup baik, masyarakat hanya mengeluh tentang hama seperti babi hutan, rusa dan monyet yang mengganggu ladang.

Informasi wawancara rumah tangga menggambarkan bahwa hasil ladang masyarakat Halanga kecil. Ada satu orang menanam padi sampai 13 kaleng bibit (biasanya dihitung 3 kaleng bibit untuk 1 hektar) dan hasil ladang hanya cukup untuk 6 bulan. Dari sepuluh responden rumah tangga satupun tidak dapat hasil ladang yang cukup untuk kebutuhan selama 1 tahun. Dari sembilan responden yang membuat ladang, enam mempunyai persediaan padi yang cukup untuk sekitar 6 bulan. Tambahan beras dibeli di warung (tujuh rumah tangga) dan dua rumah tangga membeli sebagian dan mendapat 'beras miskin'. Satu responden mengatakan tidak bisa mendapat tambahan dan menggunakan bahan makanan lain seperti ubi kayu, pisang atau sagu.

7.4 Pendapatan uang

Usaha utama masyarakat Halanga adalah mencari gaharu (delapan dari sepuluh responden). Hanya satu orang duda dan satu keluarga lain yang berjualan ayam sebagai usaha utama. Selama ada banyak karyawan perusahaan tambang batu bara di Loreh, beberapa anggota masyarakat Halanga sering datang menjual daging babi hutan, ikan, buah dan kerajinan rotan.

Desa Halanga

Menurut Kepala Desa kondisi ekonomi masyarakat Halanga dalam 5 tahun terakhir tidak berubah. Perkembangan ekonomi menurutnya “tergantung dari usaha masyarakat.” Responden kurang mampu mengatakan kondisinya semakin baik dalam 5 tahun terakhir. (lihat bagian *Situasi umum orang miskin* di atas).

6.6 *Pengelolaan hutan dan IPPK*

Walaupun masyarakat pernah mencoba mendapatkan izin IPPK, tidak pernah ada IPPK beroperasi di wilayah Halanga. Pengambilan keputusan untuk mengajukan IPPK dilakukan oleh Kepala Desa bersama Kepala Adat. Selain itu ada juga orang dari luar yang pernah menghubungi masyarakat Halanga dan menawarkan kerjasama untuk menggarap hutan.

6.7 *Kondisi rumah penduduk*

Di pemukiman Halanga di *Ngkah Lipi* perbedaan antar rumah warga relatif besar: ada enam buah rumah yang dibangun dengan bantuan dari pemerintah, yang cukup permanen. Satu buah rumah dihuni oleh kepala desa, sekaligus digunakan untuk menampung tamu atau mengadakan pertemuan desa (ukuran 6 x 9 meter, dengan atap seng). Lima buah rumah dengan ukuran 5 x 6 meter juga cukup permanen. Enam belas rumah penduduk lain terbuat dari kayu bulat, sebagian besar lantai dan dindingnya dibuat dari bambu dan atap daun. Ukuran rumah-rumah ini bervariasi dari sekitar 5 x 6 meter sampai 2,5 x 4 meter.

8. Pendidikan

8.1 *Infrastruktur dan pelayanan pendidikan*

Setelah masyarakat Halanga pindah dari Laban Nyarit ke *Ngkah Lipi* tidak ada fasilitas sekolah. Ada usaha masyarakat untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak. Masyarakat sedang membangun sebuah gedung sekolah sederhana, tiang terbuat dari kayu bulat, berlantai tanah dan beratap daun. Yayasan Adat Punan telah mendatangkan 1 tenaga pengajar, dan honorinya dibayar oleh orang tua murid. Kesulitan yang diangkat dalam diskusi kelompok adalah bahwa guru tidak menetap di tempat. Namun kemungkinan besar honor guru tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya sehingga perlu mencari tambahan. Misalnya pada saat disurvei, guru ikut rombongan mencari gaharu selama liburan sekolah.

Di Halanga ada 70 anak usia sekolah, tapi hanya 24 yang aktif sekolah. Alasan utama banyak anak tidak sekolah karena kurang motivasi (malas) sehingga ikut ke ladang. Bagi anak-anak yang pernah sekolah di Laban Nyarit tetapi akhirnya putus sekolah juga dikatakan akibat kurang motivasi.

9. Kesehatan

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Halanga tidak ada fasilitas atau tenaga kesehatan. Di Laban Nyarit ada tenaga mantri, namun dikatakan masyarakat lebih cenderung pergi ke Long Loreh untuk berobat. Perjalanan ke Long Loreh memerlukan sekitar 1 jam dengan ketinting dengan biaya sekitar Rp 25.000. Karena masyarakat Halanga pindah dari Laban Nyarit ke Ngkah Lipi, maka keterjangkauan terhadap fasilitas kesehatan selama 5 tahun terakhir menurun.

Pengetahuan pengobatan tradisional masih dimiliki oleh sebagian masyarakat, tetapi jumlah ahli semakin berkurang. Upacara pengobatan tradisional sekarang dilaksanakan kurang dari sekali sebulan dan dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun. Biaya untuk upacara pengobatan diperkirakan Rp 50.000 sampai Rp 100.000 untuk bahan dan perlu menyiapkan ayam.

9.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih warga Halanga dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Halanga

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Mengapa	Perubahan Mutu	Mengapa
Sungai	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	-	Menurun	Karena perusahaan kayu beroperasi di hulu
Hujan	Bisa dijangkau oleh separuh masyarakat	Tidak berubah selama ini	Tidak semua orang punya drum	-	-

9.3 Kebersihan lingkungan

Pada saat dilakukan survei, lingkungan pemukiman kurang terawat, misalnya sampah plastik berhamburan di sekitar rumah. Tetapi pada saat kunjungan pertengahan Januari 2004, seluruh pemukiman di rumput dan sampah-sampah tidak terlihat lagi.

9.4 Kondisi kesehatan masyarakat

Dalam 12 bulan terakhir ada delapan bayi lahir dan ada tiga bayi yang meninggal pada saat kelahiran. Berat badan tidak diketahui karena tidak ada alat untuk menimbang bayi. Angka dan penyebab kematian anak-anak pada usia 0 hingga 10 tahun di Desa Halanga dapat dilihat pada Tabel 17.

Desa Halanga

Tabel 17: Jumlah dan penyebab kematian anak-anak berusia di bawah 10 tahun di Desa Halanga dalam 12 bulan terakhir

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 - 5 tahun	4 orang	Demam
6 - 10 tahun	Tidak ada	-

Menurut Kepala Desa, umur rata-rata ibu pada saat kehamilan pertama sekitar 19 tahun. Dalam tahun terakhir ada 1 ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Selain ibu yang meninggal pada saat melahirkan, tidak ada orang dewasa meninggal dalam tahun terakhir. Penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian adalah penyakit paru-paru (TBC) dan penyakit jantung. Pada saat hal tersebut ditanyakan, dijawab tidak ada masyarakat Halanga yang kena penyakit TBC. Umur rata-rata orang yang meninggal karena penyakit atau lanjut usia diperkirakan 50 tahun.

Desa Long Lame

Desa Long Lame



Foto: Sebuah rumah di Desa Long Lame

Profil Desa Long Lame

Jumlah rumah tangga: 38	Jumlah jiwa: 171
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 30	Jumlah KK: 37
Suku mayoritas: Punan	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Yamos Ncuk	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Tidak diketahui	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: Siki Ukan	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 30 menit (ketinting)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 30 menit ketinting + 45 menit terbang atau 2 hari (<i>longboat</i> + 2 x speedboat)	Jumlah Pusban: -
	Jumlah Polindes: -

LONG LAME

1. Letak dan Lingkungan Desa

Masyarakat Desa Long Lame sejak 5 tahun bergabung di pemukiman Long Aran. Long Aran terletak di pinggir Sungai Bahau sekitar 30 menit di hilir dari Long Pujungan, ibukota Kecamatan Pujungan. Ke arah hilir tidak ada desa lain sampai ke Kuala Sungai Bahau dengan Sungai Kayan (sekitar setengah hari milir dengan *longboat*). Lahan di sekitar Long Aran berbukit-bukit dan sebagian lereng cukup terjal.

Sejak pertengahan tahun 1990-an perusahaan HPH mulai beroperasi dekat pemukiman Long Aran (PT. Sarana Trirasa Bhakti dan PT. Rangga Kesuma).

2. Sejarah Desa

Desa Long Lame pindah dari pemukiman di Sungai Lame ke Desa Long Aran pada tahun 1998. Sekretaris Adat menceritakan bahwa masyarakat Long Lame berasal dari Sungai Silat, Anak Sungai Baram di Serawak, Malaysia. Karena terjadi perkelahian, mereka pindah ke daerah Sungai Bahau. Perpindahan dari pemukiman di Sungai Lame disebabkan karena terjadinya wabah kolera.

Dalam 10 tahun terakhir masyarakat mengalami beberapa musibah. Pada tahun 1989 terjadi wabah penyakit kolera. Pada tahun 1994 Long Lame dilandai banjir yang mengakibatkan rumah panjang hanyut dan kemudian sebagian masyarakat pindah ke Long Aran. Kekeringan pada tahun 1999 mengakibatkan masyarakat Long Lame mengalami kekurangan padi. Untuk mengatasi 'kelaparan' masyarakat Long Lame mencari sagu dan menjual parang. Pada tahun 2002 masyarakat Long Lame kembali mengalami kekurangan padi yang disebabkan oleh serangan hama.

3. Penduduk

Masyarakat Long Lame berasal dari Suku Penan Benalui.

3.1 *Perpindahan penduduk*

Menurut Sekretaris Desa, ada lima orang yang meninggalkan Desa Long Lame untuk sementara waktu, empat dengan alasan mencari pekerjaan dan satu karena mengikuti pendidikan. Dalam 5 tahun terakhir ada dua keluarga pindah dari Desa Long Lame karena dibujuk oleh keluarga di desa lain.

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga yang ada di Long Lame adalah:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Desa (BPD), menggantikan Lembaga Musyawarah Desa (LMD);
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- Kelompok Tani;
- Koperasi.

BPD terbentuk pada bulan Agustus 2003 dan selama ini mengadakan konsultasi dengan masyarakat sekali sebulan. Dalam musyawarah dibahas rencana pembangunan desa dan berdasarkan keputusan sudah dibuat 1 buah rumah untuk masyarakat. Dalam musyawarah dibahas untuk mengajukan permintaan bantuan kepada perusahaan kayu dan sudah berhasil mendapatkan sumbangan 1 drum minyak per bulan. BPD pernah mendiskusikan untuk minta sumbangan 2 unit ketinting dari PT. Sarana Trirasa Bhakti, namun belum ada realisasi. BPD bersama lembaga adat pernah membahas permasalahan perzinahan dan menetapkan denda sebesar Rp 1.000.000 untuk pihak laki-laki dan Rp 500.000 untuk pihak perempuan.

4.1 Musyawarah

Ketua BPD berpendapat bahwa dalam 5 tahun terakhir mutu, frekuensi dan dampak keputusan musyawarah desa meningkat.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Pemerintah telah memberi bantuan berupa proyek semenisasi, air bersih dan listrik desa untuk warga Long Lame. Selain itu pada tahun 2002 pemerintah memberi 5 unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan pada tahun 2003 ditambah 4 unit. Bantuan untuk pendidikan terdiri dari 2 unit rumah guru pada tahun 2001 - 2002, pembangunan gedung SD pada tahun 2002-2003, pakaian sekolah dan buku pada 2002, guru kontrak pada tahun 2002, dan beasiswa sebanyak Rp 25.000 per orang per bulan pada tahun 2003. Bantuan subsidi untuk biaya angkut sembilan bahan pokok (sembako) diberi setiap tahun.

Responden kurang mampu mengatakan masyarakat Long Lame pernah dibantu oleh PT. Sarana Trirasa Bhakti dengan pembuatan rumah panjang, namun bantuan tersebut tidak memuaskan. Bantuan mesin genset dan PLTS oleh pemerintah memuaskan karena masyarakat tidak perlu lagi membeli minyak. Bantuan untuk pembuatan rumah dinilai memuaskan; pemerintah memberi seng dan perusahaan memberi bantuan papan.

Desa Long Lame

Responden kurang mampu menyatakan bahwa bantuan rumah panjang tidak cukup karena ada dua sampai tiga kepala keluarga per pintu/bilik. Menurutnya lebih baik dibangun rumah tunggal. Secara umum, responden kurang mampu berharap pemerintah membantu mengatur desa, namun tidak punya usulan konkrit tentang cara atau aspek apa yang perlu dibantu. Masyarakat dalam diskusi kelompok kecil mengatakan bahwa mereka mengharapkan dukungan pemerintah di bidang usaha, misalnya pemasaran kerajinan rotan.

Sekretaris Desa menceritakan dalam 5 tahun terakhir ada beberapa usulan yang diajukan. Permohonan bantuan semenisasi, listrik desa dan pipa air bersih sudah diberikan oleh pemerintah. Permohonan bantuan seng, ketinting, dan *chainsaw*, yang diajukan pada bulan Agustus 2003, belum direalisasi.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Selama ini kunjungan dari dinas ke desa lebih dari sekali sebulan. Kunjungan dilakukan oleh dokter Puskesmas.

Ketua BPD menilai bahwa keterjangkauan pemerintah dari segi jarak dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Sebelum pemekaran, masyarakat Long Lame berurusan di Tanjung Selor, yang letaknya lebih dekat daripada Malinau Kota. Kepedulian dan pelayanan pemerintah, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan semakin meningkat.

Ketika responden rumah tangga ditanya tentang perubahan frekuensi pertemuan sejak 1998, sebagian menilai frekuensi meningkat (empat dari sepuluh) dan sebagian mengatakan menurun (lima dari sepuluh). Enam dari sepuluh responden rumah tangga berpendapat bahwa hubungan tokoh masyarakat dengan pemerintah meningkat, sedangkan 3 orang tidak memberi jawaban. Hampir semua responden (sembilan dari sepuluh) menilai perhatian pemerintah untuk desa semakin meningkat. Masyarakat mengatakan bahwa sejak tahun 1998 desa semakin banyak mendapat bantuan. Sekretaris Desa menilai bantuan dalam 5 tahun terakhir meningkat.

5.3 Sumber dan alat komunikasi

Di Long Lame tidak ada alat komunikasi selain surat. Ketua BPD mengatakan masyarakat di Long Lame memperoleh informasi tentang program pemerintah melalui kunjungan pemerintah, dengar dari orang lain, pengumuman dan surat.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Satu-satunya upacara tradisional yang dilaksanakan di Long Lame adalah *muwe' lepo'* (Bahasa Kenyah). Upacara ini dilaksanakan apabila terjadi perzinahan di desa. Tujuan upacara ini masih sama dengan tujuan adat dulu, dan bahan yang digunakan tidak berubah. Waktu pelaksanaan sekarang lebih singkat sedangkan gotong royong dalam pelaksanaan semakin kuat.

Sekretaris Adat mengatakan bahwa lebih dari separuh generasi muda berminat untuk belajar pengetahuan tradisi.

Desa Long Lame

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Sekretaris Adat mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir tingkat kerjasama antar masyarakat semakin meningkat. Contoh gotong royong dalam 12 bulan terakhir yakni: membangun rumah, membuat ladang, buat balai pertemuan umum, membuka dan menebas jalan. Responden kurang mampu juga menilai tingkat kerjasama dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat.

Menurut Sekretaris Adat apabila masyarakat Long Lame mengalami kekurangan pangan mereka dibantu oleh masyarakat Long Aran. Tambahan beras dipinjamkan atau ditukar dengan parang. Responden kurang mampu menjelaskan bahwa dia tidak mendapatkan bantuan dari keluarga maupun tetangganya.

6.3 Konflik

Sekretaris Adat menyebutkan 2 jenis konflik yang terjadi di Desa Long Lame, yaitu konflik lahan dan konflik keluarga. Sengketa lahan tidak sering terjadi dan cenderung menurun. Konflik lahan disebabkan karena ada orang melarang orang lain menggarap belukar. Konflik keluarga, seperti selingkuh, masalah uang atau malas mencari babi jarang terjadi dan cenderung menurun. Masalah sosial lain adalah mabuk-mabukan yang sering terjadi, namun cenderung menurun.

Responden kurang mampu hanya menyebut adanya konflik lahan yang disebabkan karena "lahan dipinjamkan, tidak punya hak." Menurutnya dalam 5 tahun terakhir jumlah konflik cenderung menurun.

Untuk menangani konflik, baik di dalam desa maupun dengan pihak luar, di Desa Long Lame digunakan hukum adat. Seandainya masyarakat tidak mematuhi keputusan lembaga adat, dendanya akan ditambah. Apabila belum dipenuhi, akan diserahkan ke lembaga adat besar dan kemudian ke pihak polisi kalau tetap tidak selesai. Namun menurut Sekretaris Adat selama ini semua konflik dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

6.4 Kondisi umum orang miskin

Orang kurang mampu mengatakan kondisi hidup dalam 5 tahun terakhir memburuk. Masalah yang dihadapi disebutkan "karena tidak kuat kerja, sering sakit 1 - 2 bulan tiap tahun." Masalah lain yang dihadapi adalah kekurangan makanan sebab tidak ada hasil ladang dan susah mencari kerja jauh-jauh karena ada anak-anak kecil di rumah."

Responden kurang mampu mengatakan mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan mampu mencari makanan dan uang. Hanya tidak mampu membiayai pendidikan.

6.5 Hiburan

Sekretaris Adat mengatakan hiburan yang ada di Long Lame berupa televisi umum.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPD jenis tata guna lahan yang ada di Long Lame adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun buah-buahan;
- kebun kokoa;
- kebun kopi;
- kebun ubi kayu dan pisang;
- hutan.

Tipe tata guna lahan yang paling luas di wilayah Desa Long Lame adalah hutan rimba, yang meliputi lebih dari separuh luas wilayah. Areal ladang tetap karena tidak dikerjakan setelah pindah ke Long Aran. Areal sawah bertambah sejak tahun 1998. Luas kebun sayur berkurang sejak 1998. Luasan yang ditanam dengan buah-buahan semakin luas, terutama ditanam langsung, mata kucing dan rambutan. Areal kebun kokoa dan kopi tidak berubah dalam 5 tahun terakhir.

Menurut Ketua BPD jenis hutan dan lahan bera yang ada di Long Lame adalah:

- hutan rimba (Bhs. Punan *bak*);
- hutan sekunder tua, > 30 tahun (Bhs. Punan *bokan bak*);
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun (Bhs. Punan *bokan bak*);
- belukar tua, 5 - 10 tahun (Bhs. Punan *bokan belua*);
- belukar, 2 -5 tahun (Bhs. Punan *bokan mongot*);
- hutan rawa (Bhs. Punan *rafe*).

Luasan hutan rimba berkurang sejak 1998 karena dipakai untuk berladang. Luas hutan sekunder tua dan hutan sekunder muda tetap. Luas belukar tua dan muda berkurang.

Perubahan yang menurut Ketua BPD terjadi pada hutan sebelum tahun 1990 termasuk kebakaran hutan tahun 1983 seluas satu gunung, namun menurutnya tidak mempunyai dampak negatif.

7.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Di wilayah Long Lame ada *tana adet* ('hutan lindung masyarakat'). Hutan ini dimanfaatkan untuk mencari buah, sagu, rotan untuk kepentingan umum, gaharu dan bahan bangunan. "Kalau ada orang dari luar masuk bayar berupa uang Rp 150.000 per orang, tidak ditentukan waktu."

Jika ada orang yang melanggar peraturan perlindungan hutan, seperti menebang pohon buah tanpa izin akan dikenakan denda. Denda ini bisa berupa parang, sumpit dan periuk. Apabila orang mencari gaharu tanpa izin terlebih dahulu hasil yang diperoleh akan disita.

Desa Long Lame

Selama ini ada HPH yang beroperasi di sekitar Desa Long Lame. Proses persetujuan kerjasama di wilayah ini dimulai oleh perusahaan yang mendekati masyarakat. Keputusan tentang penawaran perusahaan dibahas bersama seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat.

Seluruh masyarakat Long Lame dapat pembagian *fee*, namun *fee* ini bukan dari penggarapan hutan di wilayah Desa Long Lame. *Fee* berasal dari wilayah hutan adat besar Pujungan. Jawaban responden kurang mampu tentang proses perundingan dan pembagian *fee* mengkonfirmasi informasi di atas.

7.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Masyarakat Long Lame mengalami kesulitan akses lahan di pemukiman Long Aran. Mereka bergabung dengan Desa Long Aran dan untuk lahan dekat pemukiman hanya bisa meminjam. Menurut Kepala Desa tidak ada warga Long Lame yang memiliki lahan di sekitar pemukiman Long Aran. Lahan yang dimiliki warga Long Lame ada di lokasi lama Desa Long Lame. Selama ini tidak ada praktek jual beli tanah.

7.4 Kondisi rumah penduduk

Semua rumah di Long Lame beratap seng, lantai dan dinding terbuat dari papan meranti dan sejenisnya. Kesepuluh rumah tangga yang diwawancarai tidak memiliki WC. Desa Long Lame mendapat bantuan genset dari pemerintah dan semua rumah tangga mendapat sambungan ke listrik desa. Bahkan ada enam dari sepuluh responden rumah tangga yang mempunyai sambungan ke listrik desa dan punya PLTS.

7.5 Perladangan

Dari sepuluh rumah tangga yang diwawancarai sembilan mengatakan bahwa lahan ladang tahun 2003 adalah lahan pinjaman (dan satu responden tidak buat ladang tahun 2003). Umur belukar yang digarap masih mudah, menurut delapan responden lahan berumur di bawah 10 tahun. Bahkan banyak yang mengatakan umur lahan baru mencapai 2 sampai 3 tahun. Dari segi jarak hampir semua lahan berada dekat pemukiman (5 sampai 20 menit jalan kaki). Selain membuat ladang, tujuh responden mengatakan juga mempunyai kebun. Semua responden mengatakan punya minimal 2 jenis tanaman, misalnya ada kebun sayur dan tanaman buah-buahan. Menurut enam responden, luasan atau jumlah pohon relatif terbatas, misalnya ada 5 pokok buah-buahan.

Hasil panen padi awal tahun 2003 tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebanyak 4 rumah tangga (dari sepuluh) mengatakan sama sekali tidak dapat hasil padi. Responden lain mendapat cukup untuk sekitar 3 bulan (tiga responden) hingga 7 bulan (tiga responden). Tujuh rumah tangga memperoleh tambahan beras dengan membeli dan kerja harian untuk warga Long Aran dengan bayaran dalam bentuk beras. Tiga rumah tangga lain menutupi kekurangan dengan membeli di warung.

7.6 Pendapatan uang

Upah sebagai buruh harian, misalnya kerja ladang, merupakan usaha utama untuk enam dari sepuluh responden rumah tangga. Usaha lain yang disebut sebagai sumber pendapatan utama adalah pandai besi (dua responden), mencari gaharu (satu responden) dan menggesek kayu (satu responden).

Desa Long Lame

Usaha sampingan cukup banyak dan beragam. Penghasilan pandai besi disebut oleh enam responden, menjual kerajinan rotan seperti anjat (lima responden), upah sebagai buruh (empat responden), *fee* dari perusahaan (tiga responden). Tunjangan sebagai aparat desa, gaji dari perusahaan HPH, menjual kayu api, mencari gaharu dan membuat sagu, masing-masing disebut oleh satu responden.

Semua rumah tangga mengatakan muncul usaha baru dalam 5 tahun terakhir, yaitu *fee* dari perusahaan kayu. Sumber pendapatan baru yang lain adalah gaji di perusahaan kayu, tunjangan sebagai staf desa dan upah sebagai buruh harian.

Gaharu disebut oleh enam responden sebagai hasil hutan yang digunakan sebagai sumber pendapatan, namun hanya dua rumah tangga menyebut gaharu sebagai salah satu usaha penting. Selain anjat (lima responden) produk olahan hasil hutan lain yang dijual adalah papan (disebut oleh tiga responden), sumpit (dua responden), kulit binatang (satu responden) dan makanan (satu responden).

7.7 Infrastruktur ekonomi

Di Long Lame tidak ada pasar dan pasar terdekat ada di Long Pujungan, ibukota kecamatan. Hasil ladang, kebun sayur atau buruan dijual keliling, namun pemasaran terbatas karena mayoritas masyarakat adalah petani yang mempunyai hasil yang sama dan jumlah orang yang bukan petani sangat terbatas. Transportasi merupakan kesulitan dalam pemasaran hasil. Satu-satunya jalur transportasi adalah melalui sungai dengan biaya dan risiko yang cukup besar.

Buah-buahan kadang-kadang laku dijual ke Tanjung Selor. Tetapi masyarakat punya posisi tawar yang lemah karena tidak dapat membawa buah langsung ke Tanjung Selor. Biasanya mereka menjual ke pengumpul yang punya *longboat* sendiri dan membawa buah-buahan seperti durian atau mata kucing ke Tanjung Selor.

7.8 Keterjangkauan terhadap energi

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- tenaga surya;
- PLTD desa.

Kayu bakar dan minyak tanah sudah lama digunakan oleh masyarakat dan selama ini masih terjangkau. Pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga diesel merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten yang diberikan pada tahun 2002. Masyarakat membayar iuran untuk membeli solar untuk PLTD. Berdasarkan kesepakatan dihitung Rp 3 per malam per Watt. Sebagian masyarakat tidak sanggup untuk membayar iuran untuk PLTD.

8. Pendidikan

8.1 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di lokasi Long Aran hanya ada Sekolah Dasar. Menurut Kepala Sekolah dalam 5 tahun terakhir jumlah sekolah dan kondisi gedung tidak berubah. Dari segi alat dan buku, jumlah tenaga guru dan gajinya ada peningkatan.

Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP, anak-anak dari Long Lame pergi ke Long Pujungan, untuk tingkat SLTA ke Tanjung Selor dan untuk perguruan tinggi ke Tarakan. Satu anak dari Long Lame pernah masuk di Universitas Borneo di Tarakan.

8.2 Mutu pendidikan

Dalam 5 tahun terakhir tidak ada peningkatan pendidikan guru, namun keaktifan guru meningkat. Sejak tahun 1998 ada peningkatan dalam persentase kelulusan dan pada tahun 2003 mencapai sekitar 60%. Jumlah orang yang dapat membaca dan menulis juga meningkat.

Kepala Sekolah mengatakan bahwa dari 32 murid yang ada, 12 sering meninggalkan sekolah dengan alasan ikut bekerja, ikut ke ladang atau ke hutan atau karena tidak ada biaya. Alasan anak putus sekolah adalah karena perkawinan atau karena "tidak punya pakaian" (berarti tidak punya biaya). Jumlah murid baru pada tahun pengajaran 2003 - 2004 adalah enam orang (4 laki dan 2 perempuan).

9. Kesehatan

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di lokasi Long Aran terdapat sebuah Puskesmas Pembantu dan ada dukun bayi. Puskesmas Pembantu ini dibangun dengan dana dari pemerintah pada tahun 1997 dan dijalankan oleh pemerintah. Jarak dari pemukiman Long Lame ke Puskesmas Pembantu dapat ditempuh dengan 15 menit jalan kaki.

Kepala Desa mengatakan bahwa jumlah fasilitas dan tenaga medis sejak 1998 tidak berubah. Menurutnya kondisi fasilitas kesehatan dan gaji untuk tenaga medis meningkat. Persediaan obat dan peralatan menurun dalam 5 tahun terakhir.

Menurut Sekretaris Adat masih banyak orang di Long Lame yang mempunyai pengetahuan tentang obat tradisional. Dalam pengobatan tidak dilaksanakan upacara dan tidak memerlukan biaya.

9.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih warga Long Lame dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada Tabel 18.

Desa Long Lame

Tabel 18: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Lame.

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Mengapa	Perubahan Mutu	Mengapa
Sungai	Bisa dijangkau oleh separuh masyarakat	Tidak berubah selama ini	Karena tinggal di pinggir sungai besar	Menurun	Karena ada orang yang meracuni ikan
Air bersih (pipa)	Bisa dijangkau oleh separuh masyarakat	Meningkat	Karena proyek baru selesai Agustus 2003	Tetap	-

Seluruh warga Long Lame punya alat untuk simpan air, berupa ember, jerigen (5 - 10 liter) dan periuk. Mereka tidak memiliki alat seperti drum atau tangki dan tidak ada tangki umum.

9.3 Kondisi kesehatan masyarakat

Dalam 12 bulan terakhir, lahir tujuh bayi dan satu bayi meninggal pada saat lahir. Berat rata-rata pada saat lahir diperkirakan 3,1 kg. Dalam 1 tahun terakhir tidak ada ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Menurut Kepala Desa umur ibu pada kehamilan pertama sekitar 14 tahun. Angka dan penyebab kematian anak-anak pada usia 0 hingga 10 tahun di Long Lame dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19: Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Long Lame dalam 12 bulan terakhir

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 - 5 tahun	1 orang	Muntaber (Kolera)
6 - 10 tahun	1 orang	Malaria

Dalam 12 bulan terakhir ada dua orang yang meninggal. Malaria adalah penyakit yang menurut Kepala Desa paling banyak menyebabkan kematian di Desa Long Lame. Umur rata-rata orang yang meninggal karena penyakit atau lanjut usia diperkirakan 70 tahun.

Desa Long Paliran

Desa Long Paliran



Foto: Gerbang Desa Long Paliran

Profil Desa Long Paliran

Jumlah rumah tangga: 13	Jumlah jiwa: 58
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 8	Jumlah KK: 15
Suku mayoritas: Kenyah	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Irang Baya	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Gang Njuk	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: Bit Lampung	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 1 jam (ketinting)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 30 menit ketinting + 45 menit terbang atau 2 hari (<i>longboat</i> + 2 x speedboat)	Jumlah Pusban: -
	Jumlah Polindes: -

LONG PALIRAN

1. Letak dan Lingkungan Desa

Long Paliran terletak di pinggir Sungai Bahau dekat Kuala Sungai Lurah, salah satu cabang Sungai Bahau yang besar. Wilayah Desa Long Paliran berbukit-bukit. Desa terdekat di sebelah hilir, sekaligus ibukota kecamatan, adalah Long Pujungan (30 menit lewat sungai). Desa terdekat di Hulu Sungai Bahau adalah Long Uli sekitar 2-3 jam mudik dengan ketinting. Di Sungai Lurah Desa Long Belaka adalah desa yang terletak di sebelah hulu.

2. Sejarah Desa

Menurut Kepala Adat, sejak zaman Belanda Desa Long Paliran sudah ada di hilir sungai Bahau dekat lokasi sekarang. Hingga tahun 1958 masyarakat Long Paliran tinggal dalam rumah panjang. Sebelum bermukim di Long Paliran masyarakat Long Paliran datang dari Long Jelet (di Sungai Pujungan) dan pindah ke Kuala Sungai Pujungan sebelum pindah ke Long Paliran.

Pada tahun 1987 sebagian besar warga Long Paliran pindah ke Bena Baru di Berau.

Pada tahun 1982 masyarakat Long Paliran mengalami 'kelaparan' (kekurangan padi) akibat kemarau. Musibah kekurangan padi terulang pada tahun 1997 juga karena terjadi kemarau. Pada tahun itu ladang masyarakat Long Paliran terserang hama. Kebanjiran yang mengakibatkan hanyutnya rumah warga dialami pada tahun 1995.

3. Penduduk

Masyarakat Long Paliran termasuk Suku Kenyah Badeng.

3.1 *Perpindahan penduduk*

Dalam 5 tahun terakhir ada enam warga Long Paliran yang meninggalkan desa untuk sementara waktu karena mengikuti pendidikan. Dalam jangka waktu yang sama tidak ada warga yang pindah dari Long Paliran.

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga yang ada di Desa Long Paliran:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Desa (BPD);

Desa Long Paliran

- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- Lembaga Musyawarah Desa (LMD);
- Kelompok Tani.

Badan Perwakilan Desa terbentuk pada tahun 2002, namun belum pernah mengadakan konsultasi dengan masyarakat.

4.1 Musyawarah

Mutu dan frekuensi musyawarah di Long Paliran meningkat dalam 5 tahun terakhir menurut Kepala Desa. Dia menilai bahwa keputusan musyawarah semakin berdampak dan dipatuhi.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Dalam 5 tahun terakhir Desa Long Paliran mengajukan 4 usulan bantuan kepada pemerintah. Pada tahun 2001 diajukan bantuan semenisasi jalan desa dan air bersih. Semen untuk semenisasi diberikan pada tahun 2003 dan proyek air bersih direalisasi pada tahun 2002 hingga 2003. Permohonan pembangkit listrik tenaga surya diajukan pada tahun 2001 dan pada tahun 2002. Bantuan sebanyak 3 unit PLTS diberikan pada tahun 2001 dan 10 unit pada tahun 2002. Masyarakat Long Paliran pernah meminta sebuah *chainsaw*. Permintaan ini tidak dikabulkan dan dianjurkan untuk menggunakan dana Bangdes untuk membelinya.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Selama ini Desa Long Paliran dikunjungi oleh Staf Puskesmas Kecamatan Pujungan dengan frekuensi kurang dari sekali sebulan.

Kepala Desa menilai bahwa dalam 5 tahun terakhir hubungan dengan pemerintah semakin baik. Dia menyebutkan adanya peningkatan kepedulian pemerintah, pelayanan lebih baik, keterbukaan informasi meningkat dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga meningkat. Hanya dari segi jarak setelah pemekaran jadi lebih jauh.

Sepuluh responden rumah tangga (lima dari sepuluh) menilai frekuensi bertemu pemerintah dalam 5 tahun terakhir menurun. Tiga responden mengatakan frekuensi naik dan satu mengatakan tidak ada perubahan. Satu mengatakan tidak pernah berurusan dengan pemerintah. Sebagai tempat bertemu semua responden menyebut desa lain, yaitu Long Pujungan.

Ketika ditanya tentang hubungan antara tokoh masyarakat dengan pegawai pemerintah kabupaten, empat dari sepuluh responden menjawab bahwa hubungan meningkat. Empat lainnya mengatakan hubungan tidak berubah, satu responden menyebut hubungan menurun dan satu mengatakan tidak pernah berurusan dengan pemerintah. Ketika ditanya tentang perhatian pemerintah untuk Desa Long Paliran, sembilan dari sepuluh responden mengatakan perhatian meningkat, terutama karena Desa Long Paliran mendapat beberapa kali bantuan dari pemerintah.

Desa Long Paliran

5.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat di Desa Long Paliran memperoleh informasi tentang program pemerintah dari orang lain dan melalui radio atau telex lewat kantor Camat atau surat. Di Desa Long Paliran sendiri tidak ada radio atau telepon.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Menurut Kepala Adat, upacara adat yang masih dilaksanakan adalah pesta panen. Pesta panen telah mengalami perubahan, mulai dari tujuan dan bahan hingga waktu yang semakin singkat. Gotong royong dalam melaksanakan pesta panen semakin kuat.

Kepala Adat mengatakan bahwa seluruh generasi muda masih berminat dan mendapatkan pengetahuan tradisi dari orang tua.

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Dalam 5 tahun terakhir kerjasama antar masyarakat tidak berubah. Kepala Adat mengatakan bahwa semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam gotong royong. Bentuk gotong royong yang dilakukan selama 12 bulan terakhir adalah kerjasama membuat ladang (*senguyun* Bhs. Kenyah), membuat rumah masyarakat, membantu janda tua, membangun balai pertemuan umum dan kerja bakti untuk kebersihan desa. Responden kurang mampu menilai bahwa kerjasama di Desa Long Paliran tidak berubah.

Kepala Adat menjelaskan bahwa jika terjadi kekurangan pangan di Long Paliran, mereka "minta bantuan masyarakat setempat" (desa tetangga). Responden kurang mampu mengatakan pernah dibantu oleh keluarganya maupun tetangga. Ini menggambarkan bahwa solidaritas antara masyarakat di dalam desa dan antar desa masih tinggi.

6.3 Konflik

Satu-satunya konflik yang terjadi di lingkungan Desa Long Paliran menurut Kepala Adat adalah permasalahan keluarga. Konflik keluarga sering terjadi dan dalam 5 tahun terakhir frekuensi tidak berubah. Penyebab terjadinya konflik keluarga adalah "...suami malas, selingkuh, kurang bahan makanan, tidak punya uang..." Ketika responden kurang mampu ditanya tentang konflik, dijawab bahwa tidak ada konflik apapun. Namun disebutkan juga bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah konflik menurun.

Untuk menegakkan keputusan lembaga adat, Kepala Adat menjelaskan, bahwa sebagai langkah pertama, denda dinaikkan dan apabila tidak dibayar akan diserahkan ke pihak polisi. Namun selama ini seluruh kasus dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

6.4 Situasi umum orang miskin

Responden kurang mampu merasa bahwa dalam 5 tahun terakhir kondisi hidupnya semakin baik, terutama karena selama ini tetap mampu memenuhi kebutuhan makanan, walaupun dikatakan "... tidak ada kelebihan." Selain itu ada peningkatan

Desa Long Paliran

usaha karena sering digaji untuk merumput. Sebagai indikasi lain bahwa hidup sekarang semakin baik dia mengatakan: "Dulu orang sering minta api, karena tidak ada korek. Sekarang tidak ada lagi." Pernyataan ini menggambarkan bahwa peningkatan yang dialami masih pada kebutuhan dasar.

Selain mampu memenuhi kebutuhan makanan, responden kurang mampu juga dapat memperoleh uang tunai. Namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Untuk pelayanan pendidikan, selama ini responden kurang mampu tidak mendapat bantuan dari orang lain, sedangkan untuk biaya berobat dibantu oleh warga lain. Ada warga yang meminjamkan uang dan dikembalikannya dengan bekerja untuk orang tersebut. Ketika ditanya jenis bantuan apa yang diperlukan, responden mengusulkan mesin *chainsaw*, alat yang dapat digunakan untuk berusaha.

6.6 Hiburan

Hiburan di Desa Long Paliran adalah:

- *Mong koman* (Bhs. Kenyah), piknik di pinggir sungai;
- televisi dan VCD;
- radio.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Kepala Desa jenis tata guna lahan yang ada di Desa Long Paliran adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun buah-buahan;
- kebun kokoa;
- kebun kopi;
- hutan.

Sebagian besar wilayah Desa Long Paliran masih diselimuti hutan rimba. Dari tipe tata guna lahan di atas hanya areal kebun sayur dan buah-buahan yang bertambah luas. Luas areal lahan pertanian lain dalam 5 tahun terakhir tidak berubah.

Kepala Desa menyebut jenis hutan dan bera yang ada di wilayah Long Paliran sebagai berikut:

- hutan rimba (Bhs. Kenyah *mbak*);
- hutan sekunder tua, > 30 tahun (jekau Bhs. Kenyah *mbak*);
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun (Bhs Kenyah *juweh*);
- belukar tua, 5 - 10 tahun (Bhs Kenyah *juweh dumit*);

Desa Long Paliran

- belukar, 2 -5 tahun (Bhs Kenyah *juweh dua dumen*);
- hutan rawa (Bhs Kenyah *bawang-bawang*);
- hutan palem sagu (Bhs Kenyah *nanga*).

Luas hutan rimba dalam 5 tahun terakhir tidak berubah. Luas daerah hutan sekunder tua dan hutan sekunder muda juga tidak berubah. Areal belukar tua dan belukar muda tidak berubah karena digunakan secara bergilir balik untuk ladang. Apalagi sejak tahun 1987 sebagian masyarakat Long Paliran pindah ke Bena Baru di Kabupaten Berau dan menyerahkan pengelolaan kawasan bekas ladang pada masyarakat yang tinggal di Long Paliran.

Jenis hutan lain yang terdapat di wilayah Desa Long Paliran adalah hutan rawa, yang terdapat di dalam hutan rimba di daerah datar. Hutan palem sagu bertambah luas secara pelan-pelan menurut Kepala Desa.

Sebelum tahun 1990 hutan di wilayah Long Paliran sudah mengalami perubahan. Kepala Desa mengatakan pernah terjadi kebakaran hutan karena pada saat mencari madu api menjalar. Kebakaran ini mengakibatkan gaharu habis dan kayu-kayu bangunan terbakar. Sejak masyarakat Long Paliran memiliki mesin ketinting, daerah jauh jadi lebih mudah dijangkau, sehingga masyarakat mencari gaharu dan binatang buruan sampai di tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Akibat pengambilan gaharu yang terus-menerus, populasinya menurun. Perubahan lain yang disebut oleh Kepala Desa adalah "karena diburu tidak ada lagi babi hutan berenang". Menurut Kepala Desa longsor yang terjadi secara alamiah di hutan tidak mempunyai dampak "nyata, karena luasnya kecil."

7.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Sejak tahun 1993 masyarakat Long Paliran menetapkan hutan sepanjang Sungai Paliran sebagai *tanah ulen* (Bhs. Kenyah). Kawasan *tanah ulen* digunakan untuk keperluan mencari dana untuk kepentingan umum. Pada tahun 2000 ditetapkan aturan tentang besar pungutan untuk orang luar yang masuk di kawasan *tanah ulen*. Apabila ada orang melanggar ketentuan ini, alat-alatnya seperti mesin ketinting akan ditahan dan melalui musyawarah akan ditentukan besarnya denda.

Selama ini tidak ada masyarakat Desa Long Paliran yang mengajukan permohonan izin IPPK, menurut Kepala Desa dan responden kurang mampu. Pernah ada pihak luar yang menawarkan kerjasama untuk membuka IPPK di wilayah Desa Long Paliran, menurut Kepala Desa. Tawaran ini dibahas dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh masyarakat dan ditolak. Responden kurang mampu tidak mengetahui bahwa pernah ada pihak luar yang mengajukan izin untuk wilayah Desa Long Paliran. Tapi dia menjelaskan bahwa dia tidak ikut terlibat dalam proses pembahasan penawaran ini.

7.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Seluruh masyarakat di Desa Long Paliran punya keterjangkauan dan memiliki lahan. Menurut Kepala Desa keterjangkauan terhadap lahan dalam 5 tahun terakhir meningkat. Selama ini tidak ada orang yang menjual lahan.

7.4 Kondisi rumah penduduk

Semua rumah di Long Paliran beratap seng, lantai dan dinding terbuat dari papan meranti dan sejenisnya. Hanya satu responden (dari sepuluh) masih menggunakan sirap

Desa Long Paliran

untuk atap. Dari sepuluh rumah tangga yang diwawancarai, sembilan tidak memiliki WC. Pada tahun 2003 Long Paliran diberikan genset oleh pemerintah dan semua rumah punya sambungan ke listrik desa. Selain itu dari sepuluh responden rumah tangga, delapan mempunyai PLTS dan satu responden mempunyai genset pribadi.

7.5 Perladangan

Lahan ladang tahun 2003 sebagian besar (delapan dari sepuluh responden) merupakan *jekau* (lahan bekas ladang) milik petani yang menggarap. Ada satu petani yang selain menggarap belukar juga buka rimba dan satu petani hanya menggarap hutan rimba untuk ladang 2003. Dari sepuluh responden ada tiga yang selain membuat ladang juga membuat sawah. Rata-rata lahan ladang dapat dijangkau dalam waktu 15 menit dengan ketinting. Umur belukar yang digarap bervariasi: umur belukar di bawah 10 tahun tiga orang, 10 - 20 tahun empat orang, umur belukar di atas 20 tahun satu orang, hutan rimba satu orang dan satu orang menggarap jekau 10 - 20 tahun plus hutan rimba.

Hasil padi dari ladang cukup bervariasi. Dari delapan responden yang membuat ladang pada tahun 2002, ada tiga yang dapat padi cukup untuk kebutuhan rumah tangga selama 1 tahun. Dua responden dapat padi cukup untuk 9 bulan, satu dapat padi cukup untuk 7 bulan dan dua hanya dapat padi cukup untuk 3 bulan. Untuk menutupi kekurangan beras dua rumah tangga membeli, dua rumah tangga membeli di warung dan dapat 'beras miskin', tiga rumah tangga membeli di warung, dapat beras miskin dan pinjam dengan keluarga dan satu rumah tangga hanya pinjam dengan keluarga.

Selain menggarap ladang ada sembilan petani yang juga membuat kebun sayur dengan ukuran yang berbeda-beda. Pembuatan kebun sayur untuk sebagian petani adalah kegiatan yang masih baru dan luasan yang digarap meningkat (lima dari sepuluh responden). Pembuatan kebun kopi merupakan kegiatan yang meningkat dengan adanya proyek perkebunan kopi.

7.6 Pendapatan uang

Sumber pendapatan utama rumah tangga di Long Paliran beragam: menggesek kayu (dua responden), gaji sebagai guru (dua responden), mencari gaharu (satu responden), menjual hasil buruan (satu responden), upah sebagai buruh lepas (satu responden), menjual ternak (satu responden), bengkel (satu responden), menjual dayung dan tanggar (satu responden).

Usaha tambahan yang disebut oleh responden juga bervariasi: menjual ikan (dua responden), bengkel (satu responden), menjual sayur (dua responden), menjual babi hutan (dua responden), menjual anjat (satu responden), upah sebagai buruh (dua responden), membuat lesung (satu responden), menjual beras (satu responden) dan menjual ternak (satu responden).

Dua responden mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir tidak ada usaha baru. Delapan responden menyebut pembagian *fee* sebagai sumber pendapatan yang baru. Tunjangan sebagai aparat desa disebut oleh lima orang sebagai pendapatan baru.

Hasil hutan yang dimanfaatkan sebagai sumber uang adalah babi hutan (disebut oleh enam responden), rusa (enam responden) dan buah-buahan (enam responden). Gaharu hanya disebut oleh tiga responden sebagai hasil hutan yang diusahakan.

Desa Long Paliran

Delapan responden menghasilkan 2 atau lebih produk hasil pengolahan hasil hutan (seperti anjat, tikar, kayu gergaji atau makanan). Satu responden menghasilkan 1 jenis produk olahan dan satu responden tidak melakukan pengolahan hasil hutan untuk sumber pendapatan. Hasil pengolahan yang paling banyak disebut adalah anjat (disebut oleh enam responden) dan makanan (enam responden).

7.7 *Infrastruktur ekonomi*

Di Long Paliran tidak ada pasar dan pasar terdekat ada di Long Pujungan, ibukota kecamatan. Transportasi merupakan kesulitan dalam pemasaran hasil. Satu-satunya jalur transportasi adalah melalui sungai dengan biaya dan risiko yang cukup besar.

Buah-buahan kadang-kadang laku dijual ke Tanjung Selor. Tetapi masyarakat punya posisi tawar yang lemah karena tidak dapat membawa buah langsung ke Tanjung Selor. Biasanya mereka menjual ke pengumpul yang punya *longboat* sendiri dan membawa buah-buahan seperti durian atau mata kucing ke Tanjung Selor.

Lembaga keuangan seperti bank tidak ada di Long Paliran dan yang terdekat ada di Tanjung Selor.

7.8 *Keterjangkauan terhadap energi*

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- tenaga surya;
- PLTD desa;

Kayu bakar dan minyak tanah sudah lama digunakan oleh masyarakat. Kayu bakar masih banyak tersedia, sedangkan minyak tanah dikatakan semakin sulit dijangkau karena harga semakin tinggi. Pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga diesel merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten. Masyarakat mengalami kendala dalam menggunakan PLTS, yaitu kesulitan untuk mendapatkan air aki.

8. Pendidikan

8.1 *Infrastruktur dan pelayanan pendidikan*

Di Long Paliran ada Sekolah Dasar. Anak-anak yang melanjutkan ke tingkat SLPT pergi ke Long Pujungan (1 jam dengan ketinting). Untuk lanjut ke tingkat SLTA mereka pergi ke Tanjung Selor (sekitar 1 hari dengan *longboat*) atau ke Malinau.

Dalam 5 tahun terakhir jumlah sekolah di Long Paliran tidak berubah, tapi kondisi gedung menurun. Jumlah tenaga guru dan gaji mereka meningkat serta alat dan buku juga lebih banyak.

Pada ujian tahun 2003 dari empat murid yang ikut 3 lulus dan 1 tidak (75%). Jumlah murid baru pada tahun pengajaran 2003 - 2004 adalah 14 orang.

Desa Long Paliran

8.2 Mutu pendidikan

Menurut Kepala Sekolah mutu pendidikan dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat. Tingkat pendidikan tenaga guru dan keaktifan dalam mengajar meningkat. Demikian juga persentase kelulusan dan jumlah orang yang bisa membaca dan menulis meningkat.

Kepala Sekolah mengatakan ada empat anak putus sekolah karena ikut mencari gaharu dengan temannya atau karena " ...badannya besar, tapi umur sama dengan yang lain." Ada sekitar enam murid yang meninggalkan sekolah untuk sementara waktu dengan alasan karena ikut ke ladang atau sakit.

9. Kesehatan

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Tidak ada fasilitas kesehatan di Long Paliran. Di Desa Long Paliran ada tenaga dukun dan masyarakat menjalankan Pos Pelayanan Terpadu untuk menimbang bayi di bawah umur 5 tahun. Dukun bayi mengatakan kondisi fasilitas kesehatan dalam 5 tahun terakhir tidak berubah, tidak ada tambahan fasilitas atau staf. Fasilitas kesehatan terdekat, berupa Puskesmas, terdapat di Long Pujungan. Untuk mencapai Puskesmas perlu waktu sekitar 1 jam dengan ketinting dari Long Paliran dan 7 liter bensin (Rp 5.000/liter)

Kepala Adat mengatakan bahwa tidak ada lagi orang yang punya pengetahuan tentang pengobatan tradisional.

9.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih warga Long Paliran dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Paliran.

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Mengapa	Perubahan Mutu	Mengapa
Sungai	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Meningkat	Ada tambahan pipa dari sungai kecil ke desa	Tetap	-

Air bersih dialirkan dari anak sungai (Lalut Tekojang) dengan pipa ke pemukiman. Pipa tersebut merupakan bantuan dari pemerintah. Karena air mengalir terus tidak perlu tempat menampung air. Pada saat kemarau air bersih tidak mengalir dan masyarakat mengambil air di Sungai Bahau.

Desa Long Paliran

9.3 Kondisi kesehatan masyarakat

Dalam 12 bulan terakhir ada dua bayi lahir tapi dua-duanya meninggal pada saat lahir. Menurut Dukun Bayi, berat bayi baru lahir berkisar antar 1,7 sampai 2,8 kg. Dalam tahun terakhir tidak ada ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Umur ibu pada saat pertama kali hamil diperkirakan 17 - 19 tahun. Angka dan penyebab kematian anak-anak pada usia 0 - 10 tahun di Long Paliran dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 21: Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Long Paliran dalam 12 bulan terakhir

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 - 5 tahun	2	Jatuh di ladang Naik perahu terguncang digiram
6 - 10 tahun	Tidak ada	-

Dalam 12 bulan terakhir tidak ada orang dewasa yang meninggal. Tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di Desa Long Paliran. Ibu Dukun memperkirakan umur rata-rata orang meninggal karena penyakit atau lanjut usia sekitar 60 tahun.

Desa Long Levanit



Foto: Diskusi di sebuah rumah di Desa Long Levanit

Profil Desa Long Levanit

Jumlah rumah tangga: -	Jumlah jiwa: 74
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 8	Jumlah KK: 16
Suku mayoritas: Lundayeh	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Sartho Sibal	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Thomas	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: Beni T.	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 15 menit (taksi)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 30 menit (taksi)	Jumlah Pusban: -
	Jumlah Polindes: -

LONG LEVANIT

1. Letak dan Lingkungan Desa

Long Levanit adalah salah satu desa di lokasi Mentarang Baru. Sebuah jembatan gantung, menyeberangi Sungai Mentarang, menghubungkan Mentarang Baru dengan Pulau Sapi, ibukota Kecamatan Mentarang. Pemerintah Kabupaten Malinau sedang membangun jembatan untuk menyeberangi Sungai Malinau yang akan membuka hubungan darat dari Malinau Kota sampai ke Pulau Sapi dan Mentarang Baru. Jalur alternatif dari Mentarang Baru ke Malinau Kota adalah dengan ketinting ke Tanjung Lapangan (tarif Rp 5.000/orang) dan kemudian naik taksi (tarif Rp 2.000/orang). Perjalanan ini dapat ditempuh dalam waktu 1 jam.

Lahan di sekitar Mentarang Baru sebagian besar datar. Hutan terdapat di bukit-bukit yang agak jauh dari pemukiman atau di daerah Hulu Sungai Mentarang, daerah asal Desa Long Levanit.

2. Sejarah Desa

Masyarakat Long Levanit pindah dari Hulu Sungai Mentarang 20 tahun yang lalu.

Masyarakat Long Levanit pernah mengalami bencana banjir yang mengakibatkan beberapa rumah dan tanaman penduduk rusak.

3. Penduduk

Mayoritas masyarakat Long Levanit berasal dari Suku Lundayeh. Menurut data P4B jumlah penduduk Long Levanit (Mei 2003) 74 jiwa. Menurut Kepala Desa ada tiga orang yang meninggalkan Desa Long Levanit untuk sementara waktu mencari pekerjaan dan tidak ada masyarakat yang pindah dalam 5 tahun terakhir.

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga-lembaga yang ada di Desa Long Levanit adalah:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Kelompok Tani.

BPD terbentuk pada tahun 2002 dan selama ini melakukan pertemuan dengan masyarakat kurang lebih sekali dalam 3 bulan. Pertemuan ini membahas tentang

Desa Long Levanit

kegiatan desa, seperti gotong royong. Keputusan diambil melalui musyawarah yang diikuti oleh semua masyarakat.

4.1 Musyawarah

Walaupun mutu dan frekuensi musyawarah semakin meningkat, dampak keputusan sama dengan dulu.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Bantuan yang selama ini diterima secara rutin adalah dana Bangdes dan dana operasional desa yang diberikan setiap tahun. Tunjangan aparat desa dan lembaga adat desa diterima 6 bulan sekali dan bantuan beras miskin diterima setiap bulan.

Selain dari pemerintah selama ini masyarakat Long Levanit tidak dapat bantuan dari pihak lain seperti pengusaha, LSM atau gereja.

Dalam 5 tahun terakhir masyarakat Long Levanit pernah mengajukan permohonan bantuan untuk semenisasi jalan desa dan pembuatan jembatan Sungai Taring, pembangunan SMU dan bantuan alat pertanian. Hingga November 2003 belum ada permohonan yang dikabulkan.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Long Levanit mendapat kunjungan dari staf kecamatan, petugas pendataan P4B dan staf Pemda. Frekuensi kunjungan selama ini kurang dari sekali sebulan.

Penilaian Ketua BPD tentang perubahan hubungan dengan pemerintah dalam 5 tahun terakhir positif. Dia berpendapat bahwa keterjangkauan, kepedulian, pelayanan, keterbukaan informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan semua meningkat.

Berdasarkan wawancara rumah tangga tergambar bahwa 80%¹³ dari responden menilai frekuensi bertemu dengan pemerintah meningkat. Biasanya mereka bertemu di desa sendiri maupun di ibukota kecamatan. Tujuan bertemu beragam; dari minta izin kunjungan keluarga di Malaysia, minta informasi, ikut sosialisasi hingga menyampaikan usulan. Para responden menilai hubungan antara tokoh masyarakat dengan pemerintah meningkat (menurut tujuh dari sepuluh responden), karena akses lebih mudah. Namun tidak semua merasa bahwa peningkatan hubungan diiringi dengan peningkatan perhatian: lima responden menjawab perhatian meningkat dan lima menjawab bahwa perhatian masih sama dengan dulu.

5.3 Sumber dan alat informasi

Menurut Ketua BPD, masyarakat mendapat informasi tentang program pemerintah melalui kunjungan, mendengar dari orang lain dan lewat pengumuman. Alat komunikasi yang disebut oleh Kepala Desa adalah televisi dan radio.

¹³ delapan dari sepuluh responden.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Kepala Adat menceritakan bahwa tidak ada lagi upacara adat dan kurang dari seperempat generasi muda berminat belajar tentang pengetahuan tradisional.

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Kerjasama antar masyarakat dalam 5 tahun terakhir meningkat. Gotong royong yang biasanya dilaksanakan adalah kebersihan lingkungan pemukiman seperti menebas rumput dan membersihkan parit-parit. Kegiatan ini diikuti oleh semua warga.

6.3 Konflik

Konflik yang menurut Kepala Adat sering terjadi dan semakin meningkat adalah permasalahan lahan. Konflik lain tidak ada.

Untuk mengatasi konflik baik di antara warga desa maupun dengan pihak lain digunakan hukum adat. Sebagai contoh penyelesaian konflik disebut masalah minuman keras. Apabila ada orang melanggar dikenakan denda adat. Selama ini lebih dari separuh kasus dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

6.4 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di desa adalah:

- televisi dan VCD.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPD jenis tata guna lahan yang ada di Long Levanit adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun rotan;
- kebun buah-buahan;
- kebun kokoa;
- kebun kopi;
- hutan.

Desa Long Levanit

Di wilayah Long Levanit (termasuk wilayah desa yang lama), hutan merupakan jenis lahan yang paling luas, bahkan Ketua BPD menyebut seluruh areal merupakan hutan. Sejak tahun 1998 luas areal ladang, sawah, kebun sayur dan kebun buah-buahan bertambah. Luasan kebun rotan tetap, sedangkan luasan kebun kakao dan kopi berkurang.

Ketua BPD menyebut jenis hutan dan bera yang ada di Desa Long Levanit sebagai berikut:

- hutan rimba;
- hutan sekunder tua, > 30 tahun;
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun;
- belukar tua, 5 - 10 tahun;
- belukar, 2 -5 tahun;
- hutan rawa;
- hutan kerangas.

Menurut perkiraan Ketua BPD, luas hutan, termasuk hutan sekunder tua dan hutan sekunder muda berkurang sejak tahun 1998. Demikian juga belukar tua berkurang. Sedangkan luasan belukar muda tetap. Luas hutan rawa dan hutan kerangas tetap.

Perubahan terhadap hutan yang terjadi sebelum tahun 1990 yakni berkurangnya luasan hutan akibat dibukanya ladang dan semakin mudah akses karena dibuka jalan. Dampak dari kedua perubahan dinilai positif. Dampak negatif dari pembukaan ladang adalah berkurangnya binatang sehingga lebih sulit untuk berburu.

7.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Masyarakat Desa Long Levanit maupun pihak lain selama ini tidak pernah mengajukan izin IPPK untuk wilayah Long Levanit, sehingga tidak ada IPPK beroperasi di Long Levanit dan masyarakat tidak mendapatkan tambahan pendapatan dari IPPK.

7.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Karena lahan masih luas, semua rumah tangga memiliki lahan dan belum ada praktek jual beli lahan¹⁴.

7.4 Kondisi rumah penduduk

Semua rumah di Long Levanit beratap seng dan lantai dan dinding terbuat dari papan meranti dan sejenisnya. Dari sepuluh rumah tangga yang diwawancarai, lima punya sambungan ke jaringan PLN untuk listrik dan tiga rumah tangga tidak punya listrik. Tujuh rumah tangga menggunakan sungai untuk WC. Dua rumah tangga punya WC di dalam rumah dan satu rumah tangga punya WC di darat.

¹⁴ Dalam wawancara rumah tangga sembilan dari sepuluh responden mengatakan lahan ladang atau sawah yang ditanami milik sendiri. Hanya 1 keluarga pinjam lahan.

Desa Long Levanit

7.5 Perladangan

Jumlah penduduk di lokasi Mentarang Baru cukup banyak (> 1.000 jiwa), sehingga ketersediaan lahan pertanian di dekat pemukiman terbatas. Enam (dari sepuluh) responden rumah tangga harus jalan kaki lebih dari 45 menit ke lahan ladang atau sawahnya. Umur belukar yang digarap rata-rata di bawah 10 tahun, dan pada tahun 2003 tidak ada masyarakat yang membuka rimba. Separuh rumah tangga mengatakan tidak punya kebun. Ada dua rumah tangga yang punya kebun rotan, namun satu rumah tangga mengatakan kebun rotannya semakin berkurang. Dua rumah tangga punya kebun kokoa dalam kondisi masih baik.

Hanya dua rumah tangga mendapat hasil padi dari ladang yang cukup untuk kebutuhan selama 1 tahun. Tiga rumah tangga mendapat cukup untuk sekitar 10 bulan, satu cukup untuk 8 bulan dan tiga hanya untuk sekitar setengah tahun. Satu rumah tangga tidak mendapat hasil sama sekali dari ladang tahun 2002. Untuk menutupi kekurangan, separuh rumah tangga dapat 'beras miskin' dan membeli beras di warung. Dua rumah tangga hanya membeli dan satu rumah tangga hanya mengharapkan 'beras miskin'. Dua rumah tangga tidak membeli karena hasil ladang cukup.

7.6 Pendapatan uang

Semua responden mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir tidak ada usaha baru. Hampir semua responden rumah tangga menyebut bahwa ladang adalah usaha penting untuk mereka. Namun dari sepuluh responden hasil ladang tahun 2002 dari hanya dua rumah tangga cukup untuk kebutuhan mereka selama 1 tahun. Tujuh rumah tangga tidak mengolah hasil hutan (misalnya tikar, anjat, kayu gergaji). Hanya satu rumah tangga yang mendapatkan uang dari penjualan tikar, dan dua rumah tangga menggesek kayu ulin atau kayu lain sebagai sumber pendapatannya. Informasi dari wawancara rumah tangga memberi kesan bahwa usaha pertanian dan usaha lain masyarakat Long Levanit terbatas.

7.7 Infrastruktur ekonomi

Walaupun Long Levanit belum dapat dijangkau melalui darat dari Malinau Kota, transportasi cukup lancar. Di Mentarang Baru ada taksi ketinting yang selalu siap menyeberangkan orang termasuk sepeda motor. Hasil pertanian masyarakat dapat dijual di Mentarang Baru atau di Pulau Sapi yang dua-duanya mempunyai jumlah penduduk yang cukup tinggi.

Sejak berdiri *Credit Union* (CU) pada akhir tahun 2002 di Malinau Kota masyarakat Mentarang Baru, termasuk warga Long Levanit, ikut aktif di CU.

7.8 Keterjangkauan terhadap energi

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- gas;
- PLN.

Desa Long Levanit

Kayu bakar dan minyak tanah sudah lama digunakan oleh masyarakat dan semakin sulit dijangkau. Gas baru mulai digunakan oleh masyarakat. Listrik didapat dari PLN dan selama ini masih terjangkau oleh warga Long Levanit.

8. Pendidikan

8.1 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di Long Levanit hanya ada sekolah dasar. Apabila anak-anak mau masuk taman kanak-kanak mereka harus ke ibukota kecamatan¹⁵. Sekolah menengah pertama (SMP) juga terdapat di ibukota kecamatan, sedangkan untuk tingkat SMU dan perguruan tinggi anak pergi ke Malinau Kota. Dalam 5 tahun terakhir jumlah sekolah dan kondisi bangunan meningkat, tetapi alat dan buku berkurang. Jumlah staf bertambah dan gaji mereka naik.

8.2 Mutu pendidikan

Tingkat pendidikan guru dan keaktifan guru meningkat. Persentase kelulusan tetap sama, yaitu 100%. Jumlah orang di Desa Long Levanit yang bisa membaca dan menulis meningkat.

Masih ada anak yang meninggalkan sekolah karena ikut ke ladang, namun jumlahnya relatif sedikit. Bahkan ada anak yang sampai putus sekolah karena alasan yang sama; "ikut bekerja di ladang."

9. Kesehatan

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Fasilitas kesehatan di Long Levanit berupa Puskesmas Pembantu. Walaupun dalam 5 tahun terakhir tidak ada peningkatan dari segi jumlah dan kondisi bangunan atau jumlah staf, namun persediaan obat dan peralatan meningkat. Gaji untuk tenaga medis mengalami kenaikan. Fasilitas kesehatan dibiayai dan dijalankan oleh pemerintah.

Masih ada lima anggota masyarakat yang mengetahui tentang obat tradisional. Dalam 5 tahun terakhir jumlah ahli obat tradisional berkurang dan upacara pengobatan tradisional tidak pernah lagi dilaksanakan.

Apabila masyarakat Long Levanit ingin berobat ke Puskesmas mereka pergi ke Pulau Sapi (ibukota kecamatan), yang dapat dijangkau dalam waktu sekitar 15 menit dengan jalan kaki.

9.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih warga Long Levanit dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada tabel 22.

¹⁵ Ibukota kecamatan dapat dijangkau dengan jalan kaki sekitar 15 menit.

Tabel 22: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Levanit.

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Perubahan Mutu	Mengapa
Sungai	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	Menurun	Banyak perusahaan kayu sehingga air keruh
Hujan	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	Mutu tetap	-
Sumur timba	Kurang dari separuh masyarakat	Tidak berubah selama ini	Mutu tetap	-
Air kemasan	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	Mutu tetap	-

Warga mempunyai alat penyimpanan air seperti tangki plastik dan tidak ada alat simpan air umum.

9.3 Kondisi kesehatan masyarakat

Dalam 12 bulan terakhir ada satu bayi lahir yang meninggal pada saat lahir. Berat rata-rata bayi yang baru lahir diperkirakan 2,8 kg. Tidak ada ibu yang meninggal pada saat melahirkan dalam tahun terakhir. Umur ibu rata-rata pada saat kehamilan pertama sekitar 18 tahun. Angka dan penyebab kematian anak-anak pada usia 0 hingga 10 tahun di Long Levanit dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23: Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Long Levanit dalam 12 bulan terakhir

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 - 5 tahun	1 orang	Kurang gizi
6 - 10 tahun	-	-

Dalam 12 bulan terakhir tidak ada orang dewasa yang meninggal. Sebagai penyebab kematian (kecuali kecelakaan) disebut penyakit tua, tidak ada indikasi tentang penyakit tertentu. Umur rata-rata orang yang meninggal karena penyakit atau lanjut usia sekitar 60 tahun.

Desa Long Kapur

Desa Long Kapur



Foto: Peserta diskusi di Desa Long Kapur

Profil Desa Long Kapur

Jumlah rumah tangga: -	Jumlah jiwa: 133
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 8	Jumlah KK: 17
Suku mayoritas: Lundayeh	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Yuel Sia	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Mutang Labo	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: Tidak diketahui	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 15 menit (jalan kaki)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 30 menit (taksi)	Jumlah Pusban: -
	Jumlah Polindes: -

LONG KAPUR

1. Letak dan Lingkungan Desa

Long Kapur adalah salah satu desa di lokasi Mentarang Baru. Sebuah jembatan gantung, menyeberangi Sungai Mentarang, menghubungkan Mentarang Baru dengan Pulau Sapi, ibukota Kecamatan Mentarang. Pemerintah Kabupaten Malinau sedang membangun jembatan menyeberangi Sungai Malinau yang akan membuka hubungan darat dari Malinau Kota sampai ke Pulau Sapi dan Mentarang Baru. Jalur alternatif dari Mentarang Baru ke Malinau Kota adalah dengan ketinting ke Tanjung Lapang (tarif Rp 5.000/orang) dan kemudian naik taksi (tarif Rp 2.000/orang). Perjalanan ini dapat ditempuh dalam waktu 1 jam.

Lahan di sekitar Mentarang Baru sebagian besar datar. Hutan terdapat di bukit-bukit yang agak jauh dari pemukiman dan di daerah Hulu Sungai Mentarang, daerah asal Desa Long Kapur.

2. Sejarah Desa

Pada tahun 1980 masyarakat Long Kapur pindah dari pemukiman lama di dekat Long Berang, Hulu Sungai Mentarang ke pemukiman Mentarang Baru.

Dalam 10 tahun terakhir masyarakat Long Kapur mengalami bencana kekeringan dan banjir. Akibat kemarau pengambilan air jadi semakin jauh, karena di depan Mentarang Baru ada anderas besar. Kekeringan juga menyebabkan padi di ladang kurang baik. Banjir mengakibatkan kerusakan harta milik masyarakat (tidak diberi contoh barang seperti apa yang rusak).

3. Penduduk

Masyarakat Long Kapur berasal dari Suku Lundayeh.

3.1 *Perpindahan penduduk*

Dalam 5 tahun terakhir ada lima warga Long Kapur yang meninggalkan desa untuk sementara waktu karena mencari pekerjaan dan ada lima orang yang pindah ke Malaysia dengan alasan yang sama.

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga yang ada di Long Kapur:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;

Desa Long Kapur

- Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- Lembaga Musyawarah Desa (LMD);
- Kelompok Tani;
- Karang Taruna.

Badan Perwakilan Desa (BPD) terbentuk pada tahun 2003 namun hingga November 2003 belum pernah melakukan konsultasi dengan masyarakat.

4.1 Musyawarah

Frekuensi musyawarah desa dalam 5 tahun terakhir semakin berkurang, menurut Kepala Desa. Namun walaupun frekuensi turun dan mutu musyawarah tetap sama, keputusan semakin berdampak dan dipatuhi oleh masyarakat.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Bantuan untuk pembangunan desa yang pernah diterima termasuk semenisasi pada tahun 1993, bantuan seng, bibit dan pupuk. Kepala Desa menjelaskan pernah dengar akan dibangun jalan darat ke Mentarang Baru, tetapi tidak tahu kapan akan direalisasi.

Responden kurang mampu menjelaskan bahwa bantuan semenisasi jalan desa menurutnya memuaskan. Bantuan seng dari dinas sosial juga dinilai memuaskan. Responden ini menilai bantuan dana Bangdes tidak memuaskan, karena "tidak semua dapat bantuan, tidak rata."

Usulan untuk bantuan yang pernah diajukan dalam 5 tahun terakhir meliputi semenisasi jalan desa, kantor kepala desa, sepeda dayung, bak air dan ternak babi dan sapi. Semua usulan belum ditanggapi oleh pemerintah.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Petugas pemerintah berkunjung ke Desa Long Kapur kurang dari sekali sebulan. Selama ini staf kecamatan dan tim PKK yang mengadakan kunjungan ke Long Kapur.

Kepala Desa berpendapat bahwa dalam 5 tahun terakhir hubungan dengan pemerintah meningkat. Ketika ditanya tentang keterjangkauan dari segi jarak, tingkat kepedulian pemerintah, pelayanan, keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan semua dinilai semakin baik.

Dalam wawancara rumah tangga ada tiga responden menjawab bahwa mereka tidak pernah punya urusan dengan pemerintah dan tidak pernah bertemu. Empat responden merasa dalam 5 tahun terakhir frekuensi bertemu dengan staf pemerintah meningkat dan tiga berpendapat frekuensi semakin menurun. Masyarakat bertemu dengan staf pemerintah terutama di ibukota kecamatan, yang relatif mudah terjangkau (delapan dari sepuluh responden). Separuh responden tidak memberi penjelasan dengan tujuan apa bertemu staf kecamatan. Responden lain menyebut pengajuan usulan (tiga responden), mengambil tunjangan sebagai aparat desa atau

Desa Long Kapur

adat (dua responden), minta penanganan masalah dan minta izin sebagai tujuan bertemu.

Lima responden (dari sepuluh) mengatakan hubungan antara tokoh masyarakat dengan pemerintah dalam 5 tahun terakhir semakin baik. Namun ketika ditanya apakah perhatian pemerintah untuk desa berubah separuh responden tidak memberi penilaian. Jawaban yang lain terbagi: dua menilai meningkat, satu menilai tetap dan dua menilai menurun.

5.3 Sumber dan alat informasi

Informasi tentang program pemerintah diperoleh lewat kunjungan dari pemerintah dan surat edaran. Di Long Kapur tidak ada alat komunikasi seperti telepon atau radio SSB.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Kepala Desa menyebut musik suling dan gong sebagai tradisi yang masih ada. Selama ini perhatian untuk kebudayaan dan upacara tradisional berkurang dan baru setelah reformasi mulai ada perhatian dan usaha untuk menggali dan mengembangkan kembali kebudayaan. Kepala Desa mengatakan dalam pelaksanaan upacara adat waktu semakin singkat dan tujuan sudah berubah. Dia menjelaskan tidak ada orang dari generasi muda yang berminat belajar tentang pengetahuan tradisi.

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Kerjasama di masyarakat Long Kapur dalam 5 tahun terakhir semakin kuat, menurut Kepala Desa. Bentuk gotong royong yang masih biasa dilaksanakan adalah membuat rumah dan *senguyun* (kerja secara bergantian) untuk buat ladang atau sawah. Setiap kali kalau ada kegiatan gotong royong lebih dari separuh warga hadir. Responden kurang mampu menilai bahwa kerjasama dalam 5 tahun terakhir semakin menurun.

Responden kurang mampu mengatakan bahwa tidak mendapatkan bantuan dari keluarganya atau dari tetangga. Kepala Adat menjelaskan bahwa kalau Desa Long Kapur mengalami kekurangan pangan, mereka mengharap bantuan dari pemerintah.

6.3 Konflik

Di tengah masyarakat Long Kapur tidak terjadi konflik menurut Kepala Desa, sedangkan responden kurang mampu mengatakan ada konflik keluarga yang terjadi karena salah paham. Masalah minuman keras menimbulkan permasalahan antara anak muda dan orang tua. Responden kurang mampu mengatakan jumlah konflik dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat.

Untuk menangani konflik baik di dalam desa maupun dengan pihak luar digunakan hukum adat dan hukum negara. Sebagai contoh disebut apabila terjadi perkelahian akan ditetapkan denda oleh lembaga adat. Kalau yang bersangkutan tidak mau membayar denda yang ditetapkan akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditahan dulu sampai denda dibayar. Menurut Kepala Adat lebih dari separuh kasus dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

6.4 Kondisi umum orang miskin

Dalam 5 tahun terakhir orang kurang mampu merasa kondisi hidupnya cenderung memburuk. Hal ini disebabkan karena banyaknya hambatan dalam pekerjaan, namun tidak disebutkan hambatan seperti apa. Orang kurang mampu menilai penghasilan dari pekerjaan (mencari gaharu) tidak sesuai. Penghasilan dari usaha ini dalam 5 tahun terakhir semakin merosot karena gaharu dieksploitasi secara besar-besaran. Dalam wawancara rumah tangga dikatakan bahwa kesejahteraan meningkat karena sudah ada listrik dan jalan desa sudah bagus.

Ketika ditanya tentang kemampuan untuk mendapatkan makanan, uang tunai, pelayanan kesehatan dan pendidikan, responden menjelaskan bahwa untuk makanan pun kadang-kadang tidak terjamin. Tidak ada yang membantu untuk mengatasi masalah ini. Dia mampu mendapatkan uang tunai, namun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terpaksa harus meminjam dari warga lain. Karena anaknya masih kecil sementara ini belum ada kebutuhan biaya pendidikan. Dia menjelaskan bahwa selama ini tidak mendapat bantuan dari keluarga atau orang lain di sekitarnya.

Usulan mengenai bantuan yang diperlukan adalah sarana transportasi seperti roda dua untuk berusaha dan pergi ke ladang, ketinting dan "sarana penerangan karena tidak semua punya listrik."

6.5 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di desa adalah:

- televisi
- radio

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Kepala Desa jenis tata guna lahan yang ada di Long Kapur adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun buah-buahan;
- kebun kokoa;
- kebun kopi;
- kebun jagung;
- hutan.

Lahan yang paling luas di Desa Long Kapur (di sekitar Mentarang Baru) adalah areal sawah dan ladang, yang meliputi lebih dari separuh luas wilayah desa. Di wilayah

Desa Long Kapur

desa lama hutan rimba merupakan tipe tata guna lahan yang paling luas yang diperkirakan sekitar 1.500 hektar. Sejak tahun 1998 luas areal perladangan bertambah sedangkan luas persawahan dan kebun sayur berkurang. Kebun buah-buahan bertambah sejak 5 tahun terakhir, sedangkan kebun kopi dan kakao berkurang karena hasil kurang memuaskan. Malah ada responden rumah tangga yang mengatakan kebun kakao sebanyak 6.000 pokok dan kebun kopi sebanyak 800 pokok ditebang untuk dijadikan ladang. Kebun jagung berkurang karena terkendala pemasaran hasilnya.

Menurut Kepala Desa jenis hutan dan bera yang ada di wilayah Long Kapur adalah:

- hutan rimba (Bhs. Lundayeh *fulung kara*);
- hutan sekunder tua, > 30 tahun (Bhs. Lundayeh *amug kara*);
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun (Bhs. Lundayeh *amug darî*);
- belukar tua, 5 - 10 tahun (Bhs. Lundayeh *amug*);
- belukar, 2 -5 tahun (Bhs. Lundayeh *amug*).

Luas hutan rimba tidak berubah karena selama ini belum pernah digarap oleh perusahaan kayu. Demikian pula luasan hutan sekunder tua dan hutan sekunder muda menurut Kepala Desa tidak berubah. Hutan sekunder merupakan bekas ladang nenek moyang dan terletak di wilayah desa lama di Hulu Sungai Mentarang. Areal belukar tua dan belukar muda dalam 5 tahun terakhir tidak berubah.

Hutan adat Desa Long Kapur terletak di daerah terpencil, 1 hari dengan ketinting dari Mentarang Baru. Hingga sekarang belum ada gangguan atau perubahan terhadap hutan adat. Akses ke daerah itu masih sulit karena sungai sulit dilalui.

7.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Seluruh wilayah hutan adat dilindungi dan hanya digunakan sebagai daerah untuk berburu. Selama ini belum ada pelanggaran seperti penebangan kayu secara besar-besaran di hutan adat ini.

Selama ini masyarakat Long Kapur tidak pernah mengajukan permohonan izin IPPK untuk menggarap hutan adat. Pernah ada pihak dari luar yang menawarkan kerjasama untuk mengeksploitasi hutan adat, namun ditolak oleh masyarakat. Menurut Kepala Desa masyarakat Long Kapur tidak pernah menerima *fee* dari perusahaan IPPK. Responden kurang mampu mengatakan pernah menerima ganti rugi dari IPPK.

7.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Seluruh masyarakat Long Kapur mempunyai keterjangkauan terhadap lahan (dari segi hak, jarak & transportasi dan ketersediaan lahan) dan memiliki lahan. Namun Kepala Desa menjelaskan bahwa dalam 5 tahun terakhir keterjangkauan lahan menurun. Sejak tahun 1980-an terjadi praktek jual beli tanah terutama kepada orang di sekitar Long Kapur.

7.4 Kondisi rumah penduduk

Semua rumah di Long Kapur beratap seng dan lantai dan dinding terbuat dari papan meranti dan sejenisnya. Bahkan ada satu rumah tangga punya atap genteng dan satu rumah tangga lain punya lantai dari papan ulin. Dari sepuluh rumah tangga yang diwawancarai, tujuh punya sambungan ke jaringan PLN untuk listrik dan tiga rumah

Desa Long Kapur

tangga tidak punya listrik. Sembilan rumah tangga menggunakan sungai untuk WC dan satu rumah tangga punya WC di dalam rumah.

7.5 Perladangan

Dari sepuluh responden rumah tangga satu rumah tangga pinjam lahan untuk membuat ladang tahun 2003, yang lain membuka lahan milik sendiri atau membuka rimba. Pada tahun 2003 ada empat rumah tangga membuka rimba. Rata-rata belukar yang digarap berumur di bawah 10 tahun, terutama untuk lahan sawah yang digarap secara kontinyu. Ada tiga rumah tangga yang membuat sawah dan ladang.

Kesulitan yang dialami masyarakat Long Kapur adalah bahwa sebagian besar lahan perladangan dan persawahan terletak jauh dari pemukiman. Hanya dua rumah tangga dapat menjangkau ladangnya dalam 15 menit (satu keluarga dengan jalan kaki dan satu naik sepeda motor). Rumah tangga yang lain memerlukan minimal 1 - 3 jam jalan kaki.

Enam (dari sepuluh) responden rumah tangga mendapatkan hasil ladang atau sawah yang cukup untuk kebutuhan beras selama 1 tahun. Dua rumah tangga lain mendapatkan cukup untuk 10 bulan dan satu rumah tangga hanya untuk 3 bulan. (satu rumah tangga tidak buat ladang pada tahun 2002). Tambahan beras dibeli di warung.

7.6 Pendapatan uang

Tunjangan sebagai aparat desa atau adat disebut oleh empat rumah tangga sebagai sumber pendapatan paling penting. Usaha responden lain bervariasi dari gesek kayu bangunan (dua responden), mencari gaharu (satu responden), berdagang ke Malaysia (satu responden), sumbangan dari anak (satu responden) dan berladang (satu responden). Usaha lain cukup banyak dan beragam. Cukup menarik bahwa tunjangan sebagai aparat desa atau adat disebut oleh empat responden. Berarti secara keseluruhan delapan rumah tangga (dari sepuluh) menganggap tunjangan ini cukup penting. Bahkan tujuh rumah tangga menyebut bahwa usaha baru dalam 5 tahun terakhir adalah tunjangan sebagai aparat desa atau adat. Hanya satu responden mengatakan tidak ada usaha baru dalam 5 tahun terakhir.

Walaupun sembilan dari sepuluh responden rumah tangga memiliki kebun perawatannya berkurang dan hasil dari kebun cenderung menurun.

Hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Long Kapur adalah kayu ulin dan jenis lain oleh tiga responden. Hasil hutan lain adalah babi hutan, gaharu dan sarang burung lumut. Hanya dua rumah tangga membuat produk olahan dari hasil hutan seperti tikar dan bakul.

7.7 Infrastruktur ekonomi

Walaupun Long Kapur belum dapat dijangkau melalui darat dari Malinau Kota, transportasi cukup lancar. Di Mentarang Baru ada taksi ketinting yang selalu siap menyeberangkan orang termasuk sepeda motor (tarif Rp 2.000 per orang atau Rp 5.000 kalau bawa sepeda motor). Hasil pertanian masyarakat dapat dijual di Mentarang Baru atau Pulau Sapi yang dua-duanya punya jumlah penduduk yang cukup banyak.

Sejak berdiri *Credit Union* (CU) pada akhir tahun 2002 di Malinau Kota cukup banyak masyarakat Mentarang Baru termasuk warga Long Kapur ikut aktif di CU.

7.8 Keterjangkauan terhadap energi

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- PLN.

Kayu bakar, minyak tanah dan PLN sudah lama digunakan oleh masyarakat. Kayu bakar sekarang semakin sulit dijangkau sedangkan minyak tanah dan listrik dari PLN masih terjangkau oleh warga Long Kapur.

8. Pendidikan

8.1 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di Long Kapur ada sekolah dasar. Apabila anak-anak mau masuk taman kanak-kanak mereka harus ke ibukota kecamatan. Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga terdapat di ibukota kecamatan, sedangkan untuk tingkat SMU dan perguruan tinggi anak pergi ke Malinau Kota.

Dalam 5 tahun terakhir jumlah sekolah tidak berubah dan kondisi bangunan menurun karena tidak ada perawatan. Alat dan buku serta jumlah staf bertambah dan gaji mereka naik.

8.2 Mutu pendidikan

Tingkat pendidikan guru dan keaktifan guru meningkat. Persentase kelulusan tetap sama, yaitu 100%. Jumlah orang di Desa Long Kapur yang bisa membaca dan menulis meningkat.

Masih ada anak yang meninggalkan sekolah karena ikut ke ladang atau bekerja, namun jumlahnya relatif sedikit. Menurut keterangan guru, alasan anak putus sekolah adalah atas "keinginan sendiri karena sekarang tidak dipungut biaya." Pada tahun 2003 100% murid lulus dan ada sekitar 30 murid baru masuk kelas 1.

9. Kesehatan

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Desa Long Kapur sendiri tidak terdapat fasilitas kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan. Fasilitas terdekat adalah Puskesmas di Pulau Sapi, yang dapat dijangkau dengan jalan kaki 15 menit atau dengan sepeda motor dengan biaya Rp 10.000 pergi pulang.

Desa Long Kapur

Dengan kondisi seperti ini Kepala Desa mengatakan bahwa keterjangkauan pelayanan kesehatan dalam 5 tahun terakhir tidak berubah, baik dari segi fasilitas dan kondisinya maupun staf dan obat-obatan.

9.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih warga Long Kapur dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Kapur

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Mengapa	Perubahan Mutu
Sungai	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	-	-

Warga Long Kapur tidak punya tempat menyimpan air khusus dan tidak ada alat menyimpan air umum.

9.3 Kondisi kesehatan masyarakat

Dalam 12 bulan terakhir ada satu anak yang lahir. Berat rata-rata bayi yang baru lahir diperkirakan sekitar 2,8 kg. Ada satu bayi yang meninggal pada saat kelahiran dalam 12 bulan terakhir, sedangkan tidak ada ibu yang meninggal pada saat melahirkan dalam 12 bulan terakhir. Umur rata-rata ibu pada saat kehamilan pertama adalah 18 tahun.

Angka dan penyebab kematian anak-anak pada usia 0 hingga 10 tahun di Desa Long Kapur dapat lihat pada Tabel 25.

Tabel 25: Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Long Kapur dalam 12 bulan terakhir

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 - 5 tahun	Tidak ada	-
6 - 10 tahun	Tidak ada	-

Tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian. Diperkirakan umur rata-rata orang yang meninggal karena penyakit atau lanjut usia adalah antara 50 - 59 tahun.

Desa Bintuan



Foto: Warga masyarakat di Desa Bintuan

Profil Desa Bintuan

Jumlah rumah tangga: -	Jumlah jiwa: 81
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 8	Jumlah KK: 16
Suku mayoritas: Punan	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Yahuda Sinau	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Danil Laing	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: Tidak diketahui	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 2 jam (ketinting)	Jumlah Puskesmas: -
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 3 jam (ketinting)	Jumlah Pusban: -
	Jumlah Polindes: -

BINTUAN

1. Letak dan Lingkungan Desa

Bintuan adalah salah satu desa di lokasi Paking, Kecamatan Mentarang. Paking terletak dekat Kuala Sungai Tubu, sekitar 2 jam dengan ketinting ke hulu dari ibukota kecamatan Pulau Sapi. Lahan di sekitar Bintuan berbukit-bukit dan sebagian lereng cukup terjal.

Pada tahun 1990-an perusahaan HPH PT. Susukan Agung beroperasi di sekitar Bintuan, dan *camp* pelegoan batang terdapat sedikit di hulu lokasi Paking. Selama beroperasi, PT. Susukan Agung membantu masyarakat di Paking dengan pembuatan dan pembinaan persawahan. Areal persawahan terletak di sekitar pemukiman dan luasannya terbatas.

2. Sejarah Desa

Masyarakat Bintuan pindah pada tahun 1987 dari Desa Bintuan yang terletak di Hulu Sungai Mentarang dan bergabung di lokasi Paking.

Seperti desa lain di Kecamatan Mentarang dan di Malinau Selatan masyarakat Bintuan mengalami banjir yang dahsyat pada tahun 1999. Akibat banjir ini banyak harta hanyut dan kebun rusak. Dalam 10 tahun terakhir kebun masyarakat Bintuan pernah kena serangan hama sehingga tidak ada panen. Selain itu masyarakat pernah mengalami "kelaparan", kesulitan untuk mendapatkan beras, sehingga mengkonsumsi makanan lain seperti ubi kayu, pisang atau sagu.

3. Penduduk

Masyarakat Bintuan berjumlah 81 jiwa (sensus P4B, Mei 2003) dan berasal dari Suku Punan. Sejak 1998 ada tiga warga Bintuan yang meninggalkan desanya untuk sekitar 3 tahun untuk mencari pekerjaan dan ada satu ibu pindah dari Bintuan karena mengikuti suaminya.

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga-lembaga yang ada di desa adalah:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);

Desa Bintuan

- Lembaga Musyawarah Desa (LMD);
- Kelompok Tani;
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

4.1 Musyawarah

Musyawarah desa dalam 5 tahun terakhir semakin menurun. Menurut Kepala Desa mutu musyawarah masih seperti dulu, namun frekuensi musyawarah semakin jarang dan dampak keputusan semakin lemah dan cenderung diabaikan.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Bantuan dari pemerintah yang diterima rutin setiap tahun adalah dana pembangunan desa (Bangdes), biaya operasional dan subsidi sembilan bahan pokok (sembako). Ketika masyarakat kurang mampu ditanya mengenai bantuan yang pernah diperoleh, mereka menjawab tidak menerima bantuan selama ini. Mereka mengusulkan perumahan dan pakaian untuk anak-anak sebagai bantuan yang diperlukan.

Dalam 5 tahun terakhir Kepala Desa giat dalam mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah. Untuk pembangunan prasarana di desa pernah diminta 20 buah rumah, bahan bangunan seperti seng dan paku, pembangkit listrik tenaga surya, tempat penampungan air dan rumah dinas untuk kepala desa. Selain itu pernah diminta kendaraan dinas sebagai inventaris desa. Untuk pengembangan kegiatan ekonomi rakyat pernah diminta bantuan ternak ayam dan sapi. Semua permohonan ini belum dijawab oleh instansi terkait.

6.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Masyarakat Bintuan selama ini dikunjungi oleh Staf Kecamatan Mentarang dan juga pernah dikunjungi oleh Bupati dan anggota DPRD. Frekuensi kunjungan kurang dari sekali sebulan.

Dalam pandangan Kepala Desa keterjangkauan (jarak), tingkat kepedulian dan pelayanan pemerintah dalam 5 tahun terakhir tidak berubah. Keterbukaan informasi dinilai semakin baik, sedangkan partisipasi dalam pengambilan keputusan masih seperti dulu.

Ketika responden rumah tangga ditanya tentang perubahan hubungan dengan pemerintah dalam 5 tahun terakhir separuh responden (lima dari sepuluh) mengatakan selama ini tidak pernah ada urusan dengan pemerintah. Responden yang lain menilai frekuensi bertemu, terutama di ibukota kecamatan, meningkat. Tujuan utama bertemu adalah untuk menyampaikan usulan (empat responden). Pandangan tentang perubahan hubungan tokoh masyarakat dengan pemerintah terbagi sebagai berikut: sepertiga menilai membaik, sepertiga mengatakan menurun dan sepertiga tidak memberi jawaban. Empat responden dari sepuluh berpendapat bahwa perhatian pemerintah menurun, karena usulan tidak ditanggapi. Sedangkan dua responden mengatakan perhatian meningkat.

Desa Bintuan

5.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat Bintuan memperoleh informasi melalui kunjungan, surat edaran dan radio SSB.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Kepala Adat mengatakan selama ini sudah tidak ada upacara tradisional dan tidak ada ahli pengobatan tradisional. Dalam wawancara rumah tangga ada dua responden yang menyebut ada orang yang punya pengetahuan tentang pengobatan tradisional.

Suatu kebiasaan yang masih dipertahankan di masyarakat Bintuan adalah *furut* (Bhs. Punan), yaitu 'emas kawin' yang diberikan oleh keluarga mempelai pria pada keluarga mempelai wanita. *Furut* bisa berupa barang antik seperti gong, guci tapi juga barang seperti mesin ketinting, *chainsaw*, mesin gantung (*outboard engine*). Ada satu responden rumah tangga menceritakan bahwa dulu punya *chainsaw* tapi tidak ada lagi karena "buat pembayaran *furut*".

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Menurut Kepala Adat tingkat kerjasama di Desa Bintuan dalam 5 tahun terakhir menurun. Bentuk gotong royong yang masih dilaksanakan adalah kerja bakti untuk kebersihan lingkungan pemukiman dan kerjasama (*senguyun*) di ladang. Sedangkan orang kurang mampu menilai tingkat kerjasama masih seperti dulu.

Responden kurang mampu mengatakan pernah dibantu oleh keluarganya tetapi tidak mendapat bantuan dari warga lain. Kepala Adat menjelaskan bahwa kalau Desa Bintuan mengalami kekurangan pangan mereka mengharap bantuan dari pemerintah.

6.3 Konflik

Menurut Kepala Adat hanya terjadi konflik tentang lahan, yaitu tentang batas desa Paking Lama dengan Paking Baru. Dalam 5 tahun terakhir jumlah konflik cenderung menurun. Responden kurang mampu juga menyebut permasalahan tentang lahan. Dikatakan bahwa konflik lahan jarang terjadi dan cenderung menurun. Selain itu ada konflik keluarga, namun tidak sering terjadi dan jumlahnya cenderung menurun.

Penanganan konflik dilakukan dengan menggunakan hukum adat dan hukum negara, namun tidak diberi penjelasan tentang prosesnya. Cara ini dipakai untuk konflik di dalam desa maupun dengan pihak luar. Seandainya masyarakat tidak mematuhi keputusan lembaga adat akan dibawa ke pengadilan negeri, namun selama ini semua kasus dapat diselesaikan dengan hukum adat.

6.4 Situasi umum orang miskin

Inti permasalahan yang dihadapi oleh rumah tangga kurang mampu adalah kurangnya pendapatan. Istri mengatakan: "suami kadang-kadang memberi Rp 50.000 - Rp 100.000. Sangat tidak cukup untuk kebutuhan dapur." (Tidak disebutkan jumlah ini untuk berapa lama.) Rendahnya penghasilan disebabkan karena tidak adanya

Desa Bintuan

pekerjaan dan hasil ladang yang tidak menentu. Ibu tersebut menjelaskan bahwa kondisi rumah tangga berfluktuasi, " Kadang-kadang ada sedikit uang, kadang-kadang garam di dapur tidak ada." Menurutnya " bila suaminya dapat Rp 100.000 dia tidak berusaha mencari (uang) lagi, kalau sudah habis baru mencari uang lagi."

Walaupun kondisi rumah tangga seperti ini mereka mengatakan mampu mendapatkan pendidikan, memenuhi kebutuhan makanan dan uang tunai. Hanya untuk biaya berobat tidak mampu. Kemampuan untuk mendapatkan pendidikan hanya sampai tingkat SD.

6.5 Hiburan

Sebagai hiburan Kepala Adat menyebut:

- tarian gong;
- acara pernikahan;
- televisi;
- radio;
- tape.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Kepala Desa jenis tata guna lahan yang ada di Desa Bintuan adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- kebun buah-buahan;
- kebun kokoa;
- kebun kopi;
- hutan.

Tipe tata guna lahan (garapan) yang paling luas di wilayah Desa Bintuan adalah ladang. Luasan hutan rimba diperkirakan sekitar 5.000 hektar, sehingga lebih luas dari luas areal perladangan. Sejak 1999 luas areal perladangan bertambah. Melalui program HPH Bina Desa PT. Susukan Agung masyarakat membuat sawah. Namun sejak PT. Susukan Agung tutup pada tahun 2000 masyarakat tidak berminat lagi untuk mengerjakan sawah, sehingga luasnya berkurang.

Sepuluh responden rumah tangga (lima dari sepuluh) mengatakan punya kebun sayur dengan luas yang kecil sampai sangat kecil (4 x 6 meter), dan luas yang digarap tetap. Luas kebun buah-buahan tetap, namun sebagian rumah tangga hanya punya beberapa pokok. Sejak terjadi banjir dan kokoa kena penyakit, kebun kokoa tidak dirawat. Sebagian kebun ditebang pada tahun 2003 untuk membuat ladang. Ada tujuh rumah tangga yang mengatakan luas kebun kokoa semakin berkurang atau sudah ditebang, hanya satu rumah tangga tetap memelihara kebunnya. Demikian juga kebun

Desa Bintuan

kopi: dua rumah tangga menyebut luas berkurang dan satu rumah tangga mengatakan luasan kebun kopinya tetap.¹⁶

Menurut Kepala Desa jenis hutan dan bera yang ada di wilayah Desa Bintuan adalah:

- hutan rimba (Bhs. Punan *tuan*);
- hutan sekunder tua, > 30 tahun (Bhs. Punan *balah token*);
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun (Bhs. Punan *balah token*);
- belukar tua, 5 - 10 tahun (Bhs. Punan *balah*);
- belukar, 2 -5 tahun (Bhs. Punan *balah*);
- hutan kerangas (Bhs. Punan *tano nait cerow*).

Luas hutan rimba diperkirakan tetap (sekitar 5.000 hektar). Hutan adat Desa Bintuan dapat dijangkau dengan perjalanan ketinting selama setengah hari. Hutan adat selama ini belum pernah digarap oleh perusahaan. Luas hutan sekunder tua dan hutan sekunder muda tetap. Luas belukar tua tetap sedangkan luasan belukar muda bertambah dalam 5 tahun terakhir.

Ketika Kepala Desa ditanya tentang perubahan hutan sebelum tahun 1990, dia mengatakan tidak ada perubahan, karena belum pernah digarap oleh perusahaan kayu.

7.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Ketika Kepala Desa ditanya tentang 'hutan lindung', dia sebut ada kawasan hutan seluas 5.000 hektar. Kawasan ini digunakan untuk masyarakat. "Kalau ada perusahaan masuk maka hasilnya dibagi ke masyarakat. Kalau mau berburu dan mencari gaharu oleh orang luar harus bayar kas desa." Apabila ada orang yang melanggar ketentuan ini akan dipanggil dan dikenakan denda.

Desa Bintuan pernah mengajukan izin IPPK, namun izin belum diterbitkan. Menurut Kepala Desa tidak ada pihak dari luar yang pernah mengajukan izin IPPK untuk wilayah Bintuan. Pengajuan permohonan izin IPPK didasarkan pada musyawarah dan dipilih beberapa orang untuk berunding dengan pengusaha. Hanya ada dua rumah tangga yang dapat bagian *fee* IPPK dari keluarga di Paking Lama di mana ada IPPK.

Banyak masyarakat menyebut bahwa ketika PT. Susukan Agung masih beroperasi mereka memperoleh gaji dari perusahaan ini. Mereka juga dapat sumbangan seperti seng, mesin genset dan BBM, dan bibit. Sejak PT. Susukan Agung tutup masyarakat tidak mendapat bantuan perusahaan.

7.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Karena wilayah desa luas dan jumlah penduduk sedikit, masyarakat Desa Bintuan tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan lahan untuk berladang atau berkebun. Semua rumah tangga memiliki lahan. Menurut Kepala Desa dalam 5 tahun terakhir keterjangkauan terhadap lahan meningkat. Selama ini belum terjadi praktek jual beli lahan di Desa Bintuan.

¹⁶ Kepala Desa memperkirakan luas kebun kopi di Desa Bintuan tidak berubah.

7.4 Kondisi rumah penduduk

Semua rumah di Bintuan beratap seng dan lantai dan dinding terbuat dari papan meranti dan sejenisnya. Bahkan ada satu rumah tangga punya atap genteng. Dari sepuluh rumah tangga yang diwawancarai delapan punya sambungan ke genset desa, namun dikatakan karena tidak dapat lagi minyak dari perusahaan, genset jarang hidup. Satu rumah tangga mengatakan tidak punya listrik dan satu rumah tangga menyambung ke genset pribadi warga lain. Sembilan rumah tangga menggunakan sungai untuk WC dan satu rumah tangga punya WC di dalam rumah.

7.5 Perladangan

Walaupun kelihatan lahan banyak tersedia ternyata enam (dari sepuluh) responden rumah tangga perlu 1 jam lebih jalan kaki atau pakai ketinting untuk menuju ke ladangnya. Empat rumah tangga lain dapat menjangkau ladangnya dengan perjalanan sekitar 30 menit (dengan ketinting). Dari sepuluh responden rumah tangga hanya satu yang pinjam lahan untuk membuat ladang tahun 2003. Tujuh membuka lahan sendiri, dan dua membuka hutan rimba. Tidak ada rumah tangga yang membuka belukar dengan umur di bawah umur 10 tahun. Kenyataan ini menggambarkan bahwa siklus ladang bergilir balik masih bisa diterapkan dengan baik.

Dari sepuluh responden rumah tangga hanya dua dapat hasil ladang cukup untuk kebutuhan beras selama 1 tahun. Sebagian besar (enam responden) hanya dapat cukup untuk 3 bulan atau kurang. Untuk menutupi kekurangan beras mereka membeli (lima rumah tangga), berharap 'beras miskin' (dua rumah tangga) atau sebagian dibeli dan ditambah dengan 'beras miskin' (satu rumah tangga).

7.6 Pendapatan uang

Usaha utama yang disebut dalam wawancara rumah tangga adalah: gaji sebagai aparat desa (tiga responden), penjualan ternak (tiga responden), buruh harian (dua responden), mencari gaharu (satu responden) dan menjual tikar (satu responden). Usaha lain yang ditekuni beragam: dari mencari gaharu, menjual buah dan babi hutan, menjual hasil kebun dan ternak, menggesek kayu, menjual kayu bakar, sampai gaji sebagai staf desa, karyawan perusahaan, dan juru batu.

Semua rumah tangga menyebut dalam 5 tahun terakhir ada usaha baru: gaji sebagai staf desa (dua responden), menjual ternak (dua responden), upah sebagai buruh harian (dua responden), menjual daging babi hutan (dua responden), juru batu (satu responden), gesek kayu (satu responden), karyawan perusahaan (satu responden), menjual buah (satu responden), menjual kerajinan (satu responden), dan menjual kayu bakar (satu responden)¹⁷.

Ketika ditanya tentang sumber pendapatan dari hasil hutan maupun pengolahan hasil hutan delapan responden menyebut gaharu sebagai salah satu hasil yang diusahakan (dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda). Berjualan daging babi hutan juga penting menurut lima rumah tangga. Pembuatan dan penjualan kerajinan seperti tikar disebut tujuh responden dan penjualan anjat disebut oleh enam responden, menggambarkan bahwa ketrampilan ini tetap menunjang kehidupan masyarakat.

¹⁷ Karena satu responden bisa menyebut sampai 2 atau 3 usaha baru total lebih dari sepuluh responden.

Desa Bintuan

7.7 Infrastruktur ekonomi

Di Desa Bintuan tidak ada pasar dan tempat terdekat untuk menjual hasil pertanian, hutan atau kerajinan adalah Pulau Sapi. Transportasi ke Pulau Sapi hanya bisa dengan ketinting dengan muatan terbatas.

7.8 Keterjangkauan terhadap energi

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- listrik desa.

Kayu bakar, minyak tanah dan listrik desa sudah lama digunakan oleh masyarakat. Menurut Kepala Desa kayu bakar sekarang sudah tidak dapat dijangkau lagi. Minyak tanah dan listrik desa dikatakan semakin sulit dijangkau. Listrik desa mengalami kendala karena tidak diberi minyak lagi oleh perusahaan, sedangkan masyarakat tidak mampu membelinya.

8. Pendidikan

8.1 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di Desa Bintuan ada sekolah dasar dan anak-anak yang melanjutkan ke SMP pergi ke Pulau Sapi dan untuk SMU ke Malinau Kota. Tidak ada anak dari Desa Bintuan yang melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

Dalam 5 tahun terakhir jumlah sekolah tidak meningkat, tetapi kondisi gedung SD yang ada lebih baik. Dari segi alat dan buku serta tenaga guru (enam orang) dan gaji guru tidak ada perubahan.

8.2 Mutu pendidikan

Tingkat pendidikan guru meningkat sejak tahun 1999, dan keaktifan guru masih dianggap sama. Persentase kelulusan meningkat dan pada ujian tahun 2003 mencapai 100%. Tingkat orang yang bisa membaca dan menulis tetap sama. Dalam diskusi kelompok dikatakan bahwa ada murid yang sudah lulus SD namun belum bisa membaca.

Ada sedikit anak yang meninggalkan sekolah karena ikut ke ladang atau karena malas.¹⁸ Alasan anak-anak putus sekolah karena pengaruh orang tua yang mengajak mereka ke ladang, karena menikah atau karena sudah lebih tua dari teman kelas, sehingga mereka merasa 'minder' dibandingkan dengan teman sekelasnya dan akhirnya mereka berhenti sekolah. Pada tahun pengajaran 2003 -2004 ada lebih dari 40 murid di kelas 1.

¹⁸ Ketika guru ditanya tentang anak putus sekolah, dia mengatakan banyak anak bolos.

9. Kesehatan¹⁹

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Desa Bintuan ada Puskesmas Pembantu, yang terletak di Paking Lama sekitar 10 menit jalan kaki dari pemukiman Bintuan. Puskesmas Pembantu ini dibangun dan dijalankan oleh pemerintah. Dalam 5 tahun terakhir tidak ada perubahan dari segi jumlah fasilitas kesehatan, namun kondisi Puskesmas Pembantu semakin menurun. Jumlah staf tetap, yaitu satu orang. Sedangkan persediaan obat dan alat serta perubahan gaji tenaga medis tidak dapat dijawab. Ada juga lima orang yang punya pengalaman sebagai 'dukun beranak' (bidan kampung).

9.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih warga Bintuan dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Bintuan

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Mengapa	Perubahan Mutu	Mengapa
Sungai	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	-	Meningkat	Karena tidak ada operasi perusahaan PT. Susukan Agung
Hujan	Kurang dari separuh masyarakat	Tidak berubah selama ini	-	Tidak berubah selama ini	-
Pancuran mata air	Kurang dari separuh masyarakat	Tidak berubah selama ini	Tidak semua masyarakat tinggal dekat mata air	Tidak berubah selama ini	-

Selama ini masyarakat tidak pernah mengalami kesulitan memperoleh air, karena tidak ada kemarau panjang.

9.3 Kondisi kesehatan masyarakat

Dalam 12 bulan terakhir ada dua bayi lahir dan tidak ada bayi yang meninggal pada saat kelahiran. Diperkirakan rata-rata berat bayi yang baru lahir antara 2 - 3 kg. Selama tahun terakhir tidak ada ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Dikatakan oleh Kepala Desa bahwa rata-rata umur ibu pada saat kehamilan pertama adalah 20 tahun. Berdasarkan informasi dari sekolah, terkesan umur pernikahan (dan kehamilan pertama) lebih muda, mungkin sekitar 15 - 17 tahun.

¹⁹ Informasi ditanya kepada Kepala Desa, karena tidak ada perawat di Desa Bintuan.

Desa Bintuan

Angka dan penyebab kematian anak-anak pada usia 0 - 10 tahun di Desa Bintuan dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27: Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Bintuan dalam 12 bulan terakhir

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 - 5 tahun	Tidak ada	-
6 - 10 tahun	Tidak ada	-

Dalam tahun terakhir tidak ada anak-anak pada usia 0 - 10 tahun yang meninggal dan juga tidak ada orang dewasa yang meninggal. Penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di Desa Bintuan adalah TBC. Diperkirakan umur rata-rata orang yang meninggal karena penyakit/lanjut usia antara 40 - 45 tahun.

Desa Long Pada



Foto: Pemukiman di Desa Long Pada

Profil Desa Long Pada

Jumlah rumah tangga: -	Jumlah jiwa: 129
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: 18	Jumlah KK: 32
Suku mayoritas: Punan	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Liwah Irang	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Ilah Baya	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: Tidak diketahui	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 3 hari mudik (ketinting/ <i>longboat</i>)	Jumlah Puskesmas:-
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 3 hari mudik (ketinting/ <i>longboat</i>)	Jumlah Pusban: -
	Jumlah Polindes: -

LONG PADA

1. Letak dan Lingkungan Desa

Long Pada adalah salah satu dari delapan pemukiman masyarakat Punan yang ada di daerah Hulu Sungai Tubu²⁰, Kecamatan Mentarang. Untuk menjangkau Long Pada dari Pulau Sapi, ibukota kecamatan, perlu perjalanan sekitar 3 hari atau lebih, tergantung kondisi air. Perjalanan ini memerlukan biaya besar, kalau menggunakan perahu ketinting biaya mencapai Rp 1.500.000, sedangkan kalau menggunakan perahu *longboat* harga di atas Rp 2.000.000. Karena Sungai Tubu sangat sempit apabila terjadi banjir transportasi sungai berhenti total karena risiko perjalanan terlalu besar.

Desa Long Pada terletak dekat Kuala Sungai Pada dan bukit-bukit di sekitar pemukiman sangat terjal, sehingga lahan baik untuk berladang dan berkebun terbatas. Selama ini hutan di daerah Sungai Tubu belum pernah digarap oleh perusahaan kayu, sehingga sepanjang Sungai Tubu masih terdapat hutan rimba yang lebat.

2. Sejarah Desa

Sejak 1985 masyarakat Long Pada bermukim di pemukiman sekarang. Sebelumnya mereka tinggal di Long Betung, anak Sungai Pada, masih dalam wilayah Desa Long Pada dan tidak terlalu jauh dari pemukiman sekarang.

Salah satu kesulitan yang dihadapi masyarakat di Long Pada (dan di pemukiman masyarakat Punan lain di Hulu Sungai Tubu) adalah wabah penyakit. Kepala Desa menyebut wabah penyakit kerumut sebagai bencana yang pernah dialami oleh masyarakat Long Pada. Akibat wabah ini banyak warga meninggal dan akhirnya masyarakat berpencar-pencar di hutan dalam upaya untuk terbebas dari penularan penyakit.

Selain itu masyarakat Long Pada pernah mengalami 'kelaparan' (kehabisan persediaan makanan, seperti beras dan ubi kayu). Untuk mengatasi bencana ini masyarakat pergi *mufut*, "bercerai-berai masuk hutan cari makan di hutan". Bencana banjir pernah melanda Long Pada dan mengakibatkan kebun pisang, kokoa dan kopi rusak atau hanyut dengan banjir.

3. Penduduk

Jumlah penduduk Long Pada menurut sensus P4B (Mei 2003) berjumlah 93 jiwa. Seluruh masyarakat berasal dari Suku Punan. Ketika ditanya jumlah penduduk yang untuk sementara waktu meninggalkan desa, Kepala Desa mengatakan bahwa ada sebelas keluarga (sekitar 50 orang) yang sedang *mufut*, karena kehabisan beras. Dalam 5 tahun terakhir ada tiga keluarga (sepuluh orang) yang pindah ke Sungai Bahau, Kecamatan Pujungan untuk mencari pekerjaan dan ada satu orang pindah ke Malaysia untuk mencari pekerjaan.

²⁰ Secara resmi ada 5 desa di Hulu Sungai Tubu, namun masyarakat terbagi dalam 8 pemukiman.

4. Kelembagaan di Desa

Menurut Kepala Desa lembaga-lembaga yang ada di Desa Long Pada adalah:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Menurut Kepala Desa selama ini LKMD dan LMD tidak berfungsi. BPD, katanya, sudah terbentuk pada tahun 2000, namun sejak itu belum pernah mengadakan konsultasi dengan masyarakat dan tidak pernah membuat suatu keputusan.

4.1 Musyawarah

Baik Kepala Desa maupun orang kurang mampu berpendapat bahwa musyawarah desa dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat. Kepala Desa menilai mutu, frekuensi dan dampak keputusan semua meningkat.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Program bantuan pemerintah sejak tahun 1999 meliputi pembangunan gedung SD (pada tahun 2001/2002), pembangkit listrik tenaga surya sebanyak 10 buah (pada tahun 2002), 1 unit radio SSB (pada tahun 2002). Bantuan lain adalah asuransi kesehatan (Askes) sukarela untuk aparat desa yang meringankan biaya pengobatan (sejak 1999), 'beras miskin' (sejak 1999) dan subsidi sembako (tahun 2003). Kepala Desa menilai bantuan dalam 5 tahun terakhir tetap. Ketika masyarakat kurang mampu ditanya tentang bantuan yang pernah diterima dijawabnya bahwa tidak pernah dapat bantuan apa-apa. Responden tersebut mengusulkan bantuan untuk biaya pengobatan, minta bantuan sembako, penerangan, gilingan padi dan mesin ketinting.

Semua usulan yang diajukan oleh masyarakat Long Pada dalam 5 tahun berkaitan dengan peningkatan prasarana dan sarana desa. Usulan meliputi bantuan penambahan rumah penduduk dan rumah dinas guru, semenisasi jalan desa, tambahan pembangkit listrik tenaga surya, dan air bersih. Juga pernah diminta bantuan mesin rumput dan mesin ketinting 8 PK. Seluruh usulan ini belum ada realisasi.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Desa Long Pada dalam 4 tahun terakhir dikunjungi sebanyak 3 kali. Kunjungan dilakukan oleh staf kecamatan, termasuk camat dan ada kunjungan dari petugas Puskesmas.

Desa Long Pada

Dari segi berhubungan dengan pemerintah tidak ada perubahan bagi masyarakat Long Pada, mereka tetap masih menilai sulit. Dari segi lain, Kepala Desa berpendapat ada peningkatan; kepedulian pemerintah, pelayanan, keterbukaan informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan meningkat.

Dalam wawancara rumah tangga (sepuluh responden), enam orang mengatakan frekuensi bertemu petugas pemerintah meningkat, tiga menjawab tidak pernah punya urusan dengan pemerintah dan satu menjawab frekuensi sama. Sebagai tempat bertemu separuh responden menyebut di desa sendiri, walaupun hanya ada 3 kunjungan dalam 4 tahun terakhir. Berarti kunjungan tersebut mengesankan karena sebelumnya mungkin tidak pernah dikunjungi.

Tujuan bertemu adalah untuk menyampaikan usulan (empat responden), mengikuti sosialisasi (dua responden), urusan lain (tiga responden) dan satu responden tidak memberi jawaban.

Hubungan antara tokoh dengan pemerintah menurut tujuh responden meningkat (dan tiga responden lain tidak menjawab). Dari segi perhatian, tiga responden merasa meningkat, dan tiga menilai sama saja (empat orang tidak menjawab).

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Kepala Desa mengatakan sekarang tidak lagi melaksanakan upacara adat, karena bertentangan dengan agama. Katanya dulu ada upacara seperti *mekan duru* (upacara memberi makan kepada Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat), *petivan* (upacara pernikahan), *ngubuh* (upacara penguburan) dan *nolang* (upacara pembersihan jenazah/tulang).

Menurut Kepala Desa lebih dari separuh generasi muda berminat dan belajar tentang pengetahuan tradisional.

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Baik Kepala Desa maupun responden kurang mampu berpendapat bahwa kerjasama dalam 5 tahun terakhir meningkat. Bentuk kerjasama dalam tahun terakhir seperti *senguyun* (kerja secara bergiliran untuk membuat ladang), atau gotong royong membuat rumah dan lapangan bola volley di desa.

Responden kurang mampu menceritakan bahwa dia pernah dibantu oleh keluarga maupun warga lain. Bantuan yang diterima dari keluarganya berupa daging babi hutan dan pakaian. Sebagian contoh bantuan dari warga lain disebutkan: bantuan obat yang diberikan oleh Edmond (CIFOR). Kepala Desa mengatakan kalau masyarakat mengalami kekurangan pangan dibantu oleh sesama masyarakat dan mengharap bantuan dari pemerintah.

6.3 Konflik

Konflik yang pernah terjadi di Long Pada, walaupun dikatakan jarang, adalah konflik keluarga dan suku. Sebagai sebab konflik keluarga disebut pembagian uang Bangdes

Desa Long Pada

yang dianggap tidak adil. Konflik suku dipicu oleh pencari gaharu dari luar (dari suku lain) yang tidak membayar kepada lembaga adat sebelum masuk wilayah Long Pada. Menurut responden kurang mampu hanya terjadi konflik keluarga yang disebabkan pembagian barang (seng dan beras) atau uang (Bangdes) tidak adil.

Penanganan konflik dilakukan dengan hukum adat dan hukum negara. Kepala Desa memberi contoh tentang kecelakaan dengan alat berburu yang kena rumah penduduk lain. Dijatuhkan sanksi adat dulu sebesar Rp 50.000. Kalau yang bersangkutan tidak mau membayar denda tersebut akan diserahkan ke hukum negara. Namun dikatakan selama ini semua kasus dapat diselesaikan oleh lembaga adat.

6.4 Situasi umum orang miskin

Responden kurang mampu merasa bahwa kondisi penghidupannya dalam 5 tahun terakhir tidak berubah. Akar permasalahan menurutnya adalah rendahnya penghasilan baik dari ladang maupun mencari gaharu. Peralatannya untuk berburu, seperti sumpit dan anjing, kurang. Selain itu dia mengatakan bantuan pemerintah kurang. Dia mengatakan "kondisi tidak bisa membaik karena masalah kemampuan diri sendiri ...". Bantuan yang diharapkannya adalah biaya berobat, bantuan sembako, listrik, gilingan padi dan alat transportasi (mesin ketinting).

Walaupun kondisinya seperti ini, responden mengatakan masih mampu untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan mencari makanan. Dengan catatan bahwa dia hanya mampu mencari biaya berobat kalau penyakit ringan karena membeli obat langsung sendiri.

6.5 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di desa adalah:

- musik (radio dan tape);
- *narik*, adat menari bersama-sama menyambut atau melepas tamu.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Kepala Desa jenis tata guna lahan yang ada di Desa Long Pada adalah:

- ladang;
- kebun sayur;
- kebun buah-buahan;
- kebun kokoa;
- kebun kopi;
- kebun pisang;
- hutan.

Desa Long Pada

Tipe tata guna lahan yang paling luas di wilayah Desa Long Pada adalah hutan rimba. Areal perladangan mulai bertambah sejak tahun 1999 karena masyarakat Long Pada bermukim tetap di satu tempat. Tata guna lahan lain yang penting untuk menunjang hidup masyarakat di Long Pada adalah kebun ubi kayu dan pisang, yang luasannya tetap. Kebun kokoa dan kopi dibuat, tetapi skala kecil dan berdasarkan wawancara rumah tangga cenderung berkurang; dua dari tiga pemilik kebun kokoa mengatakan berkurang dan satu dari tiga pemilik kebun kopi mengatakan luasan berkurang. Luas *lepu'un* (bekas pemukiman dimana terdapat pohon buah-buahan) cenderung bertambah.

Menurut Kepala Desa jenis hutan dan bera yang ada di wilayah Desa Long Pada adalah:

- hutan rimba (Bhs. Punan *tano tuan*);
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun;
- belukar tua, 5 - 10 tahun ;
- belukar, 2 - 5 tahun ;
- hutan lain (Bhs. Punan *bengai*) hutan yang agak datar dan subur.

Menurut Kepala Desa tidak ada hutan sekunder tua (> 30 tahun) di sekitar Long Pada. Luas hutan sekunder muda tetap, sedangkan belukar tua dan muda bertambah. Tipe hutan lain adalah *bengai*, hutan di daerah yang datar dan agak subur. Luas *bengai* tidak berubah.

Perubahan hutan yang sudah terjadi sebelum 1990 adalah berkurangnya pohon-pohon gaharu akibat semakin gencar dicari. Akibatnya masyarakat Long Pada semakin sulit mencari uang.

7.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Walaupun wilayah Desa Long Pada sangat sulit dijangkau, masyarakat sudah pernah mengajukan permohonan izin IPPK. Namun hingga November 2003 "tidak jadi perusahaan masuk" (tidak memperoleh izin). Selain masyarakat, pernah ada pengusaha yang mengajukan permohonan IPPK untuk daerah Long Pada. Dalam proses pengambilan keputusan mengenai IPPK seluruh masyarakat dilibatkan dalam musyawarah.

Menurut Kepala Desa, masyarakat Desa Long Pada tidak menetapkan suatu daerah sebagai hutan lindung. Konflik dengan pencari gaharu dari luar menunjukkan bahwa masyarakat ingin melindungi populasi gaharu.

Pada tahun 1999 perusahaan kontraktor untuk PT. Inhutani II, sub-unit Tubu membuat jalan darat sepanjang 45 kilometer dari Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan ke Kuala Sungai Afang, sekitar 2 jam dengan ketinting di Hilir Long Pada. Medan jalan ini berat, dan setelah kontraktor berhenti operasi, jalan tidak terawat sehingga tidak dapat dilalui kendaraan. Sebelum berhenti, operasi kontraktor ini belum sempat memulai kegiatan penebangan.

7.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Di Long Pada semua masyarakat punya akses mudah terhadap lahan pertanian dan seluruh rumah tangga memiliki lahan. Selama ini tidak pernah terjadi jual-beli lahan.

Desa Long Pada

7.4 Kondisi rumah penduduk

Delapan rumah tangga di Long Pada punya rumah beratap seng dan lantai dan dinding terbuat dari papan meranti dan sejenisnya. Ada dua rumah tangga yang mempunyai rumah dengan lantai dan dinding dari kulit kayu serta beratap daun. Dari sepuluh rumah tangga yang diwawancarai, enam mempunyai PLTS dan empat tidak mempunyai listrik. Semua rumah tangga menggunakan sungai sebagai WC.

7.5 Perladangan

Lahan yang dibuka untuk ladang tahun 2003 sebagian besar dimiliki sendiri (lima dari sepuluh responden), ada tiga rumah tangga yang membuka rimba dan dua rumah tangga meminjam lahan warga lain. Umur vegetasi yang dibuka sudah cukup tua: satu rumah tangga membuka hutan sekunder berumur > 10 tahun, enam rumah tangga membuka hutan sekunder dengan umur > 20 tahun dan tiga rumah tangga membuka hutan rimba.

Karena kondisi lahan di sekitar pemukiman terjal sampai sangat terjal, terpaksa sebagian warga membuka lahan yang relatif jauh dari pemukiman. Hanya dua rumah tangga yang mempunyai ladang yang terletak 10 menit jalan kaki dari pemukiman. Lahan yang lain terletak 20 menit dengan ketinting hingga 1 jam jalan kaki dari pemukiman Long Pada.

Hasil ladang tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga selama 1 tahun. Tujuh rumah tangga mendapat padi yang cukup untuk sekitar 6 bulan dan tiga rumah tangga hanya mendapat cukup untuk 1 - 3 bulan. Tujuh rumah tangga mengambil 'beras miskin' di Pulau Sapi untuk menambah beras, sedangkan dua rumah tangga tidak menambah beras dan menggunakan bahan makanan yang lain dan satu rumah tangga membeli tambahan beras dari hasil menjual gaharu di Pulau Sapi.

7.6 Pendapatan uang

Ada 3 usaha dominan di Long Pada: mencari gaharu, menjual kerajinan rotan (tikar dan anjat) dan menjual ternak (terutama ayam). Walaupun semakin lama semakin sulit dicari, gaharu masih merupakan sumber pendapatan utama bagi enam dari sepuluh rumah tangga yang diwawancarai. Tiga keluarga menjual kerajinan rotan sebagai usaha utama dan satu rumah tangga mengharap gaji sebagai aparat desa sebagai sumber penghasilan utama. Usaha tambahan yang disebut yakni: menjual ternak (tujuh responden), gaharu (empat responden), berarti semua responden menyebut gaharu sebagai sumber penghasilan, kerajinan rotan (empat responden), gaji aparat desa (dua responden), menyewakan perahu ketinting (dua responden), menjual daging atau minyak babi hutan (dua responden), menyewakan *chainsaw* (satu responden), bayaran untuk berdukun (satu responden), dan honor penelitian (satu responden).

Empat responden mengatakan dalam 5 tahun terakhir tidak muncul usaha baru. Sebagai usaha baru para responden menyebut gaji aparat desa (tiga responden), upah buru (dua responden), menjual ternak (satu responden), menyewakan *chainsaw* (satu responden) dan honor penelitian (satu responden)²¹.

Dari hasil hutan yang diusahakan sebagai sumber pendapatan, semua responden menyebut gaharu (sepuluh rumah tangga), empat responden menyebut babi hutan dan tiga menyebut rusa. Produk olahan hasil hutan yang disebut oleh semua responden

²¹ Ada responden yang menyebut lebih dari 1 usaha baru.

Desa Long Pada

adalah tikar. Tujuh responden menyebut penjualan anjat dan tiga responden menjual makanan terutama minyak babi hutan dan dendeng.

7.7 *Infrastruktur ekonomi*

Letak Long Pada yang begitu terpencil membuat pemasaran hasil sulit. Pasar 'terdekat' adalah Pulau Sapi yang ditempuh dengan perjalanan penuh risiko dan dengan biaya besar. Karena hasil gaharu semakin berkurang, para pedagang/pembeli gaharu semakin jarang datang ke Long Pada.

7.8 *Keterjangkauan terhadap energi*

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- PLTS;
- damar.

Kayu bakar dan minyak tanah sudah lama digunakan oleh masyarakat. Menurut Kepala Desa, kayu bakar masih terjangkau, sedangkan minyak tanah semakin sulit terjangkau karena harganya. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan sumber energi yang masih baru dan sulit dijangkau oleh masyarakat kalau tidak dibantu oleh pemerintah. Damar, walaupun mudah terjangkau, semakin jarang digunakan.

8. Pendidikan

8.1 *Infrastruktur dan pelayanan pendidikan*

Pembangunan gedung SD di Long Pada selesai pada tahun 2002. Untuk saat ini (November 2003) baru adalah pelajaran sampai kelas 5. Untuk melanjutkan sekolah anak-anak dari Long Pada harus ke Pulau Sapi untuk tingkat SMP dan Malinau Kota untuk SMU dan perguruan tinggi.

Kepala Sekolah mengatakan kondisi sekolah dalam 5 tahun terakhir semakin baik, karena ada lebih banyak ruangan yang besar. Guna menampung semua murid ruangan besar dibagi dua. Peralatan, buku dan seragam sekolah juga mengalami peningkatan, yaitu ada bantuan 300 buku dari Pemda. Jumlah tenaga guru dan gaji mereka masih tetap.

8.2 *Mutu pendidikan*

Tingkat pendidikan guru meningkat terbukti karena kepala sekolah mengikuti universitas terbuka. Kepala Sekolah mengatakan keaktifan guru meningkat karena setiap tahun jumlah kelas bertambah sedangkan jumlah guru tetap, sehingga guru yang ada harus lebih giat. Di Long Pada belum ada murid sampai kelas 6, sehingga

Desa Long Pada

belum bisa ditentukan persentase kelulusan. Dalam 5 tahun terakhir jumlah orang yang bisa membaca dan menulis meningkat.

Kepala Sekolah memperkirakan sekitar 30% dari murid kadang-kadang meninggalkan sekolah untuk ikut ke ladang. Dalam tahun 2002 ada dua murid yang putus sekolah di kelas 4 karena menikah.

Keseluruhan murid di SD Long Pada (termasuk anak-anak dari Desa Long Ranau dan Desa Long Nyau) 82 orang. Murid baru kelas 1 tahun 2003 sebanyak 22 orang.

9. Kesehatan

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Di Desa Long Pada belum ada fasilitas kesehatan dan hanya ada satu orang dukun beranak. Fasilitas kesehatan 'terdekat' ada di Pulau Sapi dan perjalanan memerlukan waktu sekitar 12 jam dengan biaya Rp 500.000.

Menurut Kepala Desa, pengobatan tradisional bertentangan dengan agama sehingga tidak digunakan lagi. Namun ada satu responden yang mengatakan salah satu sumber pendapatan adalah kemampuan untuk mengobati orang (berdukun). Jumlah ahli dan frekuensi upacara pengobatan menurun dalam 5 tahun terakhir. Bahkan Kepala Desa mengatakan sekarang tidak pernah dilaksanakan upacara pengobatan tradisional.

9.2 Fasilitas air bersih

Sumber air bersih warga Long Pada dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Pada

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Mengapa	Perubahan Mutu	Mengapa
Sungai	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	-	Menurun	Karena ada tanah longsor, sehingga air keruh
Hujan	Tidak pakai air hujan	-	-	-	-
Pancuran mata air	-	Tidak berubah selama ini	-	Tidak berubah selama ini	-

9.3 Kondisi kesehatan masyarakat

Dalam 12 bulan terakhir ada tujuh bayi lahir dan tiga yang meninggal. Karena tidak ada timbangan, berat rata-rata bayi pada saat lahir tidak diketahui. Umur rata-rata ibu pada saat kehamilan pertama sekitar 17 tahun. Tidak ada Ibu yang meninggal pada saat melahirkan dalam 12 bulan terakhir. Angka dan penyebab kematian anak-anak pada usia 0 hingga 10 tahun di Long Pada dapat dilihat pada Tabel 29.

Desa Long Pada

Tabel 29: Jumlah dan penyebab kematian anak-anak pada usia di bawah 10 tahun di Desa Long Pada dalam 12 bulan terakhir

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 - 5 tahun	Tidak ada	-
6 - 10 tahun	1	Mungkin TBC

Dalam 12 bulan terakhir ada satu orang dewasa yang meninggal. Malaria merupakan penyebab kematian utama bagi warga Long Pada. Umur rata-rata orang yang meninggal karena penyakit atau lanjut usia diperkirakan 40 - 50 tahun.

Desa Long Payau

Desa Long Payau



Foto: Sebuah rumah di Desa Long Payau

Profil Desa Long Payau

Jumlah rumah tangga: 17	Jumlah jiwa: 135
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: Tidak diketahui	Jumlah KK: -
Suku mayoritas: Kenyah	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Ala Leting	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Lie Dungau	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: Sulim Usat	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 1.5 jam (ketinting)	Jumlah Puskesmas:-
Waktu tempuh ke Malinau kota: ±1 jam (ketinting)+2 jam (pesawat)	Jumlah Pusban: -
	Jumlah Polindes: -

LONG PAYAU

1. Letak dan Lingkungan Desa

Desa Long Payau, yang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Kayan Hulu, terletak di Hulu Sungai Payan, cabang sebelah kiri mudik Sungai Kayan. Jarak ke ibukota kecamatan ditempuh dalam waktu 1,5 jam dengan ketinting dan biayanya Rp 250.000 per perahu ketinting. Bisa juga ditempuh dengan jalan kaki selama 2 jam melalui jalan setapak.

2. Sejarah Desa

Kepala Adat mengatakan bahwa masyarakat sudah tiga generasi bermukim di Desa Long Payau, dan sebelumnya pernah tinggal di Tege. Tege adalah nama bekas kampung masyarakat sebelum pindah ke Long Payau.

Menurut Kepala Adat, musibah yang pernah melanda Desa Long Payau adalah kekeringan. Namun katanya hal itu sudah biasa sehingga tidak menimbulkan dampak yang berarti bagi masyarakat, kecuali sungai yang tidak bisa dilalui dengan ketinting karena terlalu kecil.

3. Penduduk

Desa Long Payau merupakan desa sendiri, berpenduduk tujuh belas rumah tangga dengan 135 jiwa (P4B, 2003) dari etnis Dayak Kenyah Lepu' Tau.

3.1 Perpindahan penduduk

Masyarakat yang bepergian untuk sementara waktu dengan alasan mencari pekerjaan di Malaysia ada tiga belas orang, dan sekolah di kota tujuh orang. Masyarakat yang bepergian dalam jangka waktu lama yakni enam orang (satu keluarga) dengan alasan berobat.

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga yang ada di desa menurut Kepala Desa Long Payau:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Kelompok Tani;
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Gereja.

Desa Long Payau

Menurut Ketua BPD di Desa Long Payau terbentuk pada bulan Mei 2003 yang lalu. Setelah terbentuknya BPD belum pernah mengadakan konsultasi dengan masyarakat "...apalagi membuat suatu keputusan..", katanya karena belum ada SK dan belum ada pelantikan oleh Pemerintah.

4.1 Musyawarah

Mutu musyawarah dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat, menurut Ketua BPD. Tidak dijelaskan mengenai dampak keputusan, karena sejak terpilihnya Ketua BPD, belum pernah membuat keputusan.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Bantuan yang pernah diberikan untuk Desa Long Payau berupa gedung sekolah dasar 3 lokal (pada tahun 2002), pembangkit listrik tenaga surya (tahun 2002), air bersih (tahun 2002), gedung gereja (2002) dan semenisasi jalan desa sepanjang 100 meter (tahun 2003). Selain itu setiap tahun menerima dana Bantuan Desa (Bangdes) dan bantuan operasional desa dan adat (mulai sejak tahun 2002).

Kepala Desa pernah mengajukan permohonan bantuan atap seng dan dikatakan akan dimasukkan ke daftar proyek untuk tahun 2004. Permohonan bantuan PLTS seharusnya masuk ke daftar proyek untuk tahun 2003, tapi pada saat pendataan proyek belum sempat dimasukkan.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Kunjungan dari dinas ke desa menurut hasil wawancara Kepala Desa Long Payau kurang dari sekali sebulan. Adapun yang berkunjung dalam tahun terakhir adalah Camat Kayan Hulu, Staf Kecamatan Kayan Hulu, Dinas PU, Dinas Kehutanan (Konsultan) dan BPS.

Menurut Ketua BPD, hubungan masyarakat dengan Pemda dari segi jarak lebih dekat karena sarana transportasi lebih lancar. Tingkat kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih baik. Namun keterbukaan informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan tidak ada perubahan.

Dalam wawancara rumah tangga semua responden mengatakan bahwa hubungan masyarakat dengan Pemerintah meningkat. Penilaian tersebut dilihat dari adanya proyek-proyek dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Desa Long Payau.

5.3 Sumber dan alat informasi

Ketua BPD mengatakan bahwa masyarakat memperoleh informasi tentang program pemerintah bisa melalui kunjungan Pemerintah, dengar dari orang lain yang berkunjung ke desa, juga lewat pengumuman yang biasanya diedarkan oleh Kecamatan. Di Long Payau ada radio SSB.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Menurut Kepala Adat Desa Long Payau, upacara adat yang masih dilakukan adalah pesta panen *Uman Untad* (Bhs. Kenyah). Namun dalam pelaksanaannya sudah ada perubahan dari segi tujuan mengadakan acara tersebut. Dari hasil wawancara, Kepala Adat mengatakan bahwa perubahan dalam melaksanakan upacara adat baik dari segi waktu, bahan dan kerjasama masih tetap. Namun semenjak adanya agama kristen, tujuan dari upacara adat tidak lagi merupakan suatu kepercayaan tapi merupakan suatu acara keramaian.

Kepala Adat mengatakan bahwa seluruh generasi muda masih mendapatkan pengetahuan tradisi dari orang tua.

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Kerjasama antar masyarakat sama saja sejak dulu, tidak ada perubahan. Hal ini dilihat dari kehadiran semua anggota masyarakat pada saat kerja bakti/gotong royong. Gotong royong yang dilakukan dalam tahun terakhir:

- membersihkan jalan lingkungan desa;
- memperbaiki jalan ke ladang dan ke Long Nawang (ibukota Kecamatan);
- membantu kepala desa;
- membantu membuat rumah penduduk.

6.3 Konflik

Konflik yang pernah terjadi menurut Kepala Adat adalah mengenai lahan. Namun konflik tersebut jarang terjadi dan dikatakan dalam tahun terakhir menurun seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk karena ada yang pindah ke desa lain. Konflik lainnya tidak ada, alasannya yakni dengan adanya agama maka tingkat pengertian dan saling mengasihi antar sesama masyarakat semakin tinggi.

Konflik yang selama ini terjadi baik di dalam lingkungan desa maupun dengan pihak luar desa, semuanya dapat diselesaikan melalui hukum adat. Hukuman atau denda yang selama ini telah diputuskan dapat dipenuhi sesuai keputusan. Jika ada yang tidak mau memenuhi tuntutan yang telah ditentukan maka yang bersangkutan akan dituntut dengan segala cara sampai dipenuhi sesuai ketentuan adat setempat.

6.4 Hiburan

Sumber hiburan di desa adalah:

- televisi;
- radio.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPD jenis tata guna lahan yang ada di Desa Long Payau adalah:

- ladang;
- kebun buah-buahan;
- hutan.

Jenis lahan yang paling luas menurut Ketua BPD adalah lahan perladangan. Namun dikatakan luas areal perladangan dalam 5 tahun terakhir berkurang. Luas lahan yang ditanami dengan buah-buahan bertambah sedikit demi sedikit.

Menurut Ketua BPD jenis hutan dan bera yang ada di wilayah Desa Long Payau adalah:

- hutan rimba (Bhs. Kenyah *empa lata*);
- hutan sekunder tua, > 30 tahun (Bhs. Kenyah *jekau lata*);
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun (Bhs. Kenyah *jekau*);
- belukar tua, 5 - 10 tahun (Bhs. Kenyah *jekau iut*);
- belukar, 2 -5 tahun (Bhs. Kenyah *bekan*);
- hutan rawa (Bhs. Kenyah *bawang*).

Hutan rimba tidak ada perubahan karena dengan berkurangnya penduduk tidak ada lagi yang merimba. Hutan sekunder tua, hutan sekunder muda, belukar tua dan belukar semuanya berkurang karena dibuat ladang oleh masyarakat setempat. Lahan basah yang bisa dibuat sawah juga ada, tapi karena masyarakat tidak punya minat untuk membuat sawah, luasan lahan tersebut tidak ada perubahan.

Menurut Ketua BPD perubahan yang pernah terjadi terhadap kawasan hutan sebelum tahun 1990 adalah berkurangnya luasan hutan yang disebabkan tanah longsor dan mengakibatkan air sungai keruh. Karena akses semakin mudah, lahanpun berkurang. Selain itu jenis-jenis tumbuhan dan hewan berkurang karena kebutuhan berburu semakin meningkat. Sebagai dampaknya Ketua BPD menyebut sulit mendapatkan binatang buruan untuk dijual.

7.2 Pengelolaan hutan dan IPPK

Di wilayah Desa Long Payau, tidak ada IPPK. Kepala Desa mengatakan ada hutan lindung seluas 4.000 hektar yang digunakan untuk bahan rumah dan perahu masyarakat Long Payau. Masyarakat yang memerlukan kayu untuk bahan bangunan mengusahakan sendiri dengan menggesek kayu yang masih ada dekat desa. Menurut Kepala Desa hutan tersebut dapat dilindungi karena "kesadaran masyarakat, tidak harus adanya sanksi."

Desa Long Payau

7.3 Keterjangkauan terhadap lahan

Menurut Kepala Desa semua masyarakat Long Payau mempunyai akses terhadap lahan. Sejak dulu belum ada perubahan hingga sekarang dan lahan yang ada selama ini belum pernah ada yang dijual.

7.4 Kondisi rumah penduduk

Pada saat kunjungan ke Desa Long Payau, kondisi rumah penduduk perbedaannya tidak menonjol karena merupakan satu bangsal/rumah panjang, yang sudah diatur pembagian luas per pintunya. Semua rumah punya atap seng dan lantai dan dinding terbuat dari kayu meranti dan sejenisnya. Sehingga kelihatannya merata di antara warga, yang pasti bahwa rumah panjang yang dihuni oleh masyarakat Long Payau merupakan bangunan lama. Dari sepuluh responden rumah tangga, tujuh menyambung ke listrik desa. Selain itu ada dua rumah tangga yang mempunyai genset sendiri dan ada tiga rumah tangga yang mendapat PLTS. Kesepuluh rumah tangga tidak mempunyai WC dan menggunakan sungai sebagai WC.

7.5 Perladangan

Kesan dari wawancara rumah tangga mengenai jarak lahan yang dibuat ladang dari rumah yakni tidak jauh karena hampir semua responden menjawab 0,5 jam ditempuh dengan jalan kaki. Sedangkan status kepemilikan lahan yang dibuat ladang, lima dari sembilan yang mengatakan bahwa lahan/jekau tersebut milik orang lain. Tapi setelah ditanyakan siapa pemiliknya, ada yang menjawab tidak tahu karena kebanyakan lahan/jekau yang ada dekat desa merupakan peninggalan masyarakat yang sudah pindah sejak dahulu. Empat di antaranya mengatakan bahwa mereka memakai jekau milik sendiri.

Sepuluh responden rumah tangga mendapat hasil ladang yang cukup untuk kebutuhan selama 1 tahun. Biaya transportasi yang tinggi mengakibatkan harga beras mahal, dan tidak ada rumah tangga yang membeli beras. Sebagian responden mengatakan masih ada sisa padi dari ladang tahun 2001. Ada juga yang mengatakan kalau ada kekurangan padi, dibantu oleh keluarga.

7.6 Pendapatan uang

Kesan dari wawancara rumah tangga tentang jenis usaha yang dominan di desa adalah berladang dan usaha tambahan untuk ibu-ibu ialah berjualan sayuran ke Long Nawang. Dua dari sembilan responden mengatakan bahwa usaha baru yang mereka lakukan dalam tahun terakhir adalah bertukang/tukang bangunan. Dua dari sembilan responden mengatakan bahwa berjualan sayur merupakan usaha baru bagi mereka. Tujuh dari sembilan responden mengatakan tidak mempunyai usaha baru, karena berjualan sayur merupakan usaha yang sudah lama mereka lakukan.

7.7 Infrastruktur ekonomi

Di Desa Long Payau tidak ada pasar. Ibu-ibu di Long Payau telah mengatur jadwal berjualan sayur ke Long Nawang, ibukota kecamatan secara bergiliran. Sehingga dalam

Desa Long Payau

1 minggu setiap ibu punya kesempatan untuk berjualan. Jarak ke pasar di Long Nawang ditempuh dengan jalan kaki selama 2 jam.

7.8 Keterjangkauan terhadap energi

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- listrik desa;
- PLTS.

Kayu bakar, minyak tanah dan tenaga surya sudah lama digunakan oleh masyarakat. Menurut Kepala Desa, kayu bakar dan minyak tanah masih terjangkau (walaupun harga minyak tanah mencapai Rp 10.000 per liter). Listrik desa baru digunakan dan menurut Kepala Desa semakin sulit terjangkau. Pembangkit listrik tenaga surya sulit dijangkau oleh masyarakat kalau tidak dibantu oleh pemerintah.

8. Pendidikan

8.1 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Di Long Payau ada 1 sekolah dasar sampai kelas 3, sehingga kalau ada anak yang meneruskan ke kelas 4 sampai kelas 6, harus ke Long Nawang. Kondisi bangunan sekolah masih terlihat bagus karena baru dibangun tahun 2002. Alat dan buku-buku lebih banyak karena ada bantuan dari Pemerintah. Staf pengajar sama saja, tidak ada penambahan sementara gaji ada peningkatan.

8.2 Mutu pendidikan

Tingkat pendidikan guru lebih baik, tingkat keaktifan guru dalam mengajar juga ada peningkatan, menjadi lebih aktif dibandingkan dengan dulu. Mengenai kelulusan, ada peningkatan yang diketahui melalui informasi dari Kepala Sekolah di Long Nawang. Jumlah orang yang dapat membaca dan menulis di Desa Long Payau meningkat.

Setelah berjalannya sekolah di desa dikatakan bahwa tidak ada anak yang meninggalkan sekolah dan yang putus sekolah juga tidak ada.

Anak-anak melanjutkan sekolah ke tingkat SLTP di Long Nawang, untuk tingkat SLTA di Long Nawang dan di Malinau Kota dan untuk perguruan tinggi di Malinau Kota, Tenggara atau Samarinda.

9. Kesehatan

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Fasilitas kesehatan untuk Desa Long Payau belum ada, sehingga kalau ada yang sakit biasanya dibawa ke Long Nawang bahkan ada yang pergi berobat sampai ke Samarinda. Mengenai keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan walaupun dalam diskusi kelompok ibu-ibu dikatakan tidak mampu membiayai pengobatan, namun pada kenyataannya kalau ada yang sakit, bisa ditangani sendiri biayanya.

Jarak fasilitas kesehatan terdekat dari desa bisa ditempuh dengan jalan kaki selama 2 jam. Namun kalau sungai dalam keadaan baik (tidak kering ataupun banjir besar) perjalanan bisa ditempuh dengan ketinting selama 1 jam dengan biaya Rp 150.000 per perahu.

9.2 Fasilitas air bersih

Fasilitas air bersih yang ada menggunakan pipa dan mengambil dari sumber mata air yang ada dekat desa. Pipa yang dipakai didapatkan melalui proyek pemerintah tahun 2002. Kalau air untuk mencuci dan mandi bisa mengambil di sungai langsung dan kualitasnya baik karena tidak ada desa lain di sepanjang Sungai Payan. Kalau air hujan hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa memanfaatkannya karena tidak ada tempat penampungan yang memadai.

Sumber air bersih warga Long Payau dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Payau

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Mengapa	Perubahan Mutu	Mengapa
Sungai	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	-	Tidak berubah selama ini	Karena tidak ada desa lain di pinggir Sungai Payan
Hujan	Kurang separuh	Tidak berubah selama ini	-	Tidak berubah selama ini	-
Pancuran mata air	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Meningkat	Proyek baru dibuat pada tahun 2002	Tidak berubah selama ini	-

9.3 Kebersihan lingkungan

Kebersihan lingkungan di dalam desa masih belum diperhatikan dengan baik. Hal ini bisa diamati dengan tidak tersalurnya pembuangan air rumah tangga dan binatang peliharaan yang tidak terurus sehingga menimbulkan kesan yang tidak sehat.

Desa Long Payau

9.4 Kondisi kesehatan masyarakat

Data yang pasti mengenai jenis penyakit yang selama ini dialami oleh masyarakat tidak ada karena kalau berobat harus ke Long Nawang sehingga desa sendiri tidak punya data.

Selama kunjungan di Desa Long Payau, dari pengamatan langsung, kondisi kesehatan masyarakat kelihatan cukup terjamin. Kemungkinan kebutuhan akan gizi cukup terpenuhi karena diperoleh dari bahan makanan yang alami tanpa kandungan obat-obatan ataupun pupuk. Data mengenai kelahiran, kematian bayi dan tingkat umur kehamilan pertama tidak didapatkan karena tidak ada petugas yang dapat diwawancarai.

Desa Long Uro

Desa Long Uro

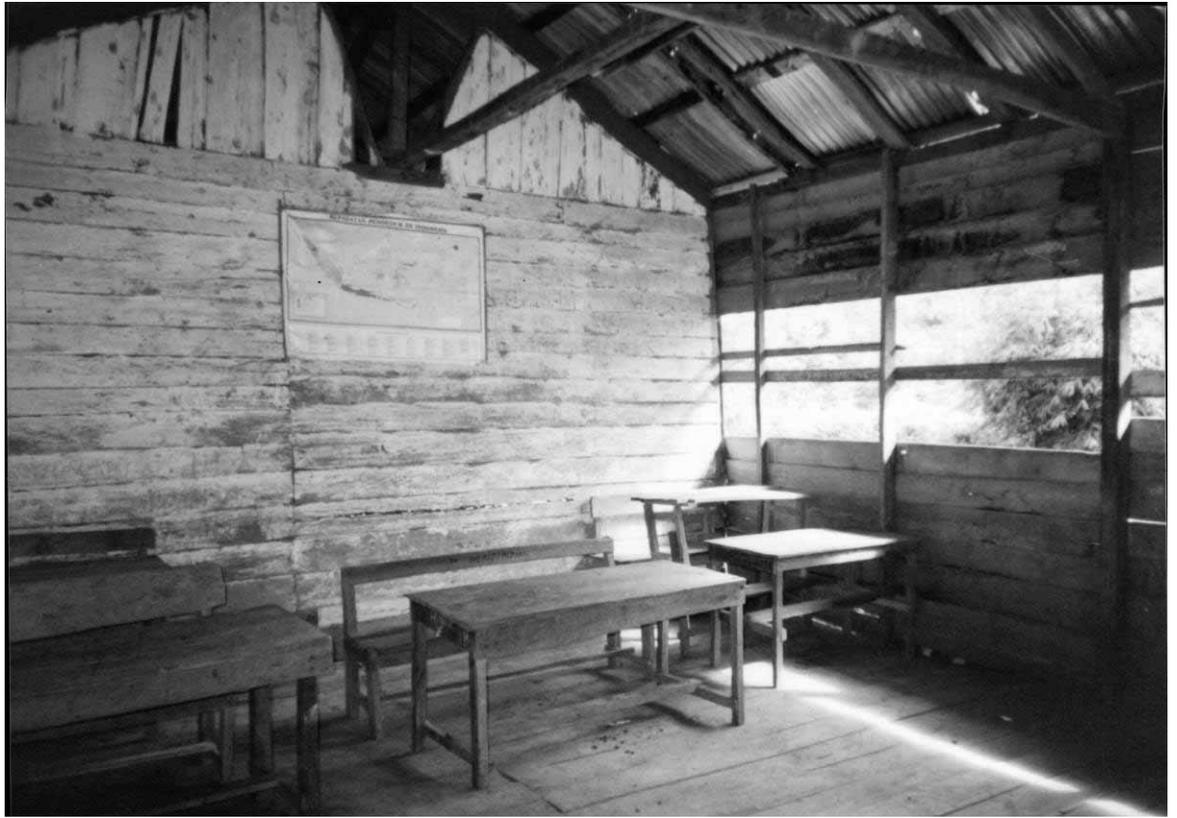


Foto: Keadaan sekolah di Desa Long Uro

Profil Desa Long Uro

Jumlah rumah tangga: 74	Jumlah jiwa: 309
Jumlah KK prasejahtera & sejahtera I: -	Jumlah KK: -
Suku mayoritas: Kenyah	Jumlah TK: -
Nama Kepala Desa: Telin Lenjau	Jumlah SD: 1
Nama Kepala Adat: Pebilung Njau	Jumlah SLTP: -
Nama Ketua BPD: -	Jumlah SLTA: -
Waktu tempuh ke kecamatan: ± 3 jam(ketinting)	Jumlah Puskesmas:-
Waktu tempuh ke Malinau kota: ± 1 jam (ketinting)+2 jam(pesawat)	Jumlah Pusban: 1
	Jumlah Polindes: -

LONG URO

1. Letak dan Lingkungan Desa

Desa Long Uro termasuk di dalam wilayah Kecamatan Kayan Hulu, dengan ibukota Long Nawang. Jarak dari Desa Long Uro ke ibukota Kecamatan sekitar 2 jam 45 menit pakai ketinting dengan biaya Rp 650.000. Desa ini terletak di pinggiran Sungai Kayan dan desa tetangga di bagian hilir adalah Desa Long Ampung, yang mempunyai landasan pesawat sebagai sarana transportasi untuk menuju ke ibukota kabupaten dan propinsi. Jarak Long Ampung ke Long Uro bisa ditempuh dengan jalan kaki selama 1 jam, bisa juga ditempuh dengan ketinting selama 45 menit dengan biaya Rp 150.000. Desa tetangga di bagian hulu adalah Desa Lidung Payau yang hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki 2 jam.

Masyarakat Long Uro pada umumnya petani ladang gilir balik dengan kondisi lahan kering. Menurut Kepala Desa Long Uro, hasil ladang selama ini cukup memuaskan karena di samping untuk makan ada juga untuk dijual. Untuk hasil tambahan sebagian masyarakat mencari gaharu dan ada juga yang mencari pekerjaan di Malaysia. Dari hasil diskusi kelompok tokoh masyarakat disebutkan bahwa potensi untuk lahan sawah cukup luas namun sampai sekarang belum dikelola, dengan alasan masyarakat masih terbiasa dengan pola pertanian tradisional.

2. Sejarah Desa

Menurut Kepala Adat, masyarakat tinggal di tempat pemukiman Long Uro sudah tiga generasi hingga sekarang. Sebelum bermukim di Long Uro, mereka pernah bermukim di Long Ire. Dari Long Ire pindah ke Jemahang dan kemudian bermukim di Long Uro.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menurut Kepala Adat, masyarakat pernah mengalami musibah bencana kekeringan yang menyebabkan berkurangnya hasil ladang. Musibah banjir juga pernah dialami sehingga merusak bangunan jembatan dan menghanyutkan banyak lumbung padi.

3. Penduduk

Penduduk Desa Long Uro terdiri dari Etnis Dayak Kenyah Lepu' Tau dan desa ini terletak di antara Desa Long Ampung dan Lidung Payau. Menurut Kepala Desa, ada tiga belas orang anggota masyarakat yang pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan selama kurun waktu 1 tahun dan ada yang pergi sekolah sebanyak lima orang. Warga yang bepergian untuk kurun waktu lama ada tiga keluarga ke Malaysia karena sudah bekerja di sana dan ada juga yang belum tercatat.

4. Kelembagaan di Desa

Lembaga yang ada di Desa Long Uro yaitu:

- Pemerintah Desa;
- Lembaga Adat;
- Badan Perwakilan Desa (BPD);
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- Gereja;
- Kelompok Tani.

Menurut Ketua BPD, di Desa Long Uro BPD telah dibentuk pada tahun 2003. Namun belum pernah mengadakan musyawarah, karena belum diresmikan dan belum diberikan SK dari Bupati.

4.1 Musyawarah

Perubahan musyawarah dan kelembagaan yang terjadi selama 5 tahun terakhir menurut Ketua BPD, dari segi kualitasnya semakin baik dan keputusan yang diambil dalam musyawarah semakin berdampak dan dipatuhi oleh masyarakat secara umum.

5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

5.1 Dukungan

Bantuan yang pernah diberikan untuk Desa Long Uro berupa pembangunan Puskesmas Pembantu (pada tahun 2000), rehab gedung sekolah dasar (pada tahun 2001), air bersih (pada tahun 2001), pengadaan listrik desa (pada tahun 2002), televisi dan parabola (pada tahun 2002), bantuan untuk gereja (pada tahun 2002), pembangunan 2 unit rumah dinas guru (pada tahun 2002) dan semenisasi jalan desa sepanjang 500 meter (pada tahun 2003).

Tanggapan dari orang kurang mampu mengenai bantuan air bersih merasa puas, tapi tetap mengharapkan adanya penambahan jaringan pipa. Mengenai bantuan listrik dan subsidi sembako, belum memuaskan dan mengharapkan agar pemerintah menambah jumlah barang yang disubsidi juga bantuan lampu tenaga surya.

Permohonan yang pernah diajukan kepada pemerintah adalah rehab jembatan yang masih di Bagian Penyusunan Program Kabupaten. Sedangkan permohonan bantuan untuk penyemenan dalam gereja telah dipenuhi dengan uang Rp 50.000.000.

5.2 Hubungan dengan pemerintah kabupaten

Menurut Kepala Desa Long Uro, kunjungan dari pemerintah baik kecamatan maupun kabupaten kurang dari sekali dalam sebulan. Instansi pemerintah yang pernah datang yaitu BPS (Panitia Pendaftaran Pemilih), Bupati dan instansi Kabupaten Malinau, Muspida Provinsi Kaltim dan Dinas Kehutanan.

Menurut Ketua BPD dan hasil wawancara rumah tangga di Desa Long Uro, ada perubahan dari segi jarak untuk ke ibukota kabupaten. Karena ada penambahan

Desa Long Uro

jadwal penerbangan dan disubsidi oleh pemerintah. Tingkat kepedulian pemerintah kepada masyarakat menurut Ketua BPD lebih baik kalau dibandingkan dengan keadaan sebelum adanya pemekaran kabupaten. Namun dari hasil wawancara rumah tangga, kepedulian pemerintah hanya dinilai dengan adanya proyek-proyek masuk desa. Dari segi pelayanan pemerintah kepada masyarakat menurut Ketua BPD menjadi lebih baik karena hubungan sudah dekat.

Keterbukaan informasi dari pemerintah kepada masyarakat mengalami perubahan yakni menjadi lebih baik karena hubungan transportasi yang lancar. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi lebih baik.

5.3 Sumber dan alat informasi

Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang program-program pemerintah menurut Ketua BPD melalui kunjungan dari pemerintah, informasi dari orang lain dan lewat pengumuman atau surat edaran ke desa-desa. Di Desa Long Uro ada radio SSB.

6. Sosial Budaya

6.1 Upacara adat

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Adat, upacara adat hanya dilaksanakan oleh sebagian kecil masyarakat karena dari segi tujuannya sudah berubah dan hanya dilaksanakan untuk meramaikan suatu acara bukan lagi mempunyai makna kepercayaan.

Kepala Adat mengatakan bahwa seluruh generasi muda masih mendapatkan pengetahuan tradisi dari orang tua.

6.2 Kerjasama dan solidaritas

Kerjasama antar masyarakat menurut Kepala Adat tidak ada perubahan atau sama saja dari dulu. Contoh gotong royong yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Long Uro dalam tahun terakhir seperti:

- pembersihan jalan lingkungan desa;
- pembangunan rumah penduduk;
- membantu kepala desa;
- partisipasi dalam membantu kalau ada yang meninggal;
- membantu pelaksanaan acara perkawinan.

Dari hasil wawancara dengan orang kurang mampu, disebutkan bahwa kerjasama antar masyarakat melalui gotong royong menurun dilihat dari kehadiran pada saat bekerja. Dia mengatakan pernah dibantu oleh warga yang lain, tetapi tidak oleh keluarganya.

Kepala Adat mengatakan bahwa apabila ada warga yang mengalami kekurangan pangan mereka bisa dibantu dari lumbung desa atau lumbung sidang (gereja).

6.3 Konflik

Konflik yang disebut Kepala Adat adalah:

- konflik batas lahan perladangan yang jarang terjadi dan dalam tahun terakhir menurun;
- konflik keluarga yang terjadi akibat perselingkuhan dan kecemburuan dengan orang lain. Konflik ini tidak sering terjadi dan belakangan ini semakin menurun.

Dari hasil wawancara dengan orang kurang mampu dikatakan bahwa tidak ada konflik dan perubahan jumlah konflik dijawab tidak tahu.

Konflik dalam desa maupun dengan pihak luar biasanya diselesaikan dengan mengikuti aturan atau hukum adat dan kalau ada yang melanggar dikenakan sanksi, ditagih oleh petugas yang telah ditunjuk dari anggota pengurus adat desa. Contoh yang disebut dalam wawancara seperti; menyetrum ikan dan melanggar aturan kawin adat. Keduanya diberikan sanksi atau denda adat. Menurut Kepala Adat konflik yang ditangani melalui hukum adat seluruhnya bisa diselesaikan dengan baik.

6.4 Situasi umum orang miskin

Responden kurang mampu menyebutkan masalah utama bahwa "Punya keinginan untuk memiliki barang tetapi tidak ada kemampuan untuk mendapatkan uang. Tidak punya peralatan pertanian (mesin). Tidak ada lapangan kerja selain kerja ladang."

Hasil wawancara dengan orang kurang mampu, disebutkan bahwa perubahan keadaan menjadi lebih baik karena adanya peningkatan hasil kerja ladang.

Responden kurang mampu mengatakan punya kemampuan untuk mendapatkan kebutuhan pangan. Kemampuannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak cukup dan mengharapkan agar pemerintah memperhatikan atau membantu anak-anak dalam hal pendidikan dan kesehatan. Responden juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang tunai.

6.5 Hiburan

Sumber hiburan masyarakat di desa adalah:

- kunjungan santai ke air terjun.

7. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

7.1 Tata guna lahan dan hutan

Menurut Ketua BPD jenis tata guna lahan yang ada di Desa Long Uro adalah:

- ladang;
- sawah;
- kebun sayur;
- hutan.

Desa Long Uro

Tata guna lahan yang paling luas disebutkan dalam wawancara adalah ladang karena masyarakat berusaha swasembada beras. Namun luasan hutan dikatakan tidak ada perubahan karena pembuatan ladang tidak ada yang merimba lagi hanya memanfaatkan jekau yang sudah ada.

Menurut hasil wawancara dengan Ketua BPD jenis lahan yang ada di desa adalah ladang, sawah dan hutan. Perubahan luasan hutan sudah sejak dahulu namun tidak terlalu berpengaruh karena hanya dipakai untuk tempat berladang. Lahan sawah ada tapi sudah lama tidak dikerjakan sehingga belum ada perubahannya. Walaupun ada disebutkan mengenai kebun sayur tapi tidak berpengaruh pada luasan ladang karena hanya ditanam di antara padi di ladang.

Menurut Ketua BPD jenis hutan dan bera yang ada di wilayah Desa Long Uro adalah:

- hutan rimba;
- hutan sekunder tua, > 30 tahun;
- hutan sekunder muda, 10 - 30 tahun;
- belukar tua, 5 - 10 tahun;
- belukar, 2 -5 tahun (Bhs. Kenyah *bekan*);
- hutan tidak subur (Bhs. Kenyah *apau namam*).

Jenis hutan yang ada di desa menurut Ketua BPD hutan rimba, hutan sekunder tua, hutan sekunder muda dan lahan tandus (*apau namam*) tidak ada perubahan luasan. Lahan belukar tua tetap dan belukar muda berkurang karena dikelola dengan cara gilir balik.

Perubahan terhadap hutan yang sudah terjadi sejak tahun 1990, menurut Ketua BPD adalah berkurangnya jenis binatang. Ini dikarenakan volume perburuan yang tinggi sehingga masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan daging.

7.2 *Pengelolaan hutan dan IPPK*

Di Desa Long Uro tidak ada IPPK selama ini. Tidak ada kawasan hutan yang dilindungi secara khusus oleh masyarakat Desa Long Uro.

7.3 *Keterjangkauan terhadap lahan*

Kepala Desa mengatakan bahwa seluruh masyarakat mempunyai akses dan memiliki lahan. Karena masing-masing rumah tangga memiliki lahan yang cukup banyak, dan dikelola dengan cara gilir balik. Maka keterjangkauan terhadap lahan tidak ada perubahan. Lahan yang ada di dalam wilayah desa tidak pernah diperjualbelikan.

7.4 *Kondisi rumah penduduk*

Dari pengamatan langsung, perbedaan di antara warga masyarakat Desa Long Uro tidak terlalu menyolok baik dari segi luas rumah, jenis bahan dan kondisi di dalam rumah, karena semuanya baru berubah dari rumah panjang ke rumah tunggal.

Sumber listrik di Desa Long Uro adalah mesin genset desa dan sebagian masyarakat mendapat bantuan PLTS dari pemerintah. Dari tiga belas responden rumah tangga, ada empat rumah tangga yang mempunyai sambungan ke listrik desa, lima rumah tangga punya sambungan ke listrik desa dan PLTS dan tiga rumah tangga hanya

Desa Long Uro

punya PLTS. Ada satu rumah tangga yang tidak punya listrik. Dari tiga belas responden, dua punya WC dalam rumah, yang lain menggunakan sungai.

7.5 *Perladangan*

Kesan dari wawancara rumah tangga tentang status kepemilikan lahan yang masyarakat buat ladang, dari tiga belas responden rumah tangga, ada sepuluh yang mengatakan bahwa lahan yang dibuat ladang adalah milik sendiri. Tiga rumah tangga menjawab merimba dan tiga lagi mengatakan bahwa mereka pinjam *jekau* orang lain. Kalau dilihat dari jumlah responden, jawabannya lebih karena ada yang membuat ladang pinjam *jekau* orang lain dan ditambah luasannya dengan merimba. Dari segi jarak, jawaban yang disebutkan oleh responden mulai dari 0,5 jam sampai dengan 1,5 jam yang ditempuh dengan jalan kaki.

Dari tiga belas responden rumah tangga hanya satu mendapat padi cukup untuk kebutuhan selama 1 tahun. Responden yang lain mendapat padi cukup untuk 2 - 10 bulan. Ada dua rumah tangga yang tidak membuat ladang pada tahun 2002. Untuk menutup kekurangan beras hanya dua rumah tangga membeli, yang lain meminjam dari keluarganya.

7.6 *Pendapatan uang*

Hasil wawancara dengan rumah tangga mengenai jenis usaha yang dominan di Desa Long Uro adalah berladang. Adapun usaha lain seperti mencari gaharu dan berburu hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mengusahakan itu. Sebagian besar kalangan anak muda mencari pekerjaan pada perusahaan kayu yang ada di Malaysia. Adapun usaha baru hanya dalam jangka pendek seperti yang dijawab oleh beberapa responden, bahwa mereka ikut mengerjakan proyek semenisasi jalan desa dan proyek reboisasi penanaman teh.

7.7 *Infrastruktur ekonomi*

Ibu-ibu di Long Uro dalam diskusi kelompok mengeluh bahwa tidak ada pasar di Long Uro untuk menjual hasil kebun dan tidak ada penampung hasil kerajinan. Salah satu kendala dalam pemasaran adalah kesulitan transportasi dan tingginya biaya transportasi.

7.8 *Keterjangkauan terhadap energi*

Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

- kayu bakar;
- minyak tanah;
- listrik desa;
- PLTS.

Kayu bakar dan minyak tanah sudah lama digunakan oleh masyarakat. Menurut Kepala Desa, kayu bakar dan minyak tanah masih terjangkau, walaupun harga minyak tanah mencapai Rp 10.000 per liter. Listrik desa baru digunakan dan menurut Kepala Desa semakin sulit terjangkau. Pembangkit listrik tenaga surya baru digunakan dan

Desa Long Uro

dikatakan masih dapat dijangkau oleh masyarakat, karena merupakan bantuan pemerintah.

8. Pendidikan

8.1 Infrastruktur dan pelayanan pendidikan

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah tentang kondisi sekolah yang ada di Desa Long Uro, tidak ada perubahan sejak dulu hanya satu sekolah dasar. Sedangkan kondisi bangunannya berkurang. Adapun proyek rehabilitasi yang masuk, hanya menambal bukan diganti bahannya. Untuk alat dan buku, menurut Kepala Sekolah, ada peningkatan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jumlah staf pengajar ada penambahan dan honor guru juga ada peningkatan.

8.2 Mutu pendidikan

Tingkat pendidikan guru menurut Kepala Sekolah, belum ada peningkatan, tapi dari diskusi informal dengan guru lain terjawab bahwa mereka ada yang mengikuti kuliah di Universitas Terbuka dengan bantuan biaya dari pemerintah daerah. Keaktifan guru dikatakan oleh Kepala Sekolah, menurun. Namun persentase kelulusan meningkat. Jumlah orang yang bisa baca-tulis juga ada peningkatan.

Menurut Kepala Sekolah, masih ada anak sekolah yang meninggalkan sekolah dengan alasan ikut orang tua ke ladang namun jumlahnya berkurang. Mengenai anak yang putus sekolah dalam tahun terakhir ada dua orang tapi alasannya masih umum karena masalah ekonomi.

9. Kesehatan

9.1 Infrastruktur dan pelayanan kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Long Uro adalah Puskesmas Pembantu dan baru dibangun tahun 2000. Sumber dana untuk operasional selama ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. Keterjangkauan terhadap perawatan kesehatan telah berubah selama 5 tahun terakhir. Jumlah fasilitas kesehatan menurut hasil wawancara bertambah karena dulu kalau mau berobat harus ke Long Ampung atau Long Nawang. Namun jumlah staf masih kurang, juga mengenai alat dan ketersediaan obat masih diharapkan ada penambahan oleh pemerintah. Kalau gaji/honor staf kesehatan dikatakan sama saja belum ada perubahan.

Kalau terpaksa berobat ke Long Ampung, perjalanan memerlukan waktu sekitar 1 jam pakai ketinting dengan biaya sekali jalan Rp 150.000.

9.2 Fasilitas air bersih

Menurut hasil diskusi mengenai fasilitas air bersih, separuh dari masyarakat bisa memanfaatkannya. Pengertian masyarakat dengan fasilitas air bersih adalah air yang disalurkan melalui pipa yang dipasang dengan adanya proyek air bersih dari

Desa Long Uro

Pemerintah. Namun ada jawaban lanjutan bahwa sumber air sungai dapat diakses oleh semua penduduk. Pemasokan air menurut hasil wawancara menurun karena dengan adanya pemasangan pipa air bersih, maka berkurang orang yang mengambil air langsung di sungai. Kalau dari segi mutu air tidak ada perubahan.

Sumber air bersih warga Long Uro dan perubahan yang selama ini terjadi dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31: Sumber air bersih dan perubahan pemasokan dan mutu dalam 5 tahun terakhir di Desa Long Uro

Sumber air	Akses	Perubahan Pemasokan	Mengapa	Perubahan Mutu	Mengapa
Sungai	Bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat	Tidak berubah selama ini	-	Tidak berubah selama ini	Belum ada perusahaan
Hujan	Kurang separuh	Tidak berubah selama ini	Tidak semua warga punya tempat penampungan	Tidak berubah selama ini	-
Pancuran mata air	Bisa dijangkau oleh separuh masyarakat	Menurun	-	Tidak berubah selama ini	-

9.3 Kebersihan lingkungan

Mengenai kebersihan lingkungan rumah kelihatannya cukup bersih. Namun dengan adanya pemasangan pipa air bersih, saluran pembuangan air yang belum diperhatikan dan jamban keluarga belum ada. Dari hasil wawancara dikatakan bahwa 80% penduduk Desa Long Uro belum memiliki jamban keluarga.

9.4 Kondisi kesehatan masyarakat

Jumlah kelahiran anak dalam 12 bulan terakhir menurut hasil wawancara ada tiga orang dengan berat rata-rata 2,25 kg. Dari tiga yang lahir ada satu yang meninggal. Sedangkan umur rata-rata pada saat kehamilan pertama yakni 20 tahun.

Menurut hasil wawancara anak umur 6 - 10 tahun tidak ada yang meninggal dalam 12 bulan terakhir. Satu anak yang baru lahir meninggal disebabkan kelahiran belum cukup umur kandungan. Jumlah ibu yang meninggal pada saat melahirkan dalam 12 bulan terakhir di Desa Long Uro ada satu orang.

Dari hasil wawancara juga menyebutkan bahwa jumlah orang yang meninggal dalam 12 bulan terakhir sebanyak dua orang. Jenis penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di Desa Long Uro tidak diketahui oleh masyarakat secara pasti, namun disebutkan umur rata-rata yang meninggal karena penyakit atau lanjut usia (bukan karena kecelakaan) adalah 65 tahun.

Lampiran



Desa:	Jam Mulai:
Tanggal:	Responden:
Pewawancara :	Jabatan Responden:

I. SEJARAH DAN PERUBAHAN

1. Sudah berapa tahun desa ini ada (mis: sudah ganti lamin berapa kali)?
2. Dari mana masyarakat berasal (mis: dari lamin mana)?
3. Upacara tradisional/ritual apa yang masih dilakukan?
4. Apa perubahan-perubahan upacara adat dibandingkan dengan masa lalu?

Dimensi Perubahan	Perubahan
Waktu	1: Semakin lama 2: Semakin pendek 3: Sama saja
Bahan-Bahan	1: Berubah dari sisi jenis bahan 2: Berubah dari sisi jumlah 3: Sama saja
Gotong Royong	1: Semakin kuat 2: Semakin lemah 3: Sama saja
Tujuan	1: Sama dengan tujuan menurut adat 2: Sudah berubah

5. Kejadian atau peristiwa apa yang paling penting yang pernah terjadi dalam 10 tahun terakhir?

Kejadian/Peristiwa	Pernah /Tidak Pernah	Dampak Terhadap Desa
Bencana		
Kebakaran Hutan		
Kelaparan		
Kekeringan		
Banjir		
Hama		
Perubahan Pemerintahan		
Lainnya:.....		

II. PENGOBATAN TRADISIONAL

6. Ada berapa ahli pengobatan tradisional yang ada di desa?
7. Bagaimana perubahan jumlah ahli pengobatan tradisional dalam 5 tahun terakhir?
1: bertambah, 2: sama, 3: berkurang, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu
8. Berapa sering upacara pengobatan tradisional dilaksanakan?
(5: hampir setiap hari, 4: lebih dari sekali per minggu, 3: sekali seminggu, 2: lebih dari sekali per bulan, 1: kurang dari sekali per bulan, 0: tidak pernah)
9. Bagaimana perubahan jumlah upacara pengobatan dalam waktu 5 tahun terakhir?
1: meningkat, 2: sama, 3: menurun, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu
10. Berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan untuk upacara pengobatan tradisional?

III. KONFLIK

11. Bagaimana perubahan dari sisi konflik yang ada di desa?

Jenis Konflik	Tingkat Sering	Perubahan	Apa Penyebabnya
Konflik Lahan	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	
Konflik Keluarga	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	
Konflik Suku	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	
Konflik Agama	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	
Konflik Air/Sumberdaya Alam	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	
Lainnya, sebutkan.....	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	
Lainnya, sebutkan.....	4: sering sekali, 3: sering, 2: tidak sering, 1: jarang, 0: tidak pernah	1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu	

11. Ketika terjadi konflik di dalam maupun di/dengan pihak luar desa, hukum mana yang paling banyak digunakan?

Jenis Konflik	Jenis Hukum Yang Paling Banyak Digunakan
Konflik Di Dalam Desa	1: Hukum Adat 2: Hukum Negara 3: Cara Lain, Jelaskan!.....
Konflik Di/Dengan Pihak Luar Desa	1: Hukum Adat 2: Hukum Negara 3: Cara Lain, Jelaskan!.....

12. Bagaimana kalau masyarakat tidak menjalankan keputusan lembaga adat? Apa yang akan dilakukan?
Contoh kasus!

13. Berapa banyak konflik di desa yang diselesaikan di tingkat desa oleh lembaga adat?
(1: Tidak ada, 2: Kurang Dari Separuh, 3: Separuh, 4: Lebih dari Separuh, 5: Seluruhnya)

IV. TINGKAT KERJASAMA

14. Apakah tingkat kerjasama antar masyarakat telah berubah dalam 5 tahun terakhir?
1: meningkat, 2: sama, 3: menurun, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

15. Apa bentuk-bentuk gotong royong yang pernah dilakukan dalam 12 bulan terakhir?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

16. Berapa banyak biasanya masyarakat yang ikut dalam gotong royong?
4: semua, 3: lebih dari separuh, 2: separuh, 1: kurang dari separuh, 0: sedikit sekali

17. Jika terjadi masalah kekurangan makanan di desa, kepada siapa meminta bantuan?

V. LAIN-LAIN

18. Seberapa banyak generasi muda yang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan asli/tradisi dari para orang tua (mis: pengetahuan pengobatan, hukum adat, cara pengelolaan hutan dan lahan, dll)?
(1: tidak ada, 2: kurang dari seperempat, 3: seperempat s/d separuh, 4: separuh, 5: lebih dari separuh, 6: seluruhnya)

19. Ada hiburan apa di desa?

Jam Selesai:

Tandatangan Pewawancara



Desa:	Jam Mulai:
Tanggal:	Responden:
Pewawancara :	Jabatan Responden:

I. UMUM

1. Kapan BPD didirikan?

2. Apakah BPD melakukan konsultasi dengan masyarakat desa? Dan jika ya, seberapa sering?
 1: tidak pernah, 2: sekali per bulan, 3: sekali per tiga bulan, 4: sekali per tahun, 5: kurang dari sekali per tahun

3. Apa yang didiskusikan dalam musyawarah dan apa keputusannya?

Apa Yang Didiskusikan?	Apa Yang Diputuskan?

4. Bagaimana kelembagaan musyawarah berubah dalam 5 tahun terakhir?

Kualitas	1: Semakin baik 2: Semakin buruk 3: Sama saja
Tingkat Dampak Dari Keputusan	1: Semakin berdampak dan dipatuhi 2: Semakin lemah dan cenderung diabaikan 3: Sama saja
Tingkat Sering	1: Semakin sering 2: Semakin jarang 3: Sama saja

II. TATA GUNA LAHAN

5. Apa tipe tata guna lahan yang paling luas di desa?

6. Berapa besar luas tata guna lahan yang paling luas tersebut dibandingkan dengan total luasan desa?
(1: kurang dari seperempat, 2: antara seperempat dengan setengah, 3: setengah, 4: lebih dari setengah, 5: seluruhnya)

7. Apa tipe tata guna lahan yang lain yang ada di desa?

Tata guna lahan	Ada/Tidak Ada	Perubahan sejak 1999	Keterangan
Ladang		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Sawah		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Kebun sayur		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Kebun rotan		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Kebun karet		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Buah		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Kebun kokoa		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Kebun kopi		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Kebun lain		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Peternakan		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Hutan		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	
Lainnya		1: Berkurang, 2: Bertambah 3: Tetap	

8. Apa jenis hutan dan lahan bera (jekau) yang ada?

Tipe hutan	Nama Lokal	Luas (%) (tidak usah dipaksa)	Perubahan sejak 1999	Keterangan
Hutan Perawan			1: bertambah, 2: berkurang, 3: tetap	
Hutan Sekunder tua (>30 tahun.)			1: bertambah, 2: berkurang, 3: tetap	
Hutan Sekunder Muda (10-30 thn.)			1: bertambah, 2: berkurang, 3: tetap	
Belukar tua (5-10 thn.)			1: bertambah, 2: berkurang, 3: tetap	
Belukar (2-5 thn.)			1: bertambah, 2: berkurang, 3: tetap	
Hutan Rawa			1: bertambah, 2: berkurang, 3: tetap	
Hutan Kerangas (hutan tidak subur)			1: bertambah, 2: berkurang, 3: tetap	
Tipe hutan lainnya			1: bertambah, 2: berkurang, 3: tetap	

9. Apa perubahan yang pernah terjadi terhadap kawasan hutan **sebelum tahun 1990**?

Perubahan	Penyebab	Dampak
Berkurangnya luasan hutan		
Lebih mudah diakses		
Berkurangnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan		
Lainnya, jelaskan		

III. HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

10. Apakah hubungan masyarakat dengan Pemda telah berubah selama 5 tahun terakhir? Jika ya, bagaimana?

Sisi Perubahan	Perubahan
Keterjangkauan dari sisi jarak	1. Lebih baik 2. Lebih buruk 3. Sama saja
Tingkat Kepedulian	1. Lebih baik 2. Lebih buruk 3. Sama saja
Pelayanan	1. Lebih baik 2. Lebih buruk 3. Sama saja
Keterbukaan Informasi	1. Lebih baik 2. Lebih buruk 3. Sama saja
Partisipasi Pengambilan Keputusan	1. Lebih baik 2. Lebih buruk 3. Sama saja

11. Bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi tentang program-program pemerintah?

Cara Memperoleh Informasi	Ya/Tidak
Lewat Kunjungan Dari Pemerintah	
Dengar Dari Orang Lain	
Lewat Pengumuman	
Lainnya.....	

IV. LAIN-LAIN

12. Bagaimana perkembangan ekonomi rata-rata di desa dalam 5 tahun terakhir?
1: Membaik, 2: Sama saja 3: Memburuk

Apa contohnya?

13. Apakah ada bantuan dari pihak lain selain pemerintah?

Pemberi Bantuan	Ya/Tidak	Jenis Bantuan
Pengusaha		
LSM		
Organisasi Keagamaan		
Lainnya.....		

14. Apakah sudah pernah ada penelitian di desa?
Jika ya, oleh siapa?

Jam Selesai:

Tandatangan Pewawancara

Dokter/Bidan/Dukun/dll

Desa:

Jam Mulai:

Tanggal:

Responden:

Pewawancara :

Jabatan Responden:

I. INFRASTRUKTUR

1. Seberapa banyak keluarga yang bisa mendapatkan sumber air bersih?
(1: tidak ada, 2: kurang separuh, 3: separuh, 4: lebih separuh, 5: semua)
2. Untuk keluarga yang bisa mendapatkan air bersih, sumbernya dari mana? Apakah ada perubahan pemasokan dalam 5 tahun terakhir?

Sumber	Akses: 1. Tidak ada, 2. kurang separuh, 3. separuh, 4. lebih separuh, 5. semua	Perubahan Pemasokan 1. meningkat, 2. sama saja, 3. menurun, 4. tidak tahu	Mengapa
Sungai			
Hujan			
Sumur Timba			
Sumur Pompa			
Pancuran mata air			
PDAM			
Air minum kemasan			
Lain			

Sumber	Perubahan Mutu 1. meningkat, 2. sama saja, 3. menurun, 4. tidak tahu	Mengapa
Sungai		
Hujan		
Sumur Timba		
Sumur Pompa		
Pancuran mata air		
PDAM		
Air minum kemasan		
Lain		

5. Ketika musim kemarau atau musim kering dimana air bersih tidak bisa didapatkan di desa, apakah ada bantuan air dari pihak luar? (1. Ada, 2. Tidak ada)
Jika ada, bagaimana kualitas air tersebut?

4. Apakah rata-rata masyarakat di sini memiliki alat untuk menyimpan air? (1. Ya, 2. Tidak)
Jika ya, Apa jenisnya?

7. Apakah ada alat untuk menyimpan air untuk kepentingan umum? (1. Ya, 2. Tidak)
Apa jenisnya?

Alat tersebut dari mana didapatkan?

II. UMUM

8. Fasilitas kesehatan apa yang ada di desa?

Fasilitas Kesehatan	Ada/ Tidak Ada
Rumah Sakit	
Puskesmas	
Puskesmas Pembantu	
Polindes	
Dukun	
Lainnya, sebutkan	
Lainnya, sebutkan	

9. Siapa yang mendanai fasilitas tersebut?
(1: swadaya, 2: pemerintah, 3: swasta, 4: gereja, 5: lainnya, sebutkan.....)
10. Siapa yang menjalankan fasilitas tersebut?
(1: swadaya, 2: pemerintah, 3: swasta, 4: gereja, 5: lainnya, sebutkan.....)
11. Berapa jarak fasilitas kesehatan terdekat? jam
12. Bagaimana mencapai fasilitas kesehatan tersebut dan berapa biayanya?
13. Apakah keterjangkauan terhadap perawatan kesehatan telah berubah selama 5 tahun terakhir?

Jumlah fasilitas kesehatan	1. Lebih banyak 2. Kurang banyak 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Kondisi fasilitas kesehatan	1. Lebih baik 2. Kurang baik 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Jumlah staf	1. Lebih banyak 2. Kurang banyak 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Ketersediaan obat-obatan dan peralatan	1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Gaji/honor	1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu

14. Apa jenis penyakit yang ada di desa ini

Kelompok Umur	Jenis Penyakit
Anak-Anak	
Orang muda (12 s/d 17 tahun)	
Orang Dewasa	
Ibu-Ibu (kaitan dengan fungsi reproduksi)	
Lanjut usia	

15. Bagaimana tingkat keseringan terjangkitnya penyakit:

Jenis Penyakit	Tingkat Keseringan	Kelompok Yang Paling Mungkin Terkena Penyakit
Malaria	1: meningkat 2: sama 3: menurun 4: berfluktuasi	1: Anak-Anak 2: Orang muda 3: Orang Dewasa 4: Ibu-Ibu 5: Orang Lanjut Usia
Diare	1: meningkat 2: sama 3: menurun 4: berfluktuasi	1: Anak-Anak 2: Orang muda 3: Orang Dewasa 4: Ibu-Ibu 5: Orang Lanjut Usia
TBC	1: meningkat 2: sama 3: menurun 4: berfluktuasi	1: Anak-Anak 2: Orang muda 3: Orang Dewasa 4: Ibu-Ibu 5: Orang Lanjut Usia

16. Apa yang terjadi ketika seseorang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya pengobatan? (1: pengobatan tradisional, 2: pinjam uang, 3: minta bantuan keluarga, 4: tidak berobat, 5: lainnya, jelaskan)

III. DATA SEKUNDER

17. Ada berapa jumlah kelahiran anak dalam 12 bulan terakhir di desa ini?

18. Berapa rata-rata berat bayi yang baru lahir?

19. Berapa bayi yang meninggal pada saat kelahiran dalam 12 bulan terakhir?

20. Berapa rata-rata umur Ibu pada saat kehamilan **pertama**?

21. Ada berapa jumlah anak-anak usia di bawah 10 tahun yang meninggal dalam **12 bulan terakhir**, dan apa penyebabnya?

Kelas Umur	Jumlah Yang Meninggal	Penyebab Kematian
0 s/d 5 tahun		
6 s/d 10 tahun		

22. Ada berapa jumlah Ibu yang meninggal pada saat melahirkan dalam 12 bulan terakhir di seluruh desa?
23. Ada berapa jumlah orang meninggal dalam 12 bulan terakhir?
24. Penyakit apa yang paling banyak menyebabkan kematian di desa ini?
25. Berapa rata-rata umur orang yang meninggal karena penyakit/tua (bukan karena kecelakaan)?

Jam Selesai:

Tandatangan Pewawancara



Desa:

Tanggal:

Responden:

Pewawancara :

Jabatan Responden

Pencatat

I. PEMERINTAHAN

1. Apa lembaga resmi dan yang tidak resmi yang ada di desa?

Lembaga Di Desa	Ada/Tidak Ada
Pemerintah Desa	
Lembaga Adat	
Badan Perwakilan Desa	
LKMD	
LMD	
Kelompok Tani	
Koperasi	
Lainnya, sebutkan!	
Lainnya, sebutkan!	

2. Apa saja program pemerintah yang telah dilaksanakan dalam 5 tahun terakhir? Kapan?

Nama Program Pemerintah	Kapan Dilaksanakan

3. Bagaimana bantuan pemerintah kepada pembangunan di pedesaan selama 5 tahun terakhir?

1: meningkat, 2: sama, 3: menurun, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

4. Apakah desa ini pernah mengajukan usulan bantuan dalam 5 tahun terakhir?
Jika pernah,

Bantuan Untuk Apa?	Apa Jawaban Dari Pemerintah?

5. Seberapa sering petugas pelayanan dari pemerintah (kecamatan & kabupaten) datang ke desa-desa?
5: hampir setiap hari, 4: lebih dari sekali dalam seminggu, 3: sekali dalam seminggu, 2: lebih dari sekali dalam sebulan, 1: kurang dari sekali dalam sebulan, 0: tidak pernah

6. Siapa (lembaga pemerintah) yang pernah datang?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

II. KEPENDUDUKAN

7. Ada berapa orang yang meninggalkan desa selama 5 tahun terakhir?

Jangka Waktu	Berapa Orang	Alasan Meninggalkan Desa
Waktu Pendek/Sementara		1: Lahan Tidak Subur 2: Mencari Pekerjaan 3: Konflik 4. Sekolah/Pendidikan 5. Bencana Alam Lainnya, sebutkan?
Waktu Panjang/Selamanya		1: Lahan Tidak Subur 2: Mencari Pekerjaan 3: Konflik 4. Sekolah/Pendidikan

Jangka Waktu	Berapa Orang	Alasan Meninggalkan Desa
		5. Bencana Alam Lainnya, sebutkan?.....

III. SUMBERDAYA ALAM

8. Apakah ada jenis-jenis hutan yang dilindungi (termasuk hutan yang dilindungi secara lokal oleh hukum adat)?
Jika ada, berapa luasnya?
Bagaimana digunakan?

9. Bagaimana aturan pada hutan yang dilindungi tersebut ditegakkan, misalnya jika ada yang menebang sembarangan bagaimana memberikan sanksi?

10. Ada berapa rumah tangga yang memiliki keterjangkauan²² terhadap lahan?
5: seluruhnya, 4: kebanyakan, 3: lebih dari setengah, 2: kurang dari setengah, 1: sedikit 0: tidak ada

11. Apakah keterjangkauan tersebut sudah berubah dalam 5 tahun terakhir?
1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

12. Ada berapa jumlah rumah tangga yang memiliki lahan?
5: seluruhnya, 4: kebanyakan, 3: lebih dari setengah, 2: kurang dari setengah, 1: sedikit 0: tidak ada

13. Apakah ada orang yang menjual lahan baik secara resmi atau tidak resmi?
Jika ada, kepada siapa lahan dijual?
Kapan praktek seperti ini mulai sering terjadi?

12. Apakah desa atau seseorang di desa sudah atau pernah mengajukan IPPK/HPHH/IPHH?
(ya/tidak)

15. Berapa jumlah orang yang mendapatkan penghasilan dari penebangan pohon pada konsesi IPPK/IPHH/HPHH tersebut (fee, ganti rugi, gaji)?
5: seluruhnya, 4: kebanyakan, 3: lebih dari setengah, 2: kurang dari setengah, 1: sedikit 0: tidak ada

²² Keterjangkauan harus diartikan dari 3 sisi yaitu: hak, jarak/alat transportasi/kondisi jalan dan ketersediaan

16. Apakah ada pihak luar (mis: perusahaan) mengajukan permohonan untuk konsesi IPPK/IPHH/HPHH, pertambangan, perkebunan di dalam wilayah desa? (**ada/tidak ada**)

17. Siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang konsesi tersebut?

IV. INFRASTRUKTUR

Pasar

18. Apakah ada pasar di sini?
Jika ada berapa sering pasar tersebut buka, misalnya berapa kali dalam seminggu?

19. Apakah frekuensi buka pasar berubah dalam 5 tahun terakhir?
1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

20. Berapa jarak pasar terdekat dari desa (waktu, biaya)?

Jalan, Transportasi & Komunikasi

21. Bagaimana kondisi jalan dan sungai?

	Kondisi Sekarang	Perubahan dalam 5 tahun terakhir
Jalan	1: baik 2: sedang 3: kurang baik	1: lebih baik 2: sama saja 3: berkurang 4: berfluktuasi 5: tidak tahu
Sungai	1: baik 2: sedang 3: kurang baik	1: lebih baik 2: sama saja 3: berkurang 4: berfluktuasi 5: tidak tahu

22. Apa alat transportasi reguler yang ada (contoh ongkosnya)?

22. Apakah ada perubahan waktu perjalanan yang diperlukan ke Kecamatan, Kabupaten, dan Kota selama 5 tahun terakhir?
1: perlu lebih lama, 2: lebih cepat, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

23. Alat komunikasi apa yang tersedia?

Energi

Sumber energi yang digunakan di desa

Sumber Energi	Digunakan?	Perubahan dalam 5 Tahun Terakhir?	Keterjangkauan (harga/ketersediaan)
Kayu Bakar	1: ya 2: tidak	1: baru digunakan 2: sudah pernah digunakan sebelumnya	1: masih terjangkau 2: semakin sulit terjangkau 3: sudah tidak dapat terjangkau
Minyak tanah	1: ya 2: tidak	1: baru digunakan 2: sudah pernah digunakan sebelumnya	1: masih terjangkau 2: semakin sulit terjangkau 3: sudah tidak dapat terjangkau
Gas	1: ya 2: tidak	1: baru digunakan 2: sudah pernah digunakan sebelumnya	1: masih terjangkau 2: semakin sulit terjangkau 3: sudah tidak dapat terjangkau
Listrik	1: ya 2: tidak	1: baru digunakan 2: sudah pernah digunakan sebelumnya	1: masih terjangkau 2: semakin sulit terjangkau 3: sudah tidak dapat terjangkau
Lainnya, sebutkan!	1: ya 2: tidak	1: baru digunakan 2: sudah pernah digunakan sebelumnya	1: masih terjangkau 2: semakin sulit terjangkau 3: sudah tidak dapat terjangkau
Lainnya, sebutkan!	1: ya 2: tidak	1: baru digunakan 2: sudah pernah digunakan sebelumnya	1: masih terjangkau 2: semakin sulit terjangkau 3: sudah tidak dapat terjangkau

Jam Selesai:

Tandatangan Pewawancara



Desa:	Jam Mulai:
Tanggal:	Responden/Jabatan:
Pewawancara :	Nama Sekolah:

I. UMUM

1. Sekolah apa saja (termasuk Taman Kanak_Kanak) yang ada di desa/ lokasi?

Jenis Sekolah	Ada/Tidak Ada
Taman Kanak-Kanak	
Sekolah Dasar	
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	
Perguruan Tinggi	

2. Jika anak-anak dari desa ini ingin bersekolah ke sekolah yang tidak tersedia di desa, di mana mereka harus bersekolah?

Jenis Sekolah	Letak Sekolah	Jarak
Taman Kanak-Kanak		
Sekolah Dasar		
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama		
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas		
Perguruan Tinggi		

4. Apakah ada anak-anak dari luar desa yang harus tinggal di desa ini untuk bersekolah? Jika ada,

Jumlah	Tempat Mereka Tinggal
1. kurang dari setengah 2. setengah 3. lebih dari setengah	1. Tinggal di tempat keluarga 2. Asrama 3. Kost atau sewa 4. Rumah sendiri 5. Lainnya, tolong jelaskan

5. Apakah ada anak-anak yang harus meninggalkan sekolah, walaupun untuk beberapa saat?
Jika ada, apa alasannya?

Alasannya	Jumlah
1. Bekerja 2. Ke ladang 3. Tidak ada biaya 4. Bolos, jelaskan apa alasannya? 5. Lainnya, tolong jelaskan	1. sedikit 2. setengah 3. hampir semua 4. semua

6. Apakah keterjangkauan terhadap pendidikan telah berubah dalam 5 tahun terakhir?

Jumlah sekolah	1. Lebih banyak 2. Sama saja 3. Berkurang 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Kondisi sekolah	1. Lebih banyak 2. Sama saja 3. Berkurang 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Alat-alat dan buku-buku	1. Lebih banyak 2. Sama saja 3. Berkurang 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Staf	1. Lebih banyak 2. Sama saja 3. Berkurang 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Gaji/Honor	1. Lebih banyak 2. Sama saja 3. Berkurang 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu

7. Apakah kualitas pendidikan telah berubah dalam 5 tahun terakhir?

Tingkat Pendidikan guru	1. Lebih baik 2. Sama saja 3. Berkurang 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
Tingkat keaktifan guru dalam mengajar	1. Lebih aktif 2. Sama saja 3. Berkurang keaktifannya 4. Tidak aktif 5. Tidak tahu

Persentase kelulusan	1. Meningkat 2. Sama saja 3. Menurun 4. Tidak tahu
Tingkat orang yang dapat membaca dan menulis (di desa tempat sekolah ini berada)	1. Meningkat 2. Sama saja 3. Menurun 4. Tidak tahu

10. Apakah ada anak yang putus sekolah?
Jika ada, apa alasannya?

11. Apakah pernah ada pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk orang dewasa?

Jika pernah, dari mana pelatihan tersebut didapatkan?

1: program pemerintah, 2: perusahaan, 3: LSM,
4: lainnya, jelaskan

.....

II. DATA SEKUNDER

12. Ada berapa persen jumlah siswa yang lulus ujian pada musim ujian yang baru lalu?

13. Ada berapa jumlah siswa baru kelas 1 tahun ini?

Jam Selesai:

Tandatangan Pewawancara

SURVEI KEMISKINAN RUMAH TANGGA Kabupaten Malinau, Oktober 2003

Desa _____

Tanggal _____

Pewawancara

Pencatat:

Responden (semua)

Kode RT:_____

I Anggota rumah tangga

Berapa anggota rumahtangga?	
Berapa memberi kontribusi terhadap pendapatan rumahtangga?	
Berapa anak-anak masih bersekolah?	
Berapa anak-anak belum bersekolah?	
Berapa ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah?	
Apakah ada anak yang putus sekolah sebelum kelulusan? Jika ada, kenapa?	
Apakah ada keahlian perobatan tradisional di rumahtangga (mis. dukun, medis, dll.)?	

Atap rumah	Tembok/dinding	Lantai	Listrik	WC/Kamar Mandi
1. Genteng 2. Seng 3. Sirap 4. Atap daun	1. Semen/baja 2. Kayu ulin/ bengkirai 3. Papan/ kayu lain 4. Bambu 5. Kulit kayu	1. Ulin 2. Keramik 3. Semen 4. Kayu papan lain 5. Tanah 6. Lainnya_____	1. PLN 2. Listrik kelompok 3. Listrik Kampung 4. Milik Pribadi 5. Tenaga surya 6. Lainnya _____ 7. Tidak ada Listrik	1. WC Di darat 2. WC Di sungai 3. WC di dalam rumah 4. Tidak ada

II Ekonomi

II.1 Bagaimana persepsi anda tentang perubahan ekonomi rumah tangga anda sendiri selama 5 tahun terakhir (setelah otonomi daerah mulai, setelah Suharto turun, setelah Era Reformasi mulai, setelah 1998)?

PENDAPATAN	1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
PENGELUARAN	1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu
KESEJAHTERAAN	1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap 5. Tidak tahu

II.2 **Kenapa** perubahan terjadi?

II.3 Apa sumber pendapatan **uang rumah tangga** yang utama dalam sejak musim ngugal 2002 (12 bulan terakhir)?

Tingkat Kepentingan	Sumber Pendapatan <i>Uang</i> (<i>jenis pekerjaan, barang dijual, sumbangan, pembayaran lain – sewa, fee dll</i>)
No.1 – Paling Penting	
No. 2 – Kedua Terpenting	
No. 3 – Ketiga terpenting	
No. 4 – Keempat terpenting	

II.4 Apakah ada sumber pendapatan yang **baru** muncul sejak otonomi daerah mulai (5 tahun terakhir) yang **belum ada sebelumnya**? Jika ya, apa?

Sumber Pendapatan Uang (jenis pekerjaan, barang dijual, sumbangan, pembayaran lain – sewa, fee dll)	Pentingnya untuk rumah tangga (Y/T)

II.5 Apa saja kepemilikan rumah tangga anda?

Jenis kepemilikan	Apakah Pernah Punya? (Y/T)	Kapan diperoleh? 1 = sebelum 2000 2 = setelah 2000	Apakah kepemilikan tersebut masih ada? (Y/T)
Mobil/Truk			
Sepeda motor			
Sepeda			
Ketinting			
Chainsaw			
Penggilingan padi			
Babi			
Ayam			
Kerbau			
Sapi			
Kolam ikan			
Parabola			
Televisi			
VCD Player			
Stereo/Radio			
Genset			
Lemari es			
Kompor gas			

II.6 Jika ada kebutuhan uang yang mendesak (misalnya: jika ada keluarga yang sakit), **darimana** rumah tangga mendapatkan uang?

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 Keluarga lain | 4 Perusahaan | 7. Gereja/Mesjid |
| 2 Tetangga | 5. Credit union | 8. Pegawai pemerintah |
| 3 Toko | 6. Arisan | 9. Lainnya _____ |

III Gizi

III.1 Berapa kali makan dalam sehari? **1 kali** **2 kali** **3 kali** **4 kali**

Jenis makanan	Seberapa sering? 0: tidak pernah, 1: sebulan sekali atau lebih, 2: seminggu sekali, 3: setiap 2-3 hari, 4: tiap hari	Seberapa banyak yang dibeli? 0: tidak dibeli, 1: kurang dari setengah dibeli, 2: setengah dibeli, 3: lebih dari setengah dibeli, 4: semua dibeli
Nasi		
Daging		
Telur		
Ikan		
Sayur		

III.2 Seberapa banyak rumah tangga anda rata-rata menghabiskan untuk:

Barang	Berapa lama tahan	Per minggu
25 kilo beras		
1 liter minyak goreng		
1 liter minyak tanah		
1 kilo gula		
1 bungkos garam		
10 bungkos mie instan		
1 on bawang merah		
1 bungkos rokok		
1 batang sabun mandi		
1 botol Odol (pasta gigi)		

IV Tata guna Lahan

IV.1 Jenis lahan apa yang Anda miliki?

Tata Guna Lahan	Jumlah bidang	Luas keseluruhan (ha)	Perubahan sejak tahun 98 (Jumlah, ukuran, keadaan)
Kebun sayur			
Kebun rotan			
Kebun buah-buahan			
Kebun kakao			
Kebun kopi			
Lainnya			

IV.2 Apakah Anda membuat ladang/sawah pada tahun:

Tahun	Ladang?	Sawah?
2003		
2002		
2001		
2000		
1999		

IV.3 Jika anda membuat ladang pada tahun 2002 atau 2003 tersebut di atas:

Status Milik	2002		2003	
	Ladang	Sawah	Ladang	Sawah
Milik Sendiri				
Pinjaman				
Hutan rimba				

IV.4 Berapa kaleng ditanam?

2002:	2003:
-------	-------

IV.5 Hasil panen padi tahun 2003 tahanan **berapa bulan?**

IV.6 Darimana Anda mendapatkan beras tambahan untuk tahun 2002 & 2003? (misalnya tetangga, keluarga, beli di warung, raskin, lainnya)

IV.7 Lahan apa dipakai untuk buat ladang?

- 1 Hutan rimba
- 2 Bekas ladang =>20 tahun
- 3 Bekas ladang >10 tahun <20
- 4 Bekas ladang <10 tahun

IV.8 Berapa jarak ladang dari tempat Anda tinggal? Pakai apa?

IV.9 Sumber daya hutan apa yang anda gunakan sebagai sumber **uang** dalam 5 tahun terakhir?

Sumberdaya	Tingkat Kepentingan 1 Sangat 2 Sedang 3 Sedikit	Perubahan Kepentingan 1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap	Perubahan Akses (ketersediaan, hak, transportasi, peralatan, dll) 1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap
Rotan yang ditanam			
Rotan yang tidak ditanam			
Sarang burung			
Kayu ulin/bengkirai			
Kayu lain			
Damar			
Gaharu			
Babi hutan			
Payau, Kijang, Pelanduk			
Tiong			
Madu			
Buah			
Bulu burung			
Lainnya			

IV.10 Apakah Anda melakukan pengolahan produk dari hasil hutan **dalam 12 bulan terakhir?**

Produk	Kepentingan 1 Sangat 2 Sedang 3 Sedikit	Perubahan Kepentingan Dalam 5 tahun terakhir 1. Lebih besar 2. Lebih kecil 3. Sama saja 4. Tidak tetap	Catatan
Tikar			
Keranjang- bakul, anjat dsb			
Sirap			
Kayu gergajian			
Makanan untuk dijual (payang, kruing, dendeng)			
Kulit binatang (macan, beruang)			
Sumpit			
Lainnya			

IV.11 Apakah ada pendapatan dari konsesi/perusahaan selama 5 tahun terakhir?

Sumber Pendapatan	Jenis Pendapatan 1 fee, 2 gaji 3 ganti rugi 4 sewa 5 Lainnya _____	Cara pembayaran 1 bulanan 2 tahunan 3 sekali saja 4 Lainnya _____	Kepentingan 1 Sangat 2 Sedang 3 Sedikit	Catatan
Konsesi Hutan (IHPH)				
IPK, IPPK				
Konsesi Tambang				
Lainnya				

5. PARTISIPASI

5.1 Sejak reformasi, apakah anda bertemu dengan pegawai pemerintah

___ lebih sering ___ sama ___ jarang **dibandingkan dengan sebelum 1998.**

5.2 Biasanya, bertemu mereka di _____desa sendiri, _____Malinau, atau _____desa lain?
(bisa mengisi lebih dari satu jawaban)

5.3. **Kenapa** lebih sering atau jarang? (kalau jawaban 5.1 « sama », lanjut dengan pertanyaan 5.3)

5.4. Sejak reformasi, pernah bertemu dengan pegawai dengan tujuan (lihat pilihan berikutnya)....

5.4.1 ___ minta izin (*sebut untuk apa*) _____

5.4.2 ___ minta informasi (*sebut tentang apa*) _____

5.4.3 ___ ikut dalam sosialisasi program pemerintah (*sebut tentang apa*)

5.4.4 ___ sampaikan permintaan atau proposal proyek desa)
(*sebut tentang apa* _____)

5.4.5 ___ minta tolong tentang persoalan lain di desa (misalnya batas antar desa).

5.4.6 ___ lainnya (*sebut*) _____

5.5 Hubungan tokoh masyarakat desa dengan pegawai di kabupaten _____ lebih baik (dekat),
___ sama, atau _____ kurang baik dibandingkan dengan sebelum 1998

5.6 **Kenapa hubungan tokoh masyarakat** lebih baik atau kurang baik? (kalau jawaban 5.4.1
« sama », lanjut dengan pertanyaan 5.6)

5.7 Bagaimana perubahan perhatian Pemda pada desa ini sejak 5 tahun terakhir?
___Meningkat, ___ Sama ___Turun?

5.8 **Jelaskan** perubahan perhatian sekarang dan sebelum reformasi:

Ucapkan terima kasih!



I. DUKUNGAN

1. Apakah ada dukungan dari pemerintah atau lembaga lain dalam 5 tahun terakhir?
Jika ada,

Bentuk Bantuan	Dari Siapa	Apa Dampaknya	Tingkat Kepuasan
			1. sangat puas 2. puas 3. tidak puas 4. mengecewakan 5. tidak tahu
			1. sangat puas 2. puas 3. tidak puas 4. mengecewakan 5. tidak tahu
			1. sangat puas 2. puas 3. tidak puas 4. mengecewakan 5. tidak tahu

2. Jika ada yang kurang dari program tersebut, bagaimana program tersebut dapat diperbaiki?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

II. Umum

3. Bagaimana Anda melihat situasi Anda sendiri? Apa masalah utama Anda?

- 1.
- 2.

3.

4.

5.

4. Apakah keadaan hidup Anda sudah berubah dalam 5 tahun terakhir?

1: Membaik, 2: sama, 3: memburuk, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

5. Kenapa perubahan terjadi?

6. Apakah Anda pernah mendapatkan bantuan dari pihak keluarga dan non-keluarga:

Pemberi Bantuan	Ya/Tidak
Keluarga	
Non-Keluarga Yang Tinggal di Sekitar Desa	

7. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkan:

	Mampu/Tidak	Jika Tidak, Siapa Yang Pernah Membantu
Pendidikan		
Kesehatan		
Makanan		
Uang		

8. Seberapa sering Anda ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di desa?

1. tidak pernah, 2. jarang, 3. agak sering, 4. sering sekali

9. Bantuan seperti apa yang Anda perlukan dari pihak luar?

III. KEHIDUPAN SOSIAL

10. Apakah ada masalah konflik sosial di desa ini, jika ada apa penyebabnya?

Jenis Konflik	Ada/Tidak Ada	Apa Penyebabnya
Konflik Lahan		
Konflik Keluarga		
Konflik Suku		
Konflik Agama		
Lainnya, sebutkan		
Lainnya, sebutkan		

11. Apakah jumlah konflik berubah dalam 5 tahun terakhir?

1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

12. Apakah tingkat kerjasama/solidaritas telah berubah dalam 5 tahun terakhir (mis: acara adat, gotong royong di ladang, orang membantu ketika ada yang sakit)?

1: meningkat, 2: menurun, 3: sama, 4: berfluktuasi, 5: tidak tahu

IV. IPPK/HPH mini

13. Apakah desa atau seseorang di desa sudah atau pernah mengajukan IPPK/HPH mini? **(Ya/Tidak)**

14. Apakah Anda pernah mendapatkan penghasilan dari IPPK/HPH mini baik berupa fee, ganti rugi atau gaji? **(Ya/Tidak)**

15. Apakah ada pihak luar (misalnya perusahaan) mengajukan permohonan untuk konsesi IPPK/HPH mini, pertambangan, perkebunan di dalam wilayah desa? **(Ya/Tidak)**

16. Apakah Anda terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang perolehan izin tersebut? **(Ya/Tidak)**



Desa:	Jam Mulai:
Tanggal:	Responden:
Pewawancara :	
Pencatat	

Nama Produk	Harga/Satuan	Satuan	Merek/Keterangan Lain
Beras			
Minyak goreng			
Minyak tanah			
Gula			
Garam			
Mie instan			
Bawang merah			
Rokok			
Sabun mandi			
Odol (pasta gigi)			

